

**Meneguhkan Jalan Menuju
Swasembada Pangan**

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

TA 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2024**



www.pertanian.go.id



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Jakarta, 26 Februari 2025

Pt. Inspektur Jenderal

Pt. Latifah, S.P., M.SI, CGCAE
NIP 197409181999032002



KATA PENGANTAR



Upaya penguatan perekonomian nasional terus dilakukan hingga tahun 2024, seiring dengan berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Sektor pertanian tetap menjadi sektor unggulan yang tangguh, berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, dan berperan penting dalam menyediakan pangan bagi 273 juta jiwa masyarakat Indonesia. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor ini melalui berbagai kebijakan strategis guna meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan nasional.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dan terakhir dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, sekaligus menjadi bagian akhir dari perjalanan panjang RPJPN 2005-2025. Oleh karena itu, implementasi program dan kegiatan sektor pertanian harus mampu menjawab target yang telah ditetapkan serta menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi, termasuk perubahan iklim, tekanan geopolitik global, volatilitas harga komoditas, serta tantangan perdagangan internasional. Kementerian Pertanian terus beradaptasi dan merumuskan strategi yang tepat guna memastikan ketahanan pangan nasional serta menjaga pertumbuhan sektor pertanian.

Kementerian Pertanian dalam periode 2020-2024 melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu: (1) Meningkatnya ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas, (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, (3) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, (4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dan (5) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel. Upaya pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Tahun 2024 dilakukan melalui implementasi 5 (lima) Program Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Dukungan Manajemen.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis kinerja selama tahun 2024 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, disusun Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2024. Laporan Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian Tahun 2024 ini menjadi bukti konkret bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan





Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini tidak hanya menjelaskan keberhasilan pembangunan pertanian, tetapi juga mengulas tantangan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan perhatian yang lebih serius guna mencapai target pembangunan pertanian yang lebih optimal di masa depan. Harapan kita semua, kinerja Kementerian Pertanian dapat semakin meningkat dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada, mengatasi hambatan yang muncul, serta mewujudkan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja, capaian indikator kinerja menjadi salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan pertanian. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2024 mencakup 4 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja. Dari jumlah tersebut, 12 indikator mencapai kategori sangat berhasil dan 1 indikator berhasil. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama Tahun 2024 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik dari pemerintah, swasta, akademisi, serta yang terpenting, peran para petani. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Besar harapan kami, Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian sektor pertanian, serta menjadi referensi penting bagi perencanaan pembangunan pertanian ke depan. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus berperan aktif dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian demi kesejahteraan bersama.

Jakarta, 28 Februari 2025

Menteri Pertanian RI,



ANDI AMRAN SULAIMAN





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kementerian Pertanian Tahun 2024 disusun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024.

Laporan Kinerja ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2024, baik keberhasilan yang diraih maupun permasalahan yang memerlukan perbaikan ke depan, serta menyajikan perkembangan kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya terkait pencapaian kedaulatan pangan.

Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran strategis, 12 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan 1 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil. Indikator kinerja yang masuk kategori sangat berhasil yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (3) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (5) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (6) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (7) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian; (8) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (9) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (10) Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya; (11) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian; dan (12) Nilai IKPA Kementerian Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori berhasil yaitu: Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian.





Meskipun berbagai capaian telah diraih, pembangunan pertanian dan pangan masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal, seperti pemenuhan pangan dan kecukupan gizi, defisit perdagangan, serta keterbatasan lahan dan akses pembiayaan. Selain itu, faktor usia dan pendidikan petani, kemiskinan perdesaan, disrupsi industri 4.0, perubahan iklim, serta kelemahan kelembagaan dan ekonomi petani turut mempengaruhi sektor ini. Diperlukan strategi komprehensif untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, capaian kinerja Kementerian Pertanian tetap menunjukkan hasil positif, tidak hanya melalui indikator strategis, tetapi juga melalui berbagai penghargaan yang mencerminkan upaya dan komitmen dalam membangun sektor pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan, antara lain: (1) Penghargaan Komunikasi Publik; (2) Penghargaan Sangat Baik Untuk Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha; (3) Bhumandala Awards; (4) Anindhita Wistara Data; dan (5) Anugerah Media Humas.

Dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2024, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp15,62 triliun yang dialokasikan untuk membiayai 4 (empat) program. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp14,31 triliun atau mencapai 91,59%. Setelah memperhitungkan pagu anggaran yang diblokir untuk *automatic adjustment* sebesar Rp421,83 miliar dan blokir perjalanan dinas sebesar Rp52,92 miliar, maka realisasi anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2024 menjadi sebesar 94,45%. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari APBN baik yang tercantum dalam DIPA Kementerian Pertanian maupun non DIPA Kementerian Pertanian, atau sumber pendanaan lainnya.

Keberhasilan capaian kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya didukung dari internal Kementerian Pertanian, namun tidak terlepas juga dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	5
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	6
D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN	9
A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024	9
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	12
C. Refocusing Program dan Kegiatan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN	25
A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023	25
SASARAN STRATEGIS 1 (SS 1) Meningkatnya Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas.....	29
SASARAN STRATEGIS 2 (SS 2) Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pertanian	94
SASARAN STRATEGIS 3 (SS 3) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional....	120
SASARAN STRATEGIS 4 (SS 4) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian Yang Efektif Dan Efisien Serta Anggaran Yang Akuntabel	134
B. Capaian Kinerja Lainnya	153
C. Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian	157
BAB IV PENUTUP	159
LAMPIRAN	161



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Indikator Kinerja dan Target 2021-2024.....	11
Tabel 2.	Target Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja	14
Tabel 3.	Rincian Automatic Adjustment Kementerian Pertanian per Eselon I Tahun 2024.....	15
Tabel 4.	Realokasi Anggaran per Eselon I.....	16
Tabel 5.	Realokasi anggaran per Eselon I Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi TA 2024.....	17
Tabel 6.	Rincian Kegiatan Refocusing/Realokasi Anggaran Pompanisasi Untuk Peningkatan Luas Tanam TA 2024	19
Tabel 7.	Rincian Intervensi Refocusing Pompanisasi.....	20
Tabel 8.	Rekapitulasi persetujuan Menteri Keuangan berupa pergeseran dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA Kementerian Pertanian (BA 018)	21
Tabel 9.	Tambahan Anggaran Pompanisasi Peningkatan Produksi Padi TA 2024.....	21
Tabel 10.	Rincian Kegiatan Refocusing/Realokasi Anggaran Pompanisasi Untuk Peningkatan Luas Tanam TA 2024	22
Tabel 11.	Usulan Revisi Anggaran per 5 November 2024.....	23
Tabel 12.	Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2024.....	27
Tabel 13.	Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis per Subsektor Tahun 2024.....	31
Tabel 14.	Perkembangan capaian peningkatan ketersediaan pangan strategis tahun 2020-2024	31
Tabel 15.	Perkembangan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2019-2023	32
Tabel 16.	Kontribusi Bantuan Pemerintah Ditjen Tanaman Pangan Terhadap Produksi Jagung Nasional Tahun 2024	36
Tabel 17.	Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2020-2024.....	37
Tabel 18.	Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2020-2024	42
Tabel 19.	Produksi Telur Tahun 2020-2024.....	47
Tabel 20.	Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan Tahun 2024	50
Tabel 21.	Rincian Target dan Realisasi Sampel Pangan Segar Asal Hewan Per UPT dan Wilayah Kerja Tahun 2024	51
Tabel 22.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2020-2024	52
Tabel 23.	Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2024.....	55
Tabel 24.	Perkembangan Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.....	56
Tabel 25.	Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan.....	56
Tabel 26.	Kontribusi Penyelamatan OPT Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2024.....	57





Tabel 27. Capaian Luas Terkena DPI yang dapat ditangani untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan	59
Tabel 28. Kontribusi Penanganan DPI Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2024.....	59
Tabel 29. Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2023-2024.....	61
Tabel 30. Kegiatan Pengendalian Kabupaten/Kota Terhadap 11 Penyakit Hewan Menular Strategis	64
Tabel 31. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) tahun 2020-2024.....	65
Tabel 32. Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2024	69
Tabel 33. Perhitungan Capaian tingkat pemenuhan pemenuhan pengairan pada lahan pertanian TA. 2024.....	72
Tabel 34. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2015 – 2024.....	79
Tabel 35. Realisasi AUTS/K Tahun 2016 – 2024.....	80
Tabel 36. Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2024.....	82
Tabel 37. Realisasi Kemanfaatan Sarana Produksi Asal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2024	85
Tabel 38. Rincian Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet.....	87
Tabel 39. Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida	89
Tabel 40. Identifikasi Indikator Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida	90
Tabel 41. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian.....	92
Tabel 42. Jumlah Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2024	96
Tabel 43. Sebaran Sampel Alsintan Pada Kuesioner Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen Tahun 2024.....	97
Tabel 44. Rekapitulasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan.....	101
Tabel 45. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	103
Tabel 46. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2019-2024.....	106
Tabel 47. Perkembangan ekspor Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2029-2024	108
Tabel 48. Pertumbuhan Volume dan Nilai Ekspor Tahun 2023 dan 2024	108
Tabel 49. Perkembangan ekspor Komoditas Hortikultura.....	110
Tabel 50. Perkembangan ekspor Komoditas Perkebunan.....	113
Tabel 51. Perkembangan ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan	116
Tabel 52. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Tahun 2024	122





Tabel 53. Capaian Kinerja 5 tahun terakhir dari 2020-2024 pada IKU 10 persentase peningkatan SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya124

Tabel 54. Capaian Kinerja 5 tahun terakhir dari 2020-2024128

Tabel 55. Data Jumlah Poktan dan Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian Bulan Desember 2024.....131

Tabel 56. Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)133

Tabel 57. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian TA 2024.....137

Tabel 58. Capaian Indikator Penilaian RB kementerian Pertanian Tahun 2024.....138

Tabel 59. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian149

Tabel 60. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKPA Kementerian Pertanian.....150

Tabel 61. Perkembangan nilai IKPA tahun 2020-2024150

Tabel 62. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan dan dimanfaatkan pada tahun 2024.....154





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	PDB Sektor Pertanian Tahun 2018-2024.....	2
Gambar 2.	Peta Strategi Pembangunan Pertanian 2020-2024.....	10
Gambar 3.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2020-2024.....	33
Gambar 4.	Kegiatan Bantuan Padi Biofortifikasi Tahun 2024	34
Gambar 5.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2020-2024	35
Gambar 6.	Produksi Cabai (Ton) Tahun 2020 – 2024.....	38
Gambar 7.	Produksi Bawang Merah Tahun 2020 – 2024	39
Gambar 8.	Perkembangan Produksi Bawang Putih Tahun 2020-2024.....	40
Gambar 9.	Produksi Susu Nasional Tahun 2020-2024	46
Gambar 10.	Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2020-2024	52
Gambar 11.	Kegiatan Gerdal Padi dan Akabi Tahun 2024	58
Gambar 12.	Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024	60
Gambar 13.	Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT tahun 2024	62
Gambar 14.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2020-2024	70
Gambar 15.	Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.....	71
Gambar 16.	Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 2024 di Provinsi Kalsel dan Olah tanah di Provinsi Lampung.....	75
Gambar 17.	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Tahun 2020-2024	82
Gambar 18.	Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Subsidi.....	90
Gambar 19.	Pemanfaatan Pompa Air Bantuan TA. 2023 di Gapoktan Ngadirejo Desa Ngadirejo.....	93
Gambar 20.	Combine Harvester Besar Bantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2024.....	97
Gambar 21.	Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2020-2023.....	99
Gambar 22.	Bantuan Sarana Pacapanen Kopi kepada Kelompok tani Mitra Tani, Kab Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu	102
Gambar 23.	Bantuan Solar <i>Dryer Portable</i> kepada Kelompok Tani Karya Maju, Kab.Temanggung, Provinsi Jawa Tengah	102
Gambar 24.	Fasilitasi Prasarana Pengoalahan dan Pemasaran di Pasar Ternak Bumi Ayu Brebes	104
Gambar 25.	Target dan Perkembangan Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Ekspor Tahun 2020-2024	107
Gambar 26.	<i>Asia Fruit Logistica Business Meet-Up</i> : Stasiun Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024	112
Gambar 27.	Launching Ekspor Manggis di Kab. Purwakarta, 07 Maret 2024.....	112





Gambar 28. Tampilan Beranda Aplikasi Elektronik Pemantauan Indikator Kinerja (EPIK).....121

Gambar 29. Transformasi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)126

Gambar 30. Komponen Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024135

Gambar 31. Perkembangan Indeks RB Kementerian Pertanian Tahun 2020-2023137

Gambar 32. Piagam Penghargaan Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha155

Gambar 33. Penghargaan Top Digital Awards Tahun 2024.....155

Gambar 34. Kementan Raih Bhumandala Awards Tahun 2024.....156

Gambar 35. Penyerahan Penghargaan Anindhita Wistara Data.....156

Gambar 36. Sertifikat dan Piagam Terbaik I Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024157









BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai penyedia pangan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sumber utama pakan ternak dan bioenergi yang berkelanjutan. Seiring dengan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 317 juta jiwa pada tahun 2050 (United Nations Population, 2022), tantangan dalam memastikan ketahanan pangan nasional semakin kompleks. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi pangan harus terus dilakukan melalui inovasi teknologi, modernisasi pertanian, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor ini.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan sektor pertanian harus sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan kinerja positif dengan capaian indikator makro yang semakin membaik, antara lain stabilitas inflasi, penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan kontribusi sektor pertanian yang tetap kuat, diharapkan pembangunan ekonomi nasional semakin berkualitas dan berkelanjutan, mampu meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat daya saing komoditas pertanian di pasar global.

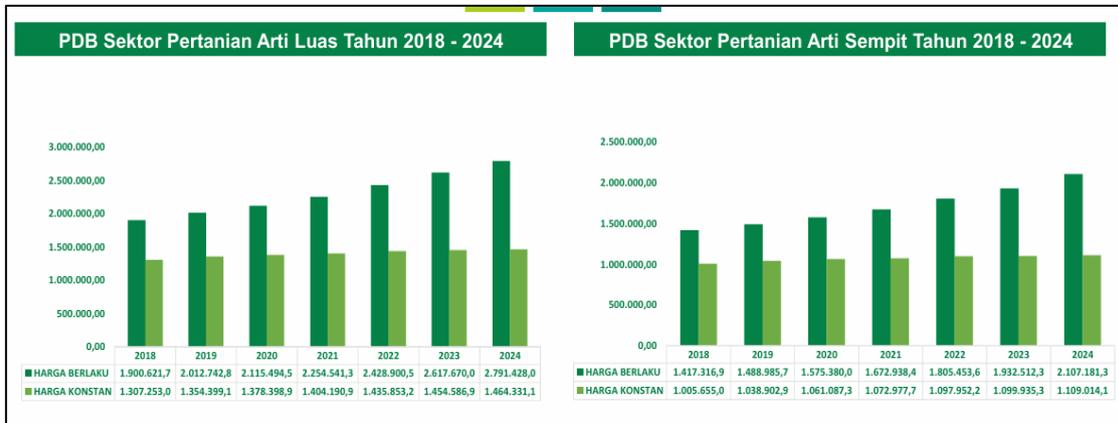
Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan yang impresif di tengah tantangan global, seperti perlambatan ekonomi dunia, meningkatnya tekanan geopolitik, risiko perubahan iklim, serta penurunan harga komoditas ekspor unggulan. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% (y-on-y), menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2023 dan tetap berada di kisaran 5%. Sektor pertanian terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, menjadikannya salah satu dari lima sektor utama dengan peran terbesar, bersama dengan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sektor pertanian tumbuh sebesar 0,82% (y-on-y) dan berkontribusi sebesar 12,61% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mencerminkan peran strategis sektor pertanian dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik.

Tren positif sektor pertanian ini telah terlihat sejak tahun 2018 hingga 2024. Sejak tahun 2018, PDB Sektor Pertanian menunjukkan tren positif. PDB pertanian arti luas berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 6,64% dan harga konstan naik 0,68%.





Sedangkan pertanian arti sempit berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 9,05% dan harga konstan naik 0,9%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Perkembangan PDB Sektor pertanian tahun 2018-2024 dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. PDB Sektor Pertanian Tahun 2018-2024

Sumber: BPS, 2025

Kinerja positif sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penopang pembangunan nasional, namun juga berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting. Selain itu, dengan memacu kinerja sektor pertanian, diharapkan dapat meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan agroindustri hilir dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara.

Namun demikian tantangan masih ada, terutama terkait distribusi hasil pertumbuhan ekonomi kepada petani kecil. Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa jumlah petani gurem—petani dengan lahan kurang dari 0,5 hektar—mencapai 17,25 juta orang, atau 62,05% dari total petani pengguna lahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan pertanian, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha tani, terutama petani kecil.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah berkomitmen untuk mendorong transformasi struktural melalui revitalisasi industri pengolahan pertanian dan pengembangan sektor lain. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata di kalangan petani. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024.

Pembangunan pertanian saat ini tidak lagi hanya berfokus pada sektor hulu, tetapi juga diarahkan sebagai pendorong transformasi pembangunan yang lebih seimbang dan





menyeluruh, dikenal dengan konsep *Agriculture for Development*. Pendekatan ini menekankan bahwa sektor pertanian tidak hanya berperan dalam produksi pangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem industri yang berkelanjutan. Prinsip *zero waste* menjadi salah satu fokus utama, di mana seluruh hasil pertanian—baik produk utama, produk sampingan, maupun limbah—dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ekosistem industri berbasis pertanian.

Dalam implementasinya, pembangunan pertanian berkelanjutan harus mempertimbangkan berbagai tantangan dan dinamika global maupun domestik. Beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi meliputi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, konversi lahan pertanian yang terus meningkat, wabah PMK, serta ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Selain itu, ketidakstabilan geopolitik global berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan dan gangguan rantai pasok, yang dapat memengaruhi ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pertanian ke depan harus lebih adaptif dan inovatif, dengan menyeimbangkan aspek produksi, ekologi, dan kesejahteraan petani.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan pangan, dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) pemenuhan pangan dan kecukupan gizi; (2) defisit perdagangan subsektor tanaman pangan dan hortikultura; (3) status dan luas kepemilikan lahan; (4) pendidikan dan usia petani; (5) kemiskinan perdesaan; (6) dampak disrupsi revolusi industri 4.0; (7) dampak perubahan iklim (DPI); (8) keterbatasan akses pembiayaan bagi petani; dan (9) lemahnya kelembagaan petani dan ekonomi petani. Untuk menghadapi isu strategis dan permasalahan tersebut, maka harus melakukan strategi dengan mengoptimalkan potensi pertanian yang dimiliki Indonesia, yang dapat bersumber dari: (1) keanekaragaman hayati; (2) lahan pertanian; (3) jumlah penduduk usia produktif (bonus demografi); dan (4) pemanfaatan hasil inovasi dan teknologi pertanian.

Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan sektor pertanian, maka strategi pembangunan sektor pertanian dilakukan melalui: 1) peningkatan kapasitas produksi komoditas prioritas; 2) modernisasi pertanian; 3) penguatan SDM pertanian, kelembagaan dan kelembagaan ekonomi petani; dan 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian. Strategi yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian yang diukur melalui pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024, yaitu: (1) meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, (2) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, (3) meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dan (4) terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel.

Sebagai langkah implementasinya, Kementerian Pertanian melakukan kegiatan strategis pada tahun 2024, meliputi: (1) percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung; (2) pompanisasi air sungai mendukung peningkatan luas tanam padi; (3) optimasi lahan; (4) pemenuhan kebutuhan benih; (5) penguatan infrastruktur pertanian; (6) penerapan dan pemanfaatan standarisasi instrumen pertanian; (7) penguatan





penyuluhan; dan (8) pelaksanaan reformasi birokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan kawasan komoditas strategis, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan sinergi antar stakeholder di pusat maupun di daerah.

Melalui berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain dengan meningkatnya produksi beberapa komoditas strategis pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu: (1) produksi jagung mencapai 20,48 juta ton meningkat 2,47%; (2) produksi bawang merah mencapai 2,09 juta ton meningkat 5,07%, (3) produksi bawang putih mencapai 39,4 ribu ton meningkat 0,48%, (4) susu mencapai 808,35 ribu ton meningkat 2,66%, dan (5) telur mencapai 6,88 juta ton meningkat 4,42%.

Meskipun kinerja sektor pertanian pada tahun 2024 memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan, namun diakui masih memerlukan upaya keras untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sepanjang tahun 2024 sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja Kementerian Pertanian dan dapat mencapai target pembangunan pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada Kementerian Pertanian semata, namun terdapat pihak lain yang memiliki peran dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang harus dioptimalkan melalui koordinasi antar K/L, seperti: Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDPT), TNI-AD, Kepolisian Republik Indonesia, BULOG, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dunia usaha, lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan, serta peran aktif petani, pekebun, peternak, dan penyuluh pertanian di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kerjasama dan sinergitas seluruh pihak pelaku pembangunan pertanian sangat diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia.

Pembangunan pertanian membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan profesional, serta alokasi yang tepat sasaran dan efisien. Sumber pendanaan berasal dari APBN, termasuk rupiah murni, dana dekonsentrasi, dan tugas perbantuan, serta dari berbagai sumber lain seperti subsidi, Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman luar negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), APBD, investasi swasta, perbankan, dan swadaya masyarakat. Mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan, Kementerian Pertanian mengoptimalkan berbagai skema pendanaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian.

Pada Tahun 2024, dukungan anggaran APBN Kementerian Pertanian sebesar Rp15.585.644.566.000,- dengan realisasi sebesar Rp14.272.137.630.919,- atau





mencapai 91,57%. Pada tahun 2024, terdapat pagu blokir pada anggaran Kementan sebesar Rp421.829.409.000,- dan penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp52.915.964.000,- maka pagu efektif Kementerian Pertanian menjadi Rp15.110.899.193.000,- sehingga realisasi Kementan tahun 2024 berdasarkan pagu efektif sebesar 94,45%.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 3 (tiga) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Perpres Nomor 117 Tahun 2022 selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Permentan Nomor 19 Tahun 2022, telah menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Dalam perkembangannya, pada tanggal 20 Juli 2023 Presiden terbit Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Sehingga pada saat Perpres ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Badan Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berdampak pada perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian dimana Badan Karantina Pertanian sudah tidak menjadi bagian dari Kementerian Pertanian terhitung sejak Perpres Nomor 45 tahun 2023 ditetapkan.

Pada bulan November 2024, terbit Perpres Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian yang menetapkan bahwa Kementerian Pertanian terdiri atas 13 eselon I, yaitu: Sekretariat Jenderal, 6 (enam) Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, 2 (dua) Badan dan 5 (lima) Staf Ahli. Namun karena tahun 2024 merupakan akhir masa periode presiden sebelumnya, maka pada laporan kinerja ini masih mengacu pada Perpres Nomor 117 tahun 2022 dan Perpres Nomor 45 tahun 2023, sehingga Badan Karantina Pertanian sudah tidak menjadi bagian dalam pelaporan kinerja Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur organisasi Kementerian Pertanian secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;





3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
5. Penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian;
6. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian yang telah disesuaikan dengan Perpres Nomor 45 tahun 2023, terdiri atas:

1. Wakil Menteri Pertanian;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktorat Jenderal Hortikultura;
6. Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
11. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
12. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
13. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
14. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
15. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
16. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
18. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian; dan
19. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Tugas dan fungsi unit organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin





- pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian.
2. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
 3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
 4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.
 5. Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.
 6. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.
 7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
 8. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
 9. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
 10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
 11. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan bio industri;
 - b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional;
 - c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian;
 - d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang





infrastruktur pertanian.

12. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.
13. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
14. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
15. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh 10.309 orang pegawai yang tersebar di 9 Unit Kerja Eselon I termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Klasifikasi pegawai Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan Golongan, dengan rincian sebagai berikut: Golongan I sebanyak 51 orang, golongan II sebanyak 1.541 orang, golongan III sebanyak 6.970 orang, dan golongan IV sebanyak 1.747 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikan dirinci sebagai berikut: S3 sebanyak 401 orang, S2 sebanyak 2.092, S1/D4 sebanyak 3.339 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 1.236 orang, SLTA sebanyak 3.388 orang, serta SLTP/SD sebanyak 238 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 (14.380 orang) mengalami pengurangan sebanyak 3.999 orang atau 28,31%. Pengurangan jumlah pegawai disebabkan karena adanya mutasi pegawai (reorganisasi Badan Karantina Pertanian, perpindahan ke K/L lain), pensiun, dan meninggal dunia. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Selain didukung oleh pegawai berstatus PNS, keberhasilan program pembangunan pertanian juga mendapat dukungan dari pegawai ASN dan non ASN di lapangan, yaitu ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 283 orang (merupakan rekrutmen th 2022 dan 2023), Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP) sebanyak 1.129 orang, penyuluh swadaya sebanyak 26.957 orang, dan penyuluh swasta sebanyak 502 orang.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024

Tahun 2024 merupakan tahun akhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode 2020-2024. Renstra Kementerian Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2020, kemudian mengalami revisi pertama sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 dan mengalami revisi kedua sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/RC.020/M/8/2021. Revisi Renstra dilakukan karena adanya perubahan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), kebijakan dan strategi organisasi yang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi, sehingga berdampak pada perubahan target fisik kegiatan dan kebutuhan anggaran.

Revisi Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 dilakukan sebagai bentuk respon dari dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan pertanian. Secara spesifik pertimbangan revisi tersebut adalah: (1) terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran dan kebijakan penting lainnya, (2) terdapat beda waktu terbitnya Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 (Kepmentan Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2020 tertanggal 4 Mei 2020 dan Kepmentan Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 tertanggal 27 November 2020) dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2021 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2021 tertanggal 24 Juni 2021 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga, hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target, dan (3) merespon dinamika perubahan kebijakan Kementerian Pertanian, yaitu adanya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 serta mempertimbangkan arahan Presiden, maka kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 6 (enam) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian,





5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM) dan kelembagaan pertanian nasional,
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang dijadikan panduan pelaksanaan pembangunan pertanian selama lima tahun (2020-2024). Renstra Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2020-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Arah dan tujuan pembangunan pertanian yang dituangkan dalam Renstra Kementan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Arah Pembangunan Pertanian yaitu **"Pertanian Yang Maju, Mandiri Dan Modern Untuk Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"**.

Adapun Tujuan Pembangunan Pertanian adalah:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis pembangunan pertanian disusun berdasarkan target seperti tertuang pada RPJMN 2020-2024, selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi pembangunan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan lima sasaran strategis melalui empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*, untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas arah dan tujuan pembangunan pertanian di Indonesia, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Strategi Pembangunan Pertanian 2020-2024

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 (Revisi II)





Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2021-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 Revisi II disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target 2021-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
1 Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	1,81	3,64	4,44	5,34
	2 Peningkatan Akses Pangan	%	3,61	5,17	5,34	5,97
	3 Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	%	2,27	2,27	2,27	2,27
	4 Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	85,10	85,25	85,35	85,5
	5 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,10	70,2	70,3	70,4
	6 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,50	80,5	81	81
	7 Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan	%	100	100	100	100
	8 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	42	43	44	45
	9 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	56,16	56,77	57,41	58,07
	10 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	86,69	88,14	89,39	90,56
2 Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	84,40	85,33	86	86,9
	12 Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	7,71	9,21	10,75	12,28
3 Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	%	70	70	75	75
	14 Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	%	75	80	85	90
4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	15 Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	75	80	85	90
	16 Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	19	20	21	22
5 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	17 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	80,71	81,46	82,21	82,96
	18 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,61	91,98	92,36	92,73

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi II)





Indikator kinerja pada Tabel 1 merupakan indikator yang tertera pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi II), dengan target sebanyak 18 indikator yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun kedua pelaksanaan Renstra 2020-2024, diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB No 53/2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Kementerian Pertanian telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2024. Perjanjian Kinerja tahun 2024 ditetapkan pada bulan Desember Tahun 2023, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian TA 2023 disahkan. Seiring dengan perjalanan waktu, Kementerian Pertanian melakukan 4 (empat) kali revisi PK pada bulan Agustus, September, November dan Desember yang dapat dilihat secara rinci pada **Lampiran 3**.

Revisi tersebut terjadi karena adanya perubahan tugas dan fungsi organisasi serta perubahan anggaran, yang mengakibatkan perubahan indikator kinerja dan pagu





Kementerian Pertanian, sehingga Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian juga mengalami penyesuaian. Penyesuaian PK Kementerian Pertanian dilakukan atas dasar sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Menteri pertanian Tahun 2024 di buat pada tanggal 22 Desember 2023 berpedoman pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 Revisi 2 tanggal 26 Agustus 2021 untuk Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Srategis serta Target sedangkan untuk anggaran pada PK Menteri Pertanian berpedoman pada SP DIPA Induk pada tanggal 24 November 2023 dengan Pagu Rp14.828.025.437.000,-
2. Revisi PK pertama tanggal 23 Agustus 2024 terjadi karena: a) Adanya penambahan dan pergeseran anggaran pada masing-masing program menjadi Rp15.544.966.825.000,-; b) perubahan target indikator pada IKSP 2. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Asal Ternak yang (86% menjadi 91,94%); ISKP 3. Persentase Serangan OPT dan DPI yang ditangani (70,90% menjadi 89,97%); IKSP 6. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian (90,56% menjadi 94,62%); IKSP 7. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian (88,53% menjadi 91,19%); IKSP 12. Nilai RB Kementerian Pertanian (82,96 Nilai menjadi 84,76 Nilai); c) Perubahan nomenklatur dan target IKSP 13. NKA Kementerian Pertanian menjadi Nilai IKPA Kementerian Pertanian (92,73 Nilai menjadi 89,50 Nilai).
3. Revisi PK kedua tanggal 3 September 2024 karena adanya penambahan anggaran menjadi Rp15.546.994.553.000,-
4. Revisi PK ketiga tanggal 28 November 2024 karena: a) Penambahan anggaran menjadi Rp15.564.706.170.000,-; b) Perubahan target indikator IKSP 5. Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (58% menjadi 54,47%).
5. Revisi PK keempat tanggal 31 Desember 2024 karena adanya penambahan pagu hibah langsung (hibah luar negeri) dari anggaran Kementerian Pertanian menjadi Rp 15.581.236.122.000,-.

Revisi PK dilakukan sesuai dengan tata cara revisi PK yang termuat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Lampiran I mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Lampiran I, Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat, 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), serta 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja maka ditetapkan target kinerja Kementerian Pertanian yang termuat pada PK Tahun 2024 dan secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.





Tabel 2. Target Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja

No	SASARAN	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	1,33%
		1-2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	91,94%
		1-3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	89,87%
		1-4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,50%
		1-5	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	54,47%
		1-6	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	94,62%
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	91,19%
		2-2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	6,53%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	3-1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	90%
		3-2	Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan Teknologi	22%
		3-2	Persentase Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	90%
4	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	4-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	84,76 Nilai
		4-2	Nilai IKPA Kementerian Pertanian	89,50 Nilai

Sumber: PK Kementerian Pertanian, 2024

C. Refocusing Program dan Kegiatan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

APBN 2024 memiliki tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". APBN berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, menjaga keseimbangan fiskal, dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 difokuskan pada perlindungan rakyat, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi berkelanjutan, pembangunan SDM berdaya saing, pencapaian target pembangunan RPJMN 2020-2024, dan menuju Indonesia Emas 2045. Menyikapi kebijakan Pemerintah Indonesia, maka Kementerian Pertanian melakukan penyesuaian program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dan menghadapi dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 hal Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp14.734.899.511.000. Sesuai dengan DIPA yang telah ditetapkan pada tanggal 30 November 2023, komposisi anggaran Kementerian Pertanian telah sesuai dengan yang dituangkan dalam Renja dan RKA-K/L TA 2024 dengan komposisi secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 4**.





1. *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2024

Automatic adjustment adalah kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan belanja negara secara otomatis yang bertujuan untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). *Automatic adjustment* tidak mengurangi pagu total hanya bersifat blokir (anggaran tidak dapat dilaksanakan). Berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA Kementerian Pertanian TA 2024, terdapat blokir *automatic adjustment* awal sebesar **Rp453.043.044.000** sebagaimana ditetapkan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Dalam perkembangannya, Kementerian Pertanian pada TA 2024 mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan untuk Pompanisasi Air Sungai Peningkatan Produksi Padi dan mendapatkan alokasi tambahan sebesar Rp1.742.369.900.000,00. Dari total tambahan tersebut, belum mengakomodir operasional pengawalan dan pendampingan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut dilakukan melalui relaksasi/pemanfaatan anggaran blokir *automatic adjustment* sebesar Rp31.213.635.000,00 dengan rincian pada sub penjelasan selanjutnya.

Sehubungan dengan adanya alokasi dan perubahan tersebut, maka *automatic adjustment* Kementerian Pertanian TA 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian per Eselon I Tahun 2024

NO	ESELON I	AUTOMATIC ADJUSTMENT (Rp)		
		SEMULA	RELAKSASI	MENJADI
	TOTAL	453.043.044.000	(31.213.635.000)	421.829.409.000
1	Sekretariat Jenderal	70.095.032.000	-	70.095.032.000
2	Inspektorat Jenderal	47.692.326.000	-	47.692.326.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	42.967.689.000	-	42.967.689.000
4	Ditjen Hortikultura	40.281.266.000	-	40.281.266.000
5	Ditjen Perkebunan	57.288.869.000	-	57.288.869.000
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	28693545000	-	28693545000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	73.781.066.000	(9.500.000.000)	64.281.066.000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	65.315.616.000	-	65.315.616.000
9	Badan PPSDM Pertanian	26.927.635.000	(21.713.635.000)	5.214.000.000
10	Badan Karantina Indonesia (BA127)	-	-	-

Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan penyediaan pangan yang semakin kompleks, seperti dampak El-Nino terhadap penurunan produksi, tekanan global yang menyebabkan terganggunya distribusi pangan, serta adanya restriksi ekspor dari negara produsen pangan, Kementerian Pertanian berupaya terus menjamin ketersediaan pangan masyarakat melalui peningkatan produksi dalam negeri.

2. *Refocusing/Realokasi* untuk Reprioritasi Anggaran Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung sebesar Rp7,74 Triliun

Upaya Khusus (UPSUS) percepatan dan perluasan tanam bertujuan meningkatkan produksi padi dan jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional serta menjadikan





Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Kegiatan ini mencakup peningkatan Indeks Pertanaman (IP), Perluasan Areal Tanam (PAT), optimalisasi lahan rawa, mekanisasi, perbaikan sistem pengairan, serta penguatan kelembagaan dan SDM pertanian. UPSUS melibatkan tujuh Unit Eselon I Kementerian Pertanian, dengan Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai pengampu utama. Karena pengusulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tidak memungkinkan di awal tahun, Kementan mengalokasikan Rp7,74 triliun melalui refocusing dan realokasi anggaran.

Reprioritasi dalam hal ini adalah merealokasi kegiatan eksisting yang ada Eselon I pada awal tahun menjadi kegiatan yang tingkat urgensinya lebih mendesak untuk dilaksanakan segera. Langkah tersebut mengakibatkan realokasi dan pergeseran anggaran antar eselon I pada TA 2024, dengan rincian kegiatan pada tabel 4.

Tabel 4. Realokasi Anggaran per Eselon I

No	Eselon I	Pagu Awal (Rp)	Realokasi (Rp)		Pagu Menjadi (Rp)
			Internal	Eksternal	
	TOTAL	14.734.899.511.000	5.124.032.965.000	-	14.734.899.511.000
1	Sekretariat Jenderal	1.507.829.567.000	-	-	1.507.829.567.000
2	Inspektorat Jenderal	124.237.528.000	-	-	124.237.528.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	3.002.252.656.000	2.838.739.982.000	1.169.538.090.000	4.171.790.746.000
4	Ditjen Hortikultura	1.006.491.086.000	25.000.000.000	(573.852.365.000)	432.638.721.000
5	Ditjen Perkebunan	1.067.465.829.000	25.000.000.000	(356.774.780.000)	710.691.049.000
6	Ditjen Peternakan dan Kewan	2.543.051.794.000	-	(1.635.201.943.000)	907.849.851.000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2.575.954.390.000	2.180.292.983.000	1.448.290.998.000	4.024.245.388.000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	975.431.462.000	25.000.000.000	(52.000.000.000)	923.431.462.000
9	Badan PPSDM Pertanian	946.911.381.000	30.000.000.000	-	946.911.381.000
10	Badan Karantina Indonesia	985.273.818.000	-	-	985.273.818.000

Refocusing/realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2024 dilakukan melalui optimalisasi anggaran internal, pergeseran anggaran antar Eselon I, dan tidak mengubah total anggaran per program sehingga tidak memerlukan mekanisme persetujuan DPR RI (dalam hal ini Komisi IV DPR RI selaku mitra Kementerian Pertanian). Surat usulan *refocusing*/realokasi anggaran telah disampaikan Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor B-01/RC.110/M/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 hal Penyampaian Usulan *Refocusing*/Realokasi Anggaran TA 2024, dengan seluruh proses usulan revisi telah dilaksanakan dan DIPA revisi secara menyeluruh telah terbit tanggal 5 Januari 2024.

3. Refocusing/Realokasi Anggaran TA 2024 untuk Pompanisasi Air Sungai Peningkatan Luas Tanam Padi Rp1,3 Triliun (Tahap I)

Untuk menjaga pasokan dan ketersediaan beras untuk mencukupi kebutuhan maka diperlukan upaya startegis untuk meningkatkan produksi padi. Sebagai langkah cepat, Kementerian Pertanian menyusun strategi peningkatan produksi padi tahun 2024, antara lain:

1. **Optimalisasi lahan rawa mineral** seluas 400.000 ha di 10 provinsi untuk menambah luas areal tanam.
2. **Pengembalian alokasi pupuk bersubsidi** menjadi 9,55 juta ton dan memperbolehkan pengambilan menggunakan KTP, mengingat bahwa alokasi





pupuk bersubsidi dalam lima tahun terakhir menurun drastis dibanding tahun 2014-2018.

3. **Pemanfaatan pompanisasi** dengan anggaran Rp1,3 triliun untuk mengatasi kekeringan dan meningkatkan produksi padi.

Pompanisasi atau irigasi perpompaan merupakan sistem irigasi yang memanfaatkan pompa air untuk mendistribusikan air melalui saluran terbuka maupun tertutup. Kegiatan ini difokuskan pada lahan sawah tadah hujan yang berdekatan dengan sungai atau memiliki sumber air tanah yang bisa dimanfaatkan, serta lahan pertanian yang terancam kekeringan. Dari potensi lahan tadah hujan sekitar 3 juta ha, hasil overlay dengan sungai-sungai besar dan kecil menunjukkan bahwa 2,1 juta ha lahan potensial dapat dikembangkan dengan pompanisasi untuk mendukung peningkatan luas tanam dan indeks pertanaman (IP).

Realokasi kegiatan dan anggaran pompanisasi **bersumber dari refocusing/realokasi anggaran Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi TA 2024 sebesar Rp7,74 triliun** yang DIPA-nya telah terbit pada 5 Januari 2024. Penggunaan kegiatan dan anggaran memperhatikan tingkat urgensi dan kepentingan serta ketersediaan anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA 2024.

Total anggaran yang akan di-*refocusing* adalah sebesar Rp1,31 triliun yang bersumber dari anggaran 2 (dua) unit Eselon I yaitu Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mendukung kegiatan pompanisasi secara menyeluruh dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Direktorat Teknis Alat dan Mesin Pertanian, Irigasi, dan Pupuk dan Pestisida. Rincian realokasi anggaran mendukung percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padai dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Realokasi anggaran per Eselon I Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi TA 2024

NO	ESELON I / UNIT KERJA	PAGU SEMULA (Rp)	REALOKASI (Rp)		PAGU MENJADI (Rp)
			INTERNAL	EKSTERNAL	
	TOTAL	13.563.435.046.000			13.563.435.046.000
1	Sekretariat Jenderal	1.266.153.412.000	-	-	1.266.153.412.000
2	Inspektorat Jenderal	124.237.528.000	-	-	124.237.528.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	4.171.790.746.000	-	(889.487.392.000)	3.282.303.354.000
4	Ditjen Hortikultura	432.638.721.000	-	-	432.638.721.000
5	Ditjen Perkebunan	710.691.049.000	-	-	710.691.049.000
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	929.988.457.000	-	-	929.988.457.000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	4.024.245.388.000	419.442.080.000	889.487.392.000	4.913.732.780.000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	923.431.462.000	-	-	923.431.462.000
9	Badan PPSDM Pertanian	946.911.381.000	-	-	946.911.381.000
10	Badan Karantina Indonesia (BA127)	33.346.902.000	-	-	33.346.902.000
			Total Realokasi (+)	1.308.929.472.000	

Usulan *refocusing/realokasi* anggaran pompanisasi air sungai peningkatan luas tanam TA 2024 telah disampaikan Kementerian Pertanian melalui surat Menteri





Pertanian Nomor: B-38/RC.110/M/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Surat Persetujuan Nomor: B-40/RC.110/M/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, dan proses usulan revisi selesai dilaksanakan setelah terbitnya DIPA revisi tanggal 19 Maret 2024.

4. *Refocusing/Realokasi Anggaran TA 2024 untuk Pompanisasi Air Sungai Peningkatan Luas Tanam Padi Rp415 Miliar (Tahap II)*

Dampak El-Nino ekstrem tahun 2023 masih berlanjut pada 2024, menyebabkan mundurnya musim tanam dan berkurangnya curah hujan di berbagai wilayah Indonesia dan berakibat ketersediaan air untuk pertanaman padi belum mencukupi. Seluruh wilayah yang terdampak rendahnya curah hujan masuk dalam rencana intervensi irigasi perpompaan di 34 provinsi. Untuk mendukung keberhasilan PAT padi, pemerintah meningkatkan ketersediaan air melalui irigasi pompanisasi di sawah irigasi yang kekurangan air serta sawah tadah hujan. KemenPUPR dan Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi 100.605 ha lahan sawah tadah hujan yang memiliki sumber air dan siap dipompanisasi agar dapat segera diolah dan ditanami. Pompanisasi juga memungkinkan lahan sawah ditanami hingga 2-3 kali setahun jika ketersediaan air mencukupi.

Sebagai langkah peningkatan produksi padi 2024, Kementerian Pertanian menjalankan optimasi lahan rawa seluas 400.000 ha serta program pompanisasi di sawah tadah hujan yang memiliki sumber air. Kementerian Pertanian mengusulkan kembali program pompanisasi guna meningkatkan ketersediaan air dan produktivitas pertanian. Hasil koordinasi dengan PUPR menetapkan 100.605 ha sawah tadah hujan sebagai target intervensi pompanisasi.

Untuk mendukung perluasan areal tanam, pemerintah telah mendistribusikan 27.548 unit pompa air yang mencakup irigasi 275.480 ha, tetapi masih diperlukan tambahan pompa. Refocusing Tahap II mengusulkan pengadaan 4.825 unit pompa, 1.754 unit irigasi perpompaan, dan 120 unit kegiatan irigasi lainnya guna memperluas PAT hingga 100.605 ha. Dalam koordinasi dengan Kementerian PUPR pada 14 Maret 2024, ditargetkan perluasan tanam 1 juta ha lahan tadah hujan. Survei pada 15-22 Maret 2024 dilakukan bersama BBWS/BWS, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian untuk menentukan titik lokasi sumber air dan verifikasi ketersediaannya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian melalui surat Menteri Pertanian Nomor: B38/RC.110/M/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 telah mengusulkan *refocusing/realokasi* Anggaran TA 2024 sebesar Rp1,3 triliun untuk pompanisasi air sungai untuk peningkatan luas tanam padi kepada Menteri Keuangan, dan telah diproses dengan terbitnya DIPA Revisi Kementerian Pertanian TA 2024 tanggal 19 Maret 2024. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan potensi lahan sawah tadah hujan yang dapat diintervensi dengan irigasi perpompaan, masih diperlukan adanya tambahan penyediaan pompanisasi, termasuk irigasi pertanian dan alat mesin pertanian untuk peningkatan luas tanam padi tahun 2024.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pertanian kembali mengusulkan *refocusing/realokasi* program/kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian TA 2024 sebesar **Rp415,3 miliar** sesuai surat Menteri Pertanian nomor B-55/RC.110/M/04/2024 tanggal 1 April 2024 hal Usulan Refocusing/Realokasi dan Revisi Anggaran TA 2024 dan





Surat Persetujuan Nomor B-54/RC.110/M/04/2024 tanggal 1 April 2024. Total anggaran yang di-*refocusing* adalah sebesar Rp415,3 miliar yang bersumber dari anggaran 2 (dua) unit Eselon I yaitu: Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Rincian Kegiatan Refocusing/Realokasi Anggaran Pompanisasi Untuk Peningkatan Luas Tanam TA 2024

NO	ESELON I / UNIT KERJA	PAGU SEMULA (Rp)	REALOKASI (Rp)		PAGU MENJADI (Rp)
			INTERNAL	EKSTERNAL	
	TOTAL	13.563.435.046.000			13.563.435.046.000
1	Sekretariat Jenderal	1.266.153.412.000	-	-	1.266.153.412.000
2	Inspektorat Jenderal	124.237.528.000	-	-	124.237.528.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	3.282.303.354.000	-	(400.005.000.000)	2.882.298.354.000
4	Ditjen Hortikultura	432.638.721.000	-	-	432.638.721.000
5	Ditjen Perkebunan	710.691.049.000	-	-	710.691.049.000
6	Ditjen Peternakan dan Kewan	929.988.457.000	-	-	929.988.457.000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	4.913.732.780.000	15.259.400.000	400.005.000.000	5.313.737.780.000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	923.431.462.000	-	-	923.431.462.000
9	Badan PPSDM Pertanian	946.911.381.000	-	-	946.911.381.000
10	Badan Karantina Indonesia (BA127)	33.346.902.000	-	-	33.346.902.000
			Total Realokasi (+)	415.264.400.000	

5. Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018) ke Anggaran Badan Karantina Indonesia (BA 127)

Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2023 menetapkan perubahan nomenklatur Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia, yang kini menjadi lembaga independen di bawah Presiden. Perubahan ini berdampak pada realokasi anggaran dari Bagian Anggaran 018 (BA-018) Kementerian Pertanian ke Bagian Anggaran 127 (BA-127) Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan dan arahan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian merealokasi anggaran 2024 sebesar Rp1,19 triliun, terdiri dari Rp951,92 miliar untuk anggaran eksisting Badan Karantina Pertanian dan Rp241,67 miliar untuk tunjangan kinerja SDM. Perpindahan anggaran ini selesai pada 12 Januari 2024 dengan terbitnya DIPA baru. Sisa anggaran Rp33,34 miliar yang masih ada di Kementerian Pertanian dialokasikan untuk gaji ASN Badan Karantina Indonesia periode Januari–Februari 2024.

6. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Pompanisasi mendukung Peningkatan Produksi Padi 2024

Merujuk kepada hasil koordinasi dengan PUPR tersebut ditetapkan bahwa dari total luas Lahan Baku Sawah seluas 7.463.948 Ha, hasil identifikasi dan inventarisasi lapangan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) terdapat areal sawah tadah hujan seluas 3.055.487 Ha, dari luasan tersebut yang berpotensi dioptimalkan melalui dukungan pompanisasi seluas 2.154.291 Ha, dengan luas yang sudah terlayani pompanisasi seluas 208.244 Ha, sehingga masih terdapat potensi lahan seluas 1.946.047 Ha. Berdasarkan potensi lahan tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan refocusing anggaran untuk Pompanisasi yang telah disetujui oleh DJA dengan rincian sebagaimana tabel 7.





Tabel 7. Rincian Intervensi Refocusing Pompanisasi

Kegiatan	Jumlah Unit	Luas Layanan (Ha)
Refocusing 1		6.250
- Pompa Air	1.250	6.250
Refocusing 2		472.600
- Irigasi Perpompaan	3.634	72.680
- Pompa Air	19.696	393.920
- Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim	300	6.000
Refocusing 3		100.605
- Irigasi Perpompaan	1.754	35.080
- Pompa Air Kecil	2.225	11.125
- Pompa Air Sedang	2.600	52.000
- Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	120	2.400
Total Intervensi Refocusing		579.455

Dengan intervensi refocusing yang telah dilakukan, maka masih terdapat potensi sawah tadah hujan yang masih dapat dioptimalkan guna penambahan areal tanam. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten serta Dinas yang membidangi Pengairan Provinsi Kabupaten berupaya melakukan langkah cepat untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi sawah tadah hujan yang masih berpotensi dalam peningkatan produksi padi tahun 2024 dengan memanfaatkan potensi air yang masih ada melalui pompanisasi dan pemanfaatan sumber air lainnya. Sehubungan dengan kondisi sebagaimana dijelaskan diatas, dari hasil identifikasi dan verifikasi bersama, Kementerian Pertanian mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2024 dengan luas potensi sawah tadah hujan yang akan diintervensi sebesar 1.136.404 Ha dengan usulan anggaran sebesar Rp5,8 triliun.

Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pompanisasi peningkatan produksi padi TA 2024 telah diajukan oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: B-80/RC.110/M/05/2024 tanggal 6 Mei 2024, disertai dokumen pendukung sesuai ketentuan Pasal 118 Ayat (2) PMK Nomor 62 Tahun 2023. Penelaahan usulan penggunaan BA BUN Belanja Lainnya dilakukan dalam rapat online pada 15 Mei 2024, melibatkan Direktorat Anggaran dari berbagai bidang, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), serta Kementerian Pertanian (Biro Perencanaan, Ditjen PSP, dan BPPSDMP).

Hasil penelaahan tersebut dituangkan dalam BAP Nomor BAP-24/AG.312/2024 dan dikukuhkan melalui surat Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BUN a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-227/AG/AG.5/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Permintaan Dokumen Pendukung Usul Penerbitan SP SABA dari BA BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Tambahan Anggaran Pompanisasi Peningkatan Produksi Padi TA 2024, disampaikan rekapitulasi persetujuan Menteri Keuangan berupa pergeseran dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA Kementerian





Pertanian (BA 018) sebesar **Rp1.742.369.900.000**, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Rekapitulasi persetujuan Menteri Keuangan berupa pergeseran dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA Kementerian Pertanian (BA 018)

(dalam ribu Rupiah)

NO	URAIAN	USULAN KEMENTERIAN PERTANIAN	PERSETUJUAN MENKEU
1	Fasilitasi bantuan untuk pompanisasi pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	4.347.356.750	1.742.369.900
2	Fasilitasi bantuan untuk alsintan olah tanah pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.147.467.250	0
3	Pengawasan dan pendampingan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	306.287.000	0
	JUMLAH	5.801.111.000	1.742.369.900

Pasca penyampaian dokumen pendukung SP SABA, sesuai surat Inspektur Jenceral Nomor : B-1897/RC.110/G/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 hal Penyampaian Dokumen Pendukung Usul Penerbitan SP SABA dari BA BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Tambahan Anggaran Pompanisasi Peningkatan Produksi Padi TA 2024, telah terbit Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Tambahan Anggaran Pompanisasi Peningkatan Produksi Padi TA 2024 sesuai surat Dirjen Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor : S-113/MK.2/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan rincian:

Tabel 9. Tambahan Anggaran Pompanisasi Peningkatan Produksi Padi TA 2024

Kode	KL/UO/Program/RO	Jumlah Pagu / Volume RO	Dana Blokir
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.742.369.900.000	
018.08	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.742.369.900.000	
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.742.369.900.000	

7. *Refocusing* Anggaran Penggunaan Anggaran Upaya Khusus Peningkatan Poduksi Padi dan Jagung dari Optimasi Lahan (Oplah) untuk Pemenuhan Kebutuhan Benih Padi dan Sarana Pendukungnya

Kementerian Pertanian terus berupaya menjaga ketahanan pangan di tengah krisis pangan global dan perubahan iklim ekstrem dengan berbagai langkah strategis, termasuk *refocusing* anggaran TA 2024. Salah satu kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan optimasi lahan rawa mineral seluas 400.000 ha yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya akibat permasalahan di daerah.

Sebagai solusi, Kementerian Pertanian melakukan *refocusing* anggaran untuk mendukung kebutuhan mendesak, seperti penyediaan benih padi, saprodi benih padi, alat dan mesin pertanian prapanen dan pascapanen, serta program strategis lainnya, termasuk optimasi lahan untuk penanganan bencana di Sumatera Barat, monitoring PAT,





revisi pupuk bersubsidi, asuransi usaha tani padi (AUTP), fasilitasi kredit usaha alat dan mesin pertanian (KUA), serta monitoring dan evaluasi. Sumber anggaran refocusing berasal dari: (1) Optimasi lahan rawa mineral 40.000 ha; (2) Sisa anggaran pengadaan benih reguler; dan (3) Optimalisasi alat dan mesin pertanian prapanen

Usulan refocusing telah diajukan melalui surat Menteri Pertanian Nomor B-115/RC.110/M/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan disetujui melalui Surat Persetujuan Nomor B-116/RC.110/M/07/2024 pada tanggal yang sama. Penelaahan bersama dilakukan pada 17 Juli 2024 dengan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan, serta Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas. Usulan refocusing secara umum disetujui dengan perbaikan pada beberapa data/dokumen pendukung, dan DIPA revisi diterbitkan pada 19 Juli 2024.

Tabel 10. Rincian Kegiatan Refocusing/Realokasi Anggaran Pompanisasi Untuk Peningkatan Luas Tanam TA 2024

NO	ESELON I	PAGU SEMULA (Rp)	REALOKASI (Rp)		PAGU MENJADI (Rp)
			INTERNAL	EKSTERNAL	
	TOTAL	15.517.449.694.000	157.532.027.000		15.517.449.694.000
1	Sekretariat Jenderal	1.266.153.412.000	-	-	1.266.153.412.000
2	Inspektorat Jenderal	124.237.528.000	-	-	124.237.528.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	2.882.298.354.000	81.246.920.000	326.150.153.000	3.208.448.507.000
4	Ditjen Hortikultura	432.638.721.000	-	-	432.638.721.000
5	Ditjen Perkebunan	712.691.049.000	-	-	712.691.049.000
6	Ditjen Peternakan dan Kewan	957.035.379.000	-	-	957.035.379.000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	7.056.107.680.000	76.285.107.000	(326.150.153.000)	6.729.957.527.000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	924.171.799.000	-	-	924.171.799.000
9	Badan PPSDM Pertanian	1.128.768.870.000	-	-	1.128.768.870.000
10	Badan Karantina Indonesia (BA127)	33.346.902.000	-	-	33.346.902.000
			Total Realokasi (+)	483.682.180.000	

8. Refocusing Anggaran (Pemanfaatan Belanja Pegawai Operasional 001 dan Optimalisasi Sisa Kontrak TA 2024)

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, serta untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sampai dengan akhir tahun 2024, masih dibutuhkan tambahan benih dan sarana pendukungnya yang diusulkan pemenuhannya sebesar Rp151.430.120.000,00 melalui optimalisasi sisa kontrak kegiatan sebesar Rp148.430.120.000,00 dan optimalisasi belanja pegawai operasional (001) sebesar Rp3.000.000.000,00. Selain itu, untuk membiayai kegiatan strategis lainnya sebesar Rp77.262.479.000,00 diusulkan untuk dipenuhi melalui optimalisasi belanja pegawai operasional (001) TA 2024.

Kementerian Pertanian mengusulkan revisi refocusing anggaran melalui Surat Menteri Pertanian Nomor B-155/RC.110/M/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, didukung oleh Surat Persetujuan Nomor B-156/RC.110/M/08/2024 dan Surat Pernyataan Nomor B-157/RC.110/M/08/2024 terkait penambahan volume benih padi dan jagung serta alat dan mesin pertanian prapanen.

Usulan revisi diajukan secara mandiri oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dilengkapi dokumen pendukung yang telah direvisi oleh Tim APiP Inspektorat Jenderal. Penelaahan dilakukan dalam dua tahap: (1) Revisi anggaran Belanja Pegawai Operasional (30 Agustus 2024) dan (2) Revisi anggaran optimalisasi sisa kontrak (2 September 2024). Hasil refocusing menghasilkan anggaran sebesar Rp12,13 triliun,





mencakup 80% dari total pagu Kementerian Pertanian TA 2024. Anggaran ini ditujukan untuk peningkatan produksi padi dan jagung, optimasi lahan rawa, serta pompanisasi, sehingga kebutuhan benih pada berbagai jenis lahan dapat terpenuhi hingga Desember 2024. Dengan besarnya refocusing ini, percepatan realisasi anggaran dilakukan untuk menjaga target produksi dan penyaluran bantuan ke petani dengan tetap mengutamakan akuntabilitas, standar operasional prosedur, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

9. Optimalisasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2024

Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produksi pangan dalam negeri guna mewujudkan swasembada pangan, salah satunya melalui program Optimasi Lahan Rawa. Pada tahun 2025, ditargetkan optimalisasi lahan rawa seluas 500 ribu ha, dengan 350 ribu ha sebagai prioritas utama. Untuk mempercepat pelaksanaan program di awal 2025, sebagian kegiatan Survei Investigasi Desain (SID) akan dilakukan pada akhir 2024. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian mengusulkan revisi optimalisasi anggaran TA 2024 guna mendukung pengerjaan SID seluas 100 ribu ha dengan anggaran sebesar Rp26,5 miliar.

Usulan revisi anggaran disampaikan melalui Surat Menteri Pertanian Nomor B-204/RC.110/M/11/2024 (5 November 2024) dan Nomor B-219/RC.110/M/11/2024 (15 November 2024) kepada Menteri Keuangan. Dalam tanggapannya, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-1077/MK.02/2024 (25 November 2024) menyatakan bahwa usulan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut sebagaimana pada tabel 11.

Tabel 11. Usulan Revisi Anggaran per 5 November 2024

NO	UNIT ESELON I / KEGIATAN	KEBUTUHAN		
		VOL.	UNIT COST (Rp)	ANGGARAN (Rp)
TOTAL				26.500.000.000
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian				26.500.000.000
1	Survei Investigasi Desain (SID)	Hektar	100.000	25.000.000.000
2	Operasional Pelaksanaan Kegiatan	Paket	1	1.500.000.000

Proses optimalisasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2024 untuk SID 100.000 Optimasi Lahan Rawa TA 2025 telah terlaksana dengan terbitnya DIPA Revisi Kementerian Pertanian pada tanggal 4 Desember 2024. Selanjutnya, berdasarkan timeline pelaksanaan kegiatan dan anggaran TA 2024 yang sudah mendekati akhir TA 2024, diharapkan agar Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku pelaksana kegiatan dapat melakukan akselerasi percepatan pelaksanaannya di lapangan, serta melaporkan progres pelaksanaannya secara rutin.

10. Penyesuaian Sumber Pendanaan

Perubahan anggaran Kementerian Pertanian TA 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 juga berdasarkan pada penyesuaian dari sumber-sumber pendanaan non Rupiah Murni (RM) antara lain:

- a. Penyesuaian Anggaran Pemanfaatan PNB sebesar Rp201.252.475.000,00:
 - Penambahan pada Ditjen PKH sebesar Rp12.987.196.000,00;





- Pengurangan pada BSIP sebesar Rp549.945.000,00 akibat penyesuaian target penggunaan sesuai tugas dan fungsi;
 - Penambahan pada BPPSDMP sebesar Rp185.829.033.000,00; dan Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.986.191.000,00.
- b. Tambahan Anggaran SBSN berupa luncheon proyek pembangunan laboratorium pada Ditjen PKH (Satker BPSMPH Bekasi) sebesar Rp22.138.606.000,00.
- c. Penyesuaian Anggaran PHLN sebesar Rp74.148.005.000,00:
- Penambahan pada Ditjen Perkebunan sebesar Rp3.138.360.000,00;
 - Penambahan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Rp10.972.344.000,00;
 - Penambahan pada BPPSDMP sebesar Rp56.232.981.000,00; dan
 - Penambahan pada Sekretariat Jenderal karena adanya Persetujuan pemanfaatan sisa dana Program CF-SKR melalui Surat Chief Representative JICA Indonesia Office Nomor 013/PRJ/04/2024 tanggal 04 April 2024 hal Utilization of the CF-SKR pada Sekretariat Jenderal (Biro Kerjasama Luar Negeri) sebesar Rp443.832.000,00, dan sumber lainnya Rp524.330.000,00.
- d. Tambahan Anggaran BLU sebesar Rp37.786.042.000,00 pada Ditjen PKH.

11. Pengembalian Blokir Anggaran *Automatic Adjustment* TA 2024 dan Perlakuan Blokir Terhadap Kinerja Realisasi Anggaran TA 2024

Dalam rangka peningkatan kinerja realisasi serapan anggaran Kementerian Pertanian TA 2024, Kementerian Pertanian melakukan pengusulan pengembalian anggaran blokir *automatic adjustment* sebesar Rp421.829.409.000,00; dan blokir/penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp52.915.964.000,00. Kedua blokir ini merupakan blokir yang berasal dari kebijakan pemerintah c.q. Kementerian Keuangan sesuai arahan Presiden dan berlaku umum untuk semua K/L.

Usulan pengembalian blokir telah disampaikan sesuai dengan surat Menteri Pertanian Nomor B-261/RC.110/M/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 hal Pengembalian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Belanja Lainnya (999.08) TA 2024. Terhadap surat tersebut, Kementerian Keuangan melalui surat Plh. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor : S-2/AG/AG.3/2025 tanggal 2 Januari 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Usul pengembalian anggaran Kementerian Pertanian (BA 018) ke BA BUN TA 2024 terkait sisa anggaran blokir *automatic adjustment*, dan blokir perjalanan dinas, dapat diproses lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta sisa waktu yang tersedia di TA 2024 tidak memungkinkan untuk pelaksanaan proses administrasi pengembalian anggaran dari BA K/L ke BA BUN;
- b. Berdasarkan hal tersebut pada angka 1, maka sisa anggaran blokir *automatic adjustment*, dan blokir perjalanan dinas tetap menjadi bagian dari pagu BA Kementerian Pertanian TA 2024.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2024

Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2024 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Lingkup Kementerian Pertanian, dalam rangka evaluasi kinerja organisasi lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan kategori capaian kinerja melalui metode scoring dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Berhasil : untuk capaian kinerja lebih besar dari 100%.
2. Berhasil : untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%.
3. Cukup Berhasil : untuk capaian kinerja antara 60% sampai dengan kurang dari 80%.
4. Kurang Berhasil : untuk capaian kinerja kurang dari 60%.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. *Lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon I harus menggunakan *lag indicator*. Pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian Tahun 2023, seluruh indikator kinerja merupakan *lag indicator*.

Capaian kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya menampilkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga dilakukan evaluasi dan analisis perbandingan pencapaian kinerja tahun 2024 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga





diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2024. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2024 memiliki 4 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 13 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui jenis target atau polarisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Polarisasi 13 Indikator Kinerja berupa polarisasi maximize target. Maximize target adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Capaian Indikator Kerja Utama adalah perbandingan antara realisasi IKU dengan target yang diakui dari setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Polarisasi *Maximize* target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120
2. Angka minimum adalah 0

Penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat.

Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2024 selengkapny disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 3, dapat dikatakan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2023. Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran strategis, 12 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan 1 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (3) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (5) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (6) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (7) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian; (8) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (9) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (10) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; dan (11) Nilai Reformasi Birokrasi kementerian Pertanian; dan (12) Nilai IKPA Kementerian Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: Tingkat Pemenuhan





Prasarana Pertanian. Capaian indikator kinerja sasaran strategi Kementerian Pertanian tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	KATEGORI	
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	1,33	1,38	103,76	Sangat Berhasil
		2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	%	91,94	92,53	100,64	Sangat Berhasil
		3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	89,87	92,22	102,61	Sangat Berhasil
		4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,5	80,62	100,15	Sangat Berhasil
		5	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	54,47	53,41	98,05	Berhasil
		6	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	94,62	96,68	102,18	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	7	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	91,19	93,07	102,06	Sangat Berhasil
		8	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	6,53	15,44	120,00	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	9	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	90	97,50	108,33	Sangat Berhasil
		10	Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan Teknologi	%	22	22,06	100,27	Sangat Berhasil
		11	Persentase Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	90	90,24	100,27	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	12	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	nilai	84,76	84,80	100,05	Sangat Berhasil
		13	Nilai IKPA Kementerian Pertanian	nilai	89,5	89,51	100,01	Sangat Berhasil







SASARAN STRATEGIS 1 (SS 1)

Meningkatnya Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan pertimbangan pentingnya kebutuhan akan pangan tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, untuk memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

Kementerian Pertanian telah menetapkan beberapa indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (asal hewan); (3) Persentase serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim yang ditangani (4) Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis; (5) Tingkat pemenuhan prasarana pertanian; dan (6) Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian.





SS 1. IKU 1	
Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	
Target 1,33%	Realisasi 1,38%
% Capaian 103,76% Sangat Berhasil	

Kementerian Pertanian telah menetapkan tiga kelompok komoditas pangan strategis yang terdiri dari 14 komoditas, yaitu kelompok komoditas tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), produk peternakan berupa daging (daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging ayam, daging babi, daging itik), susu, dan telur.

Target kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri tahun 2024 diharapkan naik sebesar 1,33%. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana pada Tabel 4 diperoleh hasil sebesar 1,38%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis peningkatan ketersediaan pangan strategis ini sebesar 103,71%.

Rumus perhitungan rata-rata peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri (%) dihitung dengan:

$$\frac{\sum \text{Peningkatan produksi kelompok komoditas pangan strategis nasional}}{\sum \text{komoditas kelompok komoditas pangan strategis nasional}}$$

Dimana rumus perhitungan peningkatan produksi pangan strategis nasional (%) sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Produksi pangan strategis nasional } (t) - \text{produksi pangan strategis nasional } (t - 1)}{\text{Produksi pangan strategis nasional } (t - 1)} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

Satuan volume produksi pangan strategis dalam bentuk ton

t : tahun berjalan

t-1: tahun sebelumnya

Metode perhitungan capaian produksi pangan strategis nasional dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengambil data peningkatan produksi dari direktorat Jenderal produksi untuk kelompok komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan produk peternakan.
2. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri.
3. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi pangan strategis nasional.





Rata-rata capaian produksi pangan strategis nasional tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu untuk kelompok komoditas hortikultura dan peternakan. Hasil perhitungan nilai produksi pangan strategis tahun 2024 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis per Subsektor Tahun 2024

No	Produksi per Subsektor	2020	2021	2022	2023	2024	% Peningkatan 2024/2023
1	Tanaman Pangan (ton)	72.138.424	72.561.911	77.105.730	73.186.668	73.621.418	0,46
2	Hortikultura (ton)	4.669.842	4.796.700	5.033.204	5.069.783	5.155.254	1,51
3	Peternakan (Ribu ton)	10.968,46	10.972,22	11.724,76	11.988,27	12.429,39	2,17
Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Dalam Negeri Tahun 2024							1,38

Sumber: BPS, 2024

Keterangan:

*) Data produksi tanaman pangan merupakan Angka Tetap KSA BPS; Produksi hortikultura dan peternakan merupakan Angka Sementara BPS

Berdasarkan tabel 4, maka rata-rata peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri (%) :

$$\frac{0,46\% + 1,51\% + 2,1\%}{3} = 1,38\%$$

Tahun 2024 merupakan periode akhir pelaksanaan Renstra Kementan Jangka Menengah 2020-2024, sehingga jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 5,34%, pencapaian peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri belum memenuhi target yang ditetapkan. Berbagai faktor menyebabkan pencapaian ini lebih rendah dari ekspektasi, di antaranya dampak perubahan iklim seperti El Niño dan La Nina yang mengganggu pola tanam dan panen, wabah penyakit hewan yang menurunkan produktivitas ternak, serta keterbatasan pupuk dan sarana produksi yang menghambat hasil pertanian. Dengan tantangan tersebut, target peningkatan ketersediaan pangan strategis tahun 2024 harus disesuaikan menjadi 1,33%. Perkembangan capaian peningkatan ketersediaan pangan strategis tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Perkembangan capaian peningkatan ketersediaan pangan strategis tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri (%)	2,65	2,42	6,4	1,1	1,38

Sumber: Kementerian Pertanian, 2024





Kementerian Pertanian telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan ketersediaan pangan strategis, termasuk penggunaan single data untuk perencanaan yang lebih akurat, serta penguatan penyuluhan berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan guna mendukung petani. Selain itu, jaminan ketersediaan pangan pada hari besar keagamaan diperkuat melalui optimalisasi logistik benih, pengelolaan irigasi, serta digitalisasi perencanaan dan distribusi pangan. Sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah melalui penguatan infrastruktur pertanian, standarisasi alat dan benih, serta peningkatan pengawasan pangan juga menjadi langkah utama dalam memastikan ketahanan pangan nasional.

Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2024, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Berdasarkan data tahun 2023-2024, produksi tanaman pangan secara keseluruhan mengalami peningkatan 0,46%. Produksi padi mengalami penurunan sebesar 1,55%, dari 53,98 juta ton pada 2023 menjadi 53,14 juta ton pada 2024, sementara produksi jagung meningkat sebesar 2,47%, dari 19,99 juta ton menjadi 20,48 juta ton pada periode yang sama. Produksi komoditas tanaman pangan strategis disajikan pada tabel 15.

Tabel 15. Perkembangan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2019-2023

No	Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024	% Peningkatan 2023/2024
1	Padi (Ton)	54.649.202	54.415.294	54.748.977	53.980.993	53.142.727	-1,55
2	Jagung (Ton)	17.489.222	18.146.617	22.356.753	19.985.653	20.478.691	2,47
	Total	72.138.424	72.561.911	77.105.730	73.966.646	73.621.418	0,46

Sumber: Angka Tetap BPS 2020-2024

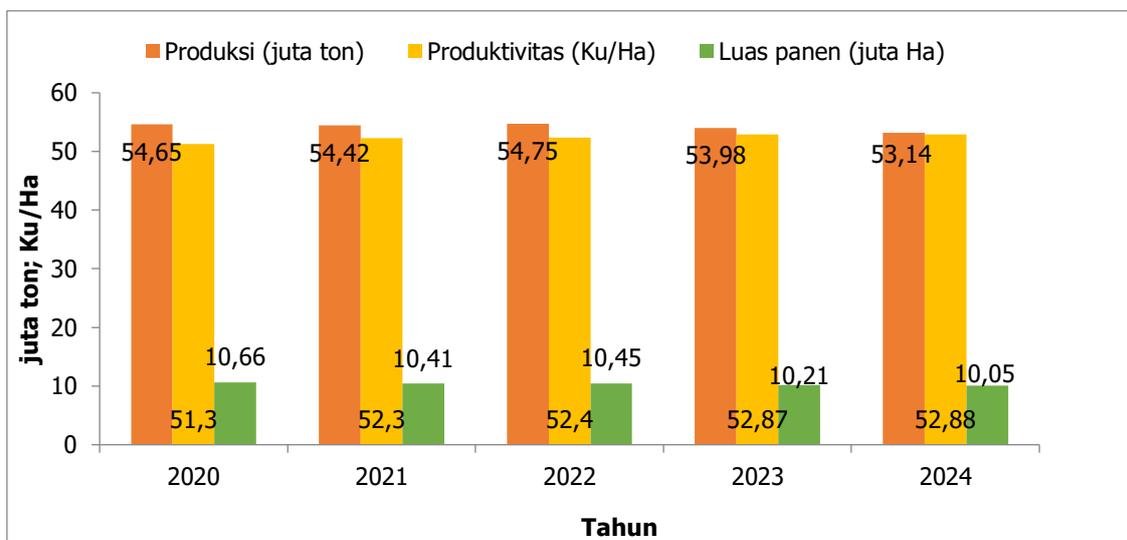
a. Padi

Berdasarkan angka tetap KSA BPS per tanggal 3 Februari 2025, produksi padi tahun 2024 adalah 53,14 juta ton GKG. Produksi padi tahun 2023 ini mengalami penurunan 1,55% dari produksi Tahun 2023 yaitu sebesar 53,98 juta ton GKG. Perkembangan produksi dan luas panen padi selama lima tahun terakhir (2020- 2024) menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun. Perkembangan produksi dan luas panen padi selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun. Penurunan luas panen dan produksi padi terjadi tahun 2020 dan 2021, dimana pada tahun 2022 terjadi peningkatan namun kembali menurun di tahun 2023 dan 2024 dengan rata-rata penurunan dalam 5 tahun terakhir untuk luas panen sebesar 1,46% dan produksi sebesar 0,69%. Meskipun dari sisi produksi dan luas panen





mengalami penurunan, namun produktivitas padi selama lima tahun terakhir menunjukkan positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,78%. Perkembangan peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi padi dari tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2020-2024

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari hingga Desember 2024 setara dengan 30,62 juta ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 480,04 ribu ton (1,54 persen) dibandingkan 2023 sebesar 31,10 juta ton.

Berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita per provinsi hasil Susenas Maret 2021 dan proyeksi penduduk 2021 (Supas 2015), konsumsi beras nasional tahun 2024 adalah 30,91 juta ton. Hal ini menyebabkan defisit sebesar 29 ribu ton, yang menunjukkan bahwa produksi dalam negeri belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan nasional. Defisit ini sejalan dengan impor beras yang mencapai 4 juta ton akibat penurunan produksi domestik, yang dipicu oleh penundaan tanam dan panen akibat cuaca kering berkepanjangan. Ketidakseimbangan produksi dan konsumsi ini dapat memengaruhi stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif, seperti peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi pangan, dan pengelolaan stok cadangan beras nasional guna mengurangi ketergantungan pada impor serta menjaga ketersediaan pangan dalam negeri.

Faktor pendukung produksi padi untuk pemenuhan konsumsi antara lain percepatan tanam, peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas, perluasan areal tanam, penggunaan benih bermutu, penggunaan pupuk berimbang, pengendalian OPT, pengamanan DPI, peningkatan mutu hasil tanaman pangan, dukungan alsintan pasca panen dan pengolahan, peningkatan kemitraan petani dengan offtaker baik untuk dukungan pembiayaan seperti KUR, sarana dan produksi pertanian, bimbingan teknis,





asuransi dan kerjasama dalam hal pemasaran hasil pertanian. Penurunan produksi padi pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain:

- 1) Dampak fenomena El-Nino yang masih berlangsung hingga awal tahun 2024 mengakibatkan kurangnya ketersediaan air untuk menanam. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan luas panen. Kurangnya air juga diduga berpengaruh pada penyerapan hara oleh tanaman sehingga dimungkinkan terjadinya penurunan produktivitas dan pada akhirnya berdampak pada produksi padi.
- 2) Adanya dampak perubahan iklim sehingga mengakibatkan perubahan pola hujan. Hal ini berpengaruh pada ketidakpastian musim tanam akibatnya petani sulit menentukan waktu tanam yang optimal.
- 3) Rendahnya penggunaan benih padi unggul/bermutu termasuk benih padi biofortifikasi.

Upaya perbaikan atas permasalahan tersebut, antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam optimalisasi pemanfaatan pompanisasi pada sawah-sawah yang masih tersedia sumber air, namun terancam kekeringan seperti sawah tadah hujan.
- 2) Melakukan antisipasi perubahan iklim dengan melakukan percepatan tanam pada daerah-daerah yang tersedia sumber airnya.
- 3) Membuat perencanaan yang tepat terkait kebutuhan benih yang tahan/toleran terhadap perubahan iklim.
- 4) Meningkatkan sosialisasi penggunaan benih bermutu melalui peran penyuluh pertanian.

Kegiatan utama mendukung upaya peningkatan produksi padi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Kawasan Padi

Kegiatan kawasan padi Tahun 2024 mencakup berbagai kegiatan padi di sejumlah provinsi yang menunjukkan pencapaian mendekati target. Kegiatan padi reprioritasi di 16 provinsi mencapai 103.115 ha (99,44% dari target); Oplah padi di 8 provinsi terealisasi seluas 178.932 ha (99,18%); ABT oplah padi di 21 provinsi mencapai 536.950 ha (99,21%); Optimalisasi padi di 5 provinsi mencapai 34.549 ha (99,85%) dan; Padi kaya gizi (biofortifikasi) di 32 provinsi tercapai 180.514 ha (90,26%).



Gambar 4. Kegiatan Bantuan Padi Biofortifikasi Tahun 2024





2) Bantuan Benih Padi

Bantuan benih padi inbrida menunjukkan realisasi tinggi di berbagai provinsi. Di 21 provinsi, realisasinya mencapai 657.845 ha (99,65% dari target), sementara program reprioritas di 19 provinsi bahkan melampaui target dengan capaian 578.709 ha (101,53%). Program olah dan pompanisasi di 27 provinsi mencapai 727.152 ha (100,77%), sedangkan optimalisasi di lima provinsi terealisasi 35.144 ha (101,49%). Namun, program ekstensifikasi di Kalimantan Tengah baru mencapai 448 ha (18,82% dari target 2.380 ha), sementara bantuan benih padi inbrida (MP FE) di provinsi tersebut telah 100% terealisasi pada 11.500 ha.

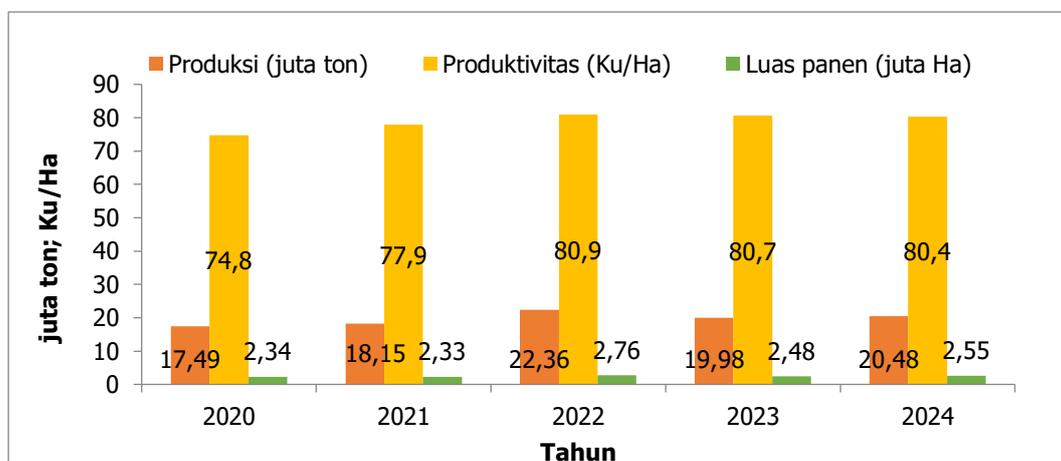
Selain bantuan langsung, program penangkaran benih padi oleh produsen bersertifikat di 32 provinsi menghasilkan 212.474,54 ton benih dari luas 70.824,85 ha, meskipun hanya 167.556,33 ton (78,86%) yang lolos uji laboratorium. Secara keseluruhan, bantuan benih padi inbrida berkontribusi 19,32% terhadap penyediaan benih dari total realisasi tanam padi nasional yang mencapai 10.406.190 ha menurut data KSA BPS.

3) Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Padi Inbrida

Kegiatan MANTAP Padi Inbrida bertujuan meningkatkan produksi benih insitu dengan melibatkan petani penangkar dan berbagai pihak. Total alokasi mencapai 6.366 ha, terdiri dari 5.766 ha di 24 provinsi pada satker Pusat, dengan realisasi 4.910 ha (85,13%), serta 600 ha di 18 provinsi pada satker TP yang telah terealisasi 100%. Dengan realisasi tanam 4.151 ha dan provitas rata-rata 4 ton/ha, kegiatan ini diperkirakan menghasilkan 16.606 ton benih padi inbrida.

b. Jagung

Produksi jagung pada tahun 2024 (dengan kadar air 28%) mencapai 20,48 juta ton yang dihitung berdasarkan KSA BPS. Produksi tahun 2024 mengalami peningkatan 2,47% terhadap produksi 2023. Gambar 5 memperlihatkan bahwa produksi, produktivitas dan luas panen jagung mengalami fluktuasi selama 2020-2024.



Gambar 5. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2020-2024





Perkembangan produksi jagung tahun 2020-2024 menunjukkan terjadi fluktuasi baik pada luas panen, produktivitas, maupun produksi. Luas panen dan produksi mengalami peningkatan pada tahun 2022, kemudian menurun pada tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024. Meskipun terjadi fluktuasi, luas panen, produksi dan produktivitas jagung tetap menunjukkan tren yang positif dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan luas panen sebesar 2,71%, produktivitas sebesar 1,83% dan produksi sebesar 4,71%. Kontribusi bantuan pemerintah terhadap peningkatan produksi jagung tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Kontribusi Bantuan Pemerintah Ditjen Tanaman Pangan Terhadap Produksi Jagung Nasional Tahun 2024

Uraian	Satuan	Fisik
Total Realisasi Banpem Kegiatan Budidaya Jagung Ditjen Tanaman Pangan	(ha)	1.105.803
Realisasi Banpem Kegiatan Budidaya Jagung Direktorat Serealia	(ha)	203.923
Realisasi Banpem Kegiatan Jagung Reprioritasi Direktorat Serealia	(ha)	148.079
Realisasi Banpem Kegiatan Jagung Optimalisasi Direktorat Serealia	(ha)	55.844
Realisasi Banpem Bantuan Benih Jagung Direktorat Perbenihan	(ha)	901.880
Realisasi Banpem Bantuan Benih Jagung Hibrida Reguler Direktorat Perbenihan	(ha)	196.466
Realisasi Banpem Bantuan Benih Jagung Hibrida Reprioritasi Direktorat Perbenihan	(ha)	490.477
Realisasi Banpem Bantuan Benih Jagung Hibrida Optimalisasi Direktorat Perbenihan	(ha)	114.437
Realisasi Banpem Bantuan Benih Jagung Hibrida Direktorat Perbenihan (TP Provinsi)	(ha)	100.500
Total Luas Tanam Banpem Kegiatan Budidaya Jagung Ditjen Tanaman Pangan	(ha)	901.880
Total Luas Panen Banpem Kegiatan Budidaya Jagung Ditjen Tanaman Pangan	(ha)	870.675
Total Produksi Banpem Kegiatan Budidaya Jagung Ditjen Tanaman Pangan	(ton JPK)	1.665.706
Kontribusi Produksi Jagung Banpem Ditjen Tanaman Pangan thdp Produksi Jagung Nasional 2024	(%)	8,13

Adanya dukungan yang diberikan pemerintah terhadap pencapaian produksi jagung, berkontribusi terhadap jumlah produksi jagung nasional. Total bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada Ditjen Tanaman Pangan untuk tahun 2024 seluas 1,1 juta ha diperkirakan dapat memberikan kontribusi terhadap luas tanam jagung nasional tahun 2024 sebesar 0,90 juta ha. Dari total luas tanam bantuan tersebut diperkirakan memberikan sumbangan sebesar 0,87 juta ha terhadap total luas panen nasional dan 1,65 juta ton GKG terhadap produksi jagung nasional (8,03%).

Beberapa faktor kendala yang ditemui dalam produksi jagung tahun 2024 antara lain:

- 1) Dampak fenomena El-Nino yang masih berlangsung hingga awal tahun 2024 mengakibatkan kurangnya ketersediaan air untuk menanam. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan luas panen. Kurangnya air juga diduga berpengaruh pada penyerapan hara oleh tanaman sehingga dimungkinkan terjadinya penurunan produktivitas dan pada akhirnya berdampak pada produksi padi dan jagung.
- 2) Adanya dampak perubahan iklim sehingga mengakibatkan perubahan pola hujan. Hal ini berpengaruh pada ketidakpastian musim tanam akibatnya petani sulit menentukan waktu tanam yang optimal.





Beberapa upaya perbaikan yang diberikan atas kendala tersebut antara lain:

- 1) Melakukan mobilisasi sarana prasarana pengairan seperti pompanisasi pada sawah-sawah yang tersedia sumber airnya, namun terancam kekeringan.
- 2) Melakukan pendampingan dan pengawalan luas tambah tanam komoditas jagung.

2. Peningkatan Produksi Hortikultura

Peningkatan produksi hortikultura strategis Tahun 2024 adalah sebesar 1,51% dengan total produksi sebesar 5.155.254 juta ton. Komoditas hortikultura strategis meliputi cabai, bawang merah, dan bawang putih. Perkembangan produksi komoditas hortikultura strategis disajikan pada tabel 17.

Tabel 17. Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2020-2024

No	Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024	% Peningkatan 2024/2023
1	Cabai (Ton)	2.772.593	2.747.018	3.020.262	3.061.260	3.029.838	-1,03
2	Bawang Merah (ton)	1.815.445	2.004.590	1.982.360	1.985.233	2.085.973	5,07
3	Bawang Putih (Ton)	81.804	45.092	30.582	39.254	39.443	0,48
	Total	4.669.842	4.796.700	5.033.204	5.085.748	5.155.254	1,51

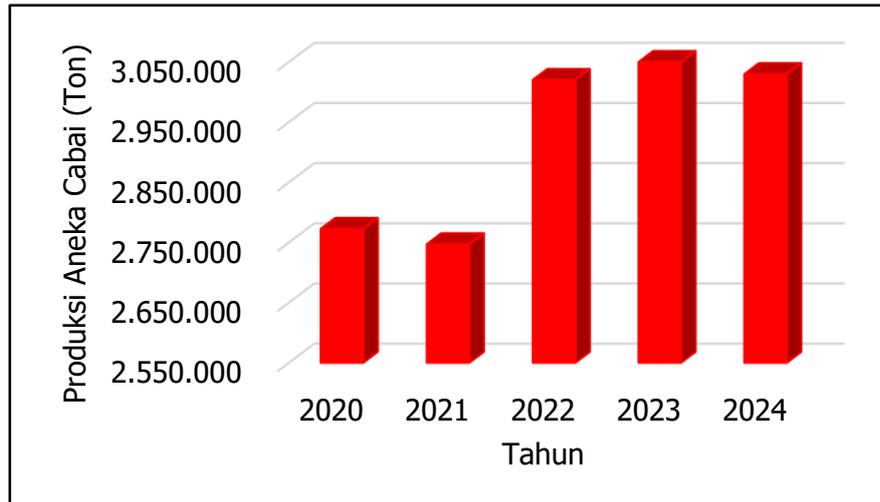
Sumber: Angka Tetap BPS 2020-2023 dan Angka Sementara Hortikultura Tahun 2024 (pelaporan data dari daerah dengan absensi 96,9%)

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa produksi hortikultura pada 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,51% dibanding 2023, terutama didorong oleh kenaikan produksi bawang merah sebesar 5,07% dan bawang putih sebesar 0,48%. Namun, produksi cabai mengalami sedikit penurunan sebesar 1,03%. Meskipun ada fluktuasi pada beberapa komoditas, tren produksi hortikultura secara keseluruhan tetap menunjukkan pertumbuhan positif pada 2024.

a. Cabai

Produksi cabai pada tahun 2024 sebesar 3,03 juta ton turun 1,03% dibanding produksi tahun 2023 sebesar 3,06 juta ton. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit dan cabai besar dengan rincian untuk komoditas cabai besar mengalami penurunan produksi 5,77% dan cabai rawit mengalami peningkatan sebesar 3,87%. Perkembangan produksi cabai nasional dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 6.





Gambar 6. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2020 – 2024

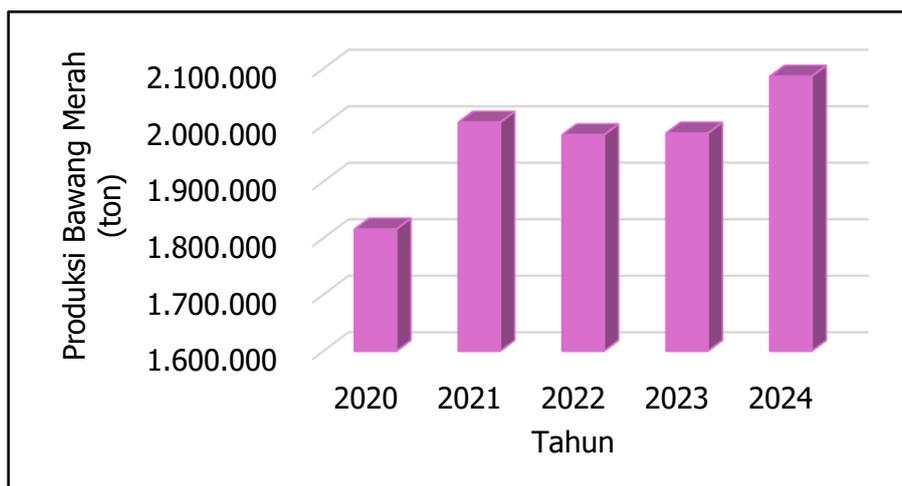
Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dapat mempengaruhi produksi aneka cabai disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Tidak berlanjutnya pengembangan kawasan hortikultura strategis (termasuk cabai) yang lebih luas dalam APBN kewenangan Tugas Pembangunan (TP) TA 2024 pada dinas pertanian lokasi sentra, menimbulkan kekhawatiran tersendiri dalam usaha perluasan/pengembangan kampung hortikultura strategis di beberapa daerah.
- 2) Sistem pengairan di kawasan cabai di sebagian daerah sentra mengandalkan air hujan serta ketersediaan sumber air saat musim kemarau tidak mengeluarkan air yang cukup.
- 3) Kondisi pertanaman cabai di lokasi sentra cabai rawit dan cabai keriting mengalami stunting, jika tingginya mencapai 50 cm dapat dipastikan terserang virus kuning, sehingga tidak dapat berproduksi optimal. Kondisi cabai keriting yang stunting disebabkan saat awal menanam, masih terkendala air dan memasuki bulan Januari terkena hujan dengan curah tinggi dan angin badai. Selain itu, penyakit lainnya yang ditemui adalah terserang gejala OPT layu fusarium, dan lalat buah.
- 4) Kurangnya modal menyebabkan sebagian petani bawang dan cabai terkadang meminjam uang terlebih dahulu kepada pengepul atau bandar, khusus untuk bandar yang ada di Pasar Induk (seperti Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ)) yang mensyaratkan bagi yang meminjam harus menjual hasil pertaniannya dengan harga yang mereka tentukan dan biasanya sangat rendah, sehingga dapat mempengaruhi motivasi petani dalam membudidayakan bawang dan cabai.

b. Bawang Merah

Produksi bawang merah pada tahun 2024 sebesar 2,09 juta ton meningkat 5,07% terhadap produksi tahun 2023 sebesar 1,99 juta ton. Perkembangan produksi bawang merah nasional dalam periode 2020-2025 dapat dilihat pada gambar 7.





Gambar 7. Produksi Bawang Merah Tahun 2020 – 2024

Adapun permasalahan yang ditemui, dimana turut mempengaruhi produksi bawang merah tahun 2024 antara lain karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penundaan jadwal tanam di beberapa daerah sentra sebagai akibat perubahan iklim seperti El Nino, kekeringan atau keterlambatan waktu curah hujan. Bencana hidrometeorologi yang meliputi kekeringan ekstrim dan banjir yang melanda daerah sentra bawang merah pada Triwulan I 2024 menimbulkan kekhawatiran terganggunya produksi bawang merah nasional. Banjir yang melanda sentra bawang merah di wilayah Pantai Utara Jawa.
- 2) Penggunaan pestisida yang melebihi dosis (sebagian petani bawang merah di daerah sentra melakukan penyemprotan pestisida untuk pengendalian ulat tersebut paling sedikit 2 hari sekali dan menyebabkan OPT menjadi resisten sehingga penyemprotan tidak lagi efektif dan efisien). Kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri juga sangat rendah sehingga banyak terjadi kasus keracunan pestisida), dan fluktuasi harga bawang merah yang belum stabil.
- 3) Pada saat harga bawang merah tingkat petani di beberapa daerah rendah, menimbulkan kekhawatiran bahwa para petani bawang merah akan beralih ke komoditas lain seperti padi, tebu, melon dan/atau tembakau.
- 4) Hama utama tanaman bawang merah yang dihadapi petani yaitu ulat bawang, ulat grayak, ulat tanah, uret, orong-orong, siput, kutu daun, trips, dan lalat penggorok daun. penyakit utama tanaman bawang merah yaitu anthracnos, layu fusarium, bercak daun, busuk daun, embun bulu, trotol dan busuk leher akar.
- 5) Persemaian bawang merah belum banyak dilakukan karena di beberapa daerah sentra petani bawang merah masih sangat terbatas. Adapun petani bawang merah mereka belum terbiasa menanam bawang merah dengan biji karena selain usia panen yang lama juga beresiko tinggi kegagalan panen.
- 6) Kurangnya modal menyebabkan sebagian petani bawang dan cabai terkadang meminjam uang terlebih dahulu kepada pengepul atau bandar, khusus untuk bandar yang ada di Pasar Induk (seperti Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ)) yang mensyaratkan bagi yang meminjam harus menjual hasil pertaniannya dengan

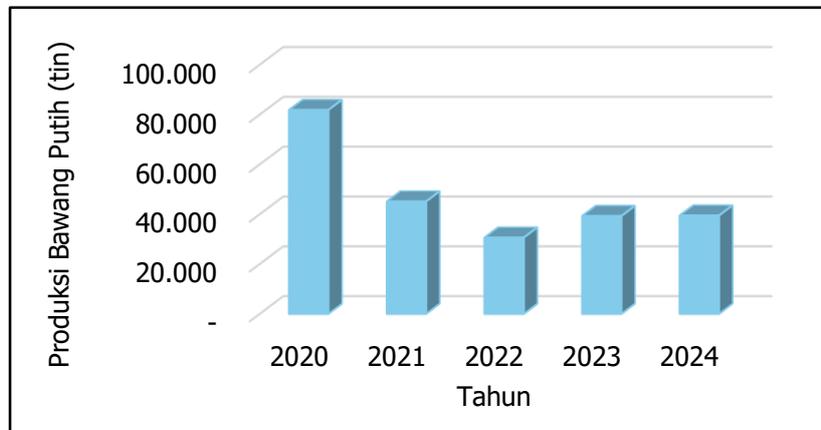




harga yang mereka tentukan dan biasanya sangat rendah, sehingga dapat mempengaruhi motivasi petani dalam membudidayakan bawang dan cabai.

c. Bawang Putih

Capaian kinerja produksi bawang putih tahun 2024 mencapai 39.44 ton atau mengalami peningkatan 0,48% dari produksi tahun 2023 sebesar 39.254 ton. Perkembangan produksi bawang putih tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Perkembangan Produksi Bawang Putih Tahun 2020-2024

Produksi bawang putih nasional mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir setelah pada periode 2020-2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan produksi yang cukup besar dimulai pada tahun 2021 yaitu sebesar 44,88% dibandingkan tahun 2020. Walaupun produksi bawang putih tahun 2024 ini mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam proses pengembangannya seperti:

- 1) Pasar bawang putih selain benih masih terbatas. Mayoritas produksi masih berorientasi pada benih, sedangkan penetrasi ke pasar konsumsi rendah. Konsumsi rumah tangga didominasi produk impor, dan edukasi mengenai bawang putih lokal masih minim.
- 2) Harga pasar yang tidak mampu menjadi stimulus petani untuk menanam tanaman bawang putih kembali. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober – Desember dengan waktu panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar, menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa tidak menarik bagi petani.
- 3) Petani beralih ke tanaman lain yang lebih menguntungkan dan cepat panen, seperti bawang merah, cabai, dan tomat.





- 4) Program wajib tanam bawang putih menghadapi kendala kepatuhan pelaku usaha dalam realisasi tanam, meskipun program ini bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri sebagai syarat penerbitan RIPH. Awalnya, aturan mewajibkan penanaman 25% bagi pelaku usaha baru dan 10% bagi pelaku lama sebelum terbitnya RIPH, yang terbukti meningkatkan produksi pada 2019. Namun, perubahan kebijakan yang mengizinkan wajib tanam setelah RIPH diterbitkan justru menurunkan kepatuhan. Berbagai kendala diidentifikasi, seperti keterlambatan saprodi, kualitas benih rendah, pemasaran sulit, serta keterlambatan pembayaran.
- 5) Penggunaan berlebihan merusak tanah, mencemari lingkungan, dan meningkatkan residu pestisida. Pengendalian OPT ramah lingkungan belum optimal.
- 6) Permasalahan dalam pengadaan benih bawang putih secara swakelola meliputi kurangnya pemahaman pelaksana terhadap juklak, administrasi yang rumit, serta ketidaktertiban dalam dokumentasi pertanggungjawaban, seperti absensi HOK dan foto *open camera*.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

- 1) Pengembangan Kawasan Hortikultura seluas 6.210 ha bawang merah, 3.000 ha cabai, dan 76 ha bawang putih dengan bantuan pemerintah berupa benih, pupuk, mulsa, handsprayer, dan green house sederhana.
- 2) Peningkatan Kapasitas Petani melalui bimbingan teknis (Bimtek) terkait teknologi budidaya, hilirisasi produk, stabilisasi harga, serta pertanian perkotaan dan pekarangan.
- 3) Koordinasi dan Identifikasi Petani & Lokasi dengan menetapkan kelompok tani penerima bantuan dan bekerja sama dengan dinas pertanian setempat untuk mendukung produksi bawang merah, cabai, dan bawang putih.
- 4) Penguatan Perbenihan Hortikultura melalui koordinasi dengan Direktorat Perbenihan dan stakeholder terkait guna mendukung swasembada bawang putih.
- 5) Monitoring dan Evaluasi Produksi dilakukan dengan survei lapang, pemantauan luas tanam dan panen, serta ketersediaan pasokan hortikultura strategis.
- 6) Sistem *Early Warning System* (EWS) melalui laporan bulanan untuk memproyeksikan produksi dan kebutuhan cabai serta bawang merah tiga bulan ke depan.
- 7) Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dengan bekerja sama dengan BMKG untuk memberikan solusi stabilisasi produksi di musim hujan.
- 8) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) menggunakan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan pemantauan dan pengendalian berbasis ekologi.
- 9) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi melalui penerapan *Intelligent Decision Support System* (IDSS) untuk pepaduserasian permintaan pasar dan produksi di lahan kering serta pengembangan aplikasi INA Agro-Garlic untuk penilaian kesesuaian lahan bawang putih.





- 10) Pemetaan dan Identifikasi Lahan Hortikultura dengan melakukan sosialisasi pemetaan lahan bawang putih di Lombok Timur serta identifikasi potensi lahan untuk pengembangan bawang putih di Garut, Jawa Barat.

Melalui bantuan Ditjen Hortikultura dalam mendukung kawasan hortikultura strategis TA 2024 telah memberikan kontribusi produksi sebesar 0,11 juta ton terhadap Produksi Hortikultura Strategis Nasional tahun 2024 sebesar 5,16 juta ton (2,05%). Bantuan Ditjen Hortikultura mendukung kawasan aneka cabai telah memberikan kontribusi 1,08% terhadap produksi aneka cabai nasional, kawasan bawang merah memberikan kontribusi 3,47% terhadap produksi bawang merah nasional, serta kawasan bawang putih memberikan kontribusi 1,43% terhadap produksi bawang putih nasional. Meskipun tergolong kecil, namun menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif, sehingga masih perlu ditingkatkan agar lebih signifikan. Optimalisasi bantuan, perluasan cakupan, serta peningkatan efektivitas implementasi dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kontribusi terhadap produksi hortikultura strategis di masa mendatang.

3. Peningkatan Produksi Peternakan

Produksi peternakan strategis nasional tahun 2024 mencapai 12,43 juta ton, mengalami peningkatan 2,17% dibanding produksi 2023. Komoditas peternakan strategis terdiri dari daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik), susu, dan telur. Perkembangan produksi peternakan strategis disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2020-2024

NO	PRODUKSI	2020	2021	2022	2023	2024	% 2024 - 2023
I	Daging	4,147.17	4,132.40	4,560.60	4,615.41	4,744.76	-0.57
1	Sapi (Ribu Ton)	339.75	365.51	374.43	461.30	478.85	3.80
2	Kerbau (Ribu Ton)	13.88	19.19	16.54	16.16	17.39	7.64
3	Kambing (Ribu Ton)	41.86	40.52	41.22	56.34	57	0.98
4	Domba (Ribu Ton)	37.05	34.67	35.67	48.16	34.59	-28.18
5	Babi (Ribu Ton)	189.55	175.99	102.48	134.99	130.87	-3.05
6	Ayam Buras (Ribu Ton)	270.21	269.80	276.73	143.79	156.45	8.80
7	Ayam Pedaging (Ribu Ton)	3,219.12	3,185.70	3,668.88	3,721.64	3,835.90	3.07
8	Itik (Ribu Ton)	35.75	41.02	44.65	33.03	33.82	2.39
II	Susu (Ribu Ton)	946.91	946.39	824.27	787.37	808.35	2.66
III	Telur (Ribu Ton)	5,874.38	5,893.43	6,339.89	6,585.49	6,876.28	4.42
Rata-rata Peningkatan Produksi Peternakan Tahun 2024							2.17

Sumber: Angka Sementara BPS, 2024





a. Daging

Menindaklanjuti amanat RPJMN 2021-2024 dalam Kegiatan Prioritas Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan, Kementerian Pertanian menetapkan peningkatan produksi daging sebagai salah satu indikator kinerja utama. Produksi daging yang dimaksud meliputi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik.

Pada tahun 2024 total produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) dalam bentuk meatyield tercapai sebesar 4.744,76 ribu ton, meningkat 129,35 ribu ton dibanding tahun 2023. Berdasarkan Tabel xx, dapat dilihat bahwa peningkatan produksi daging tahun 2024 terjadi pada komoditas ternak sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging dan itik, sedangkan penurunan produksi daging terjadi pada komoditas ternak domba dan babi. Peningkatan produksi daging untuk komoditas utama tersebut diiringi juga dengan terpenuhinya populasi ternak untuk komoditas utama yang dikembangkan yaitu sapi potong, kerbau, kambing, domba, ayam, itik dan babi sesuai kebutuhan.

Penurunan produksi daging kambing dan domba di Indonesia disebabkan oleh menurunnya tingkat pemotongan ternak. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan kambing/domba untuk keperluan keagamaan, seperti aqiqah dan Idul Adha. Menurut data pelaporan ASPAQIN (Asosiasi Pengusaha Aqiqah Indonesia), penjualan hewan kurban pada tahun 2024 di berbagai daerah mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2023, terutama kambing dan domba, akibat turunnya daya beli masyarakat. Selain itu, terdapat kecenderungan pemotongan ternak domba untuk kebutuhan keagamaan tidak hanya pada ternak jantan, tetapi juga menyesuaikan dengan permintaan terhadap ternak domba betina, yang berpengaruh terhadap penurunan populasi.

Selanjutnya, penurunan pemotongan dan produksi daging babi disebabkan karena adanya kendala dan permasalahan dalam pengembangan ternak babi antara lain:

- 1) Wabah penyakit *African Swine Fever* (ASF) di beberapa daerah sentra dan tidak tersedianya vaksin ASF di dalam negeri sehingga memerlukan waktu dalam penanganan penyakit.
- 2) Pembatasan lalu lintas ternak babi dan pemberhentian sementara ekspor babi ke beberapa negara konsumen reguler.
- 3) Belum adanya regulasi yang mengatur babi potong bakalan.
- 4) Kurangnya bibit babi berkualitas sehingga produktivitas tidak maksimal.
- 5) Faktor sosial budaya dan lingkungan dalam pengembangan babi

Keberhasilan capaian kinerja peningkatan produksi daging secara nasional pada tahun 2024, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mendukung peningkatan produksi daging. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, diantaranya:





- 1) Optimalisasi Reproduksi selama 2020-2023 telah mampu menambah kelahiran ternak sebanyak 9.108.215 ekor yang berpengaruh terhadap peningkatan populasi ternak di dalam negeri.
- 2) Pada Tahun 2024 terdapat 15 unit usaha peternakan baru, menambah total 53 unit usaha sejak 2020 berkat penguatan kelembagaan dan kemitraan.
- 3) Pengembangan ternak tahun 2024, yaitu pengadaan kambing/domba sebanyak 800 ekor, ayam lokal sebanyak 4.000 ekor dan itik 6.000 ekor.
- 4) Fasilitasi tata niaga ternak dan hasil ternak melalui kapal ternak yang mengangkut 44.300 ekor dengan *loading factor* 87%, meningkat 18% dibanding 2023. Program ini merupakan bagian dari tol laut untuk memperlancar distribusi ternak dari daerah produsen ke konsumen dengan tetap memperhatikan kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
- 5) Fasilitasi Bank Pakan berupa Unit Pengolahan Pakan Ruminansia, Unggas, dan Babi sebanyak 460 unit di 142 kabupaten dan 28 provinsi dengan sumber pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024.
- 6) Fasilitasi layanan kesehatan hewan dengan sumber pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 dengan jumlah lokus penerima 719 Puskesmas di 29 provinsi, 150 kabupaten.
- 7) Fasilitasi renovasi RPHR dan penyediaan peralatan pendukungnya sebanyak 53 unit di 53 kabupaten dan RPHU sebanyak 5 unit di 5 kabupaten melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024.
- 8) Penyediaan Hijauan Pakan Ternak di satker UPT Pusat dengan total 972,3 Ha
- 9) Pengendalian penyakit dan penguatan kelembagaan kesehatan hewan dilakukan melalui peningkatan kapasitas laboratorium veteriner, penguatan Puskesmas dengan penyediaan obat-obatan, serta kompartementalisasi unit usaha peternakan untuk menjamin kesehatan ternak. Sebanyak 519 Tenaga Harian Lepas (THL) direkrut, terdiri dari 243 Dokter Hewan dan 276 Paramedik Veteriner, namun jumlahnya berkurang menjadi 431 orang pada Oktober 2024 akibat penerimaan CPNS dan PPPK.
- 10) Penguatan kelembagaan melalui pengelolaan peternakan berbasis korporasi dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dalam sistem usaha tani berbadan hukum (koperasi/PT), sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 472/2018. Tujuannya adalah mendorong peternakan rakyat menjadi bisnis kolektif yang *feasible*, *bankable*, dan *berdaya saing*. Pada 2024, pengembangan kawasan korporasi dialokasikan di 18 lokasi pada 12 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Hingga September 2024, telah terbentuk 2 Perseroan Terbatas dan 16 koperasi sebagai kelembagaan peternak berbadan hukum.

Upaya yang dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait ketersediaan daging sapi/ kerbau, Kementerian Pertanian terus melakukan terobosan untuk mendukung peningkatan produksi terutama komoditas daging sapi/kerbau, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait.





- 2) Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
- 3) Peningkatan kapasitas petugas dan peternak dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dengan pelaksanaan *refresher* Inseminasi Buatan sapi/kerbau.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi daging kambing/domba:

- 1) Berkolaborasi dengan pelaku usaha dengan melakukan pengembangan model usaha yang terintegrasi dari hulu sampai hilir (*Closed Loop*).
- 2) Koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi peternak kambing/domba untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dan transparan dengan peternak.
- 3) Peningkatan sumber daya manusia peternak dalam penerapan teknologi untuk produksi dan produktivitas ternak kambing/domba melalui pelatihan Inseminasi Buatan kambing/domba.

Upaya Kementerian Pertanian dalam Stabilisasi Perunggasan:

- 1) Mendorong kemitraan peternakan yang saling menguntungkan.
- 2) Mengajak pelaku usaha berinvestasi di industri hilir.
- 3) Meningkatkan skala usaha berbasis bisnis untuk efisiensi dan daya saing.
- 4) Menerapkan jaminan mutu melalui sertifikasi GBP dan GFP.
- 5) Merevisi regulasi (Permentan No. 32/2017 menjadi No. 10/2024) guna menjaga keseimbangan supply-demand.
- 6) Menetapkan alokasi GPS 2024 untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging ayam.
- 7) Mengimbuu pembibit ayam ras mengalokasikan minimal 50% DOC FS bagi peternak mandiri, koperasi, dan lainnya.

Meskipun produksi daging mengalami peningkatan, ketersediaan daging sapi/kerbau di dalam negeri masih belum mencukupi. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan asal ternak. Di sisi lain, subsektor unggas, seperti daging ayam ras, menunjukkan surplus produksi dengan total produksi mencapai 3,8 juta ton, sementara kebutuhan nasional sebesar 3,7 juta ton. Namun, kebutuhan daging sapi masih belum terpenuhi, di mana produksi dalam negeri baru mencapai 0,49 juta ton atau sekitar 64,47% dari total kebutuhan sebesar 0,76 juta ton. Kondisi ini menunjukkan perlunya optimalisasi produksi daging sapi untuk memenuhi permintaan nasional yang diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Upaya terobosan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi terutama komoditas daging sapi, antara lain:

- 1) Mendorong pembiayaan yang bersumber dari non APBN antara lain kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara;
- 2) Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif;
- 3) Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- 4) Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota);

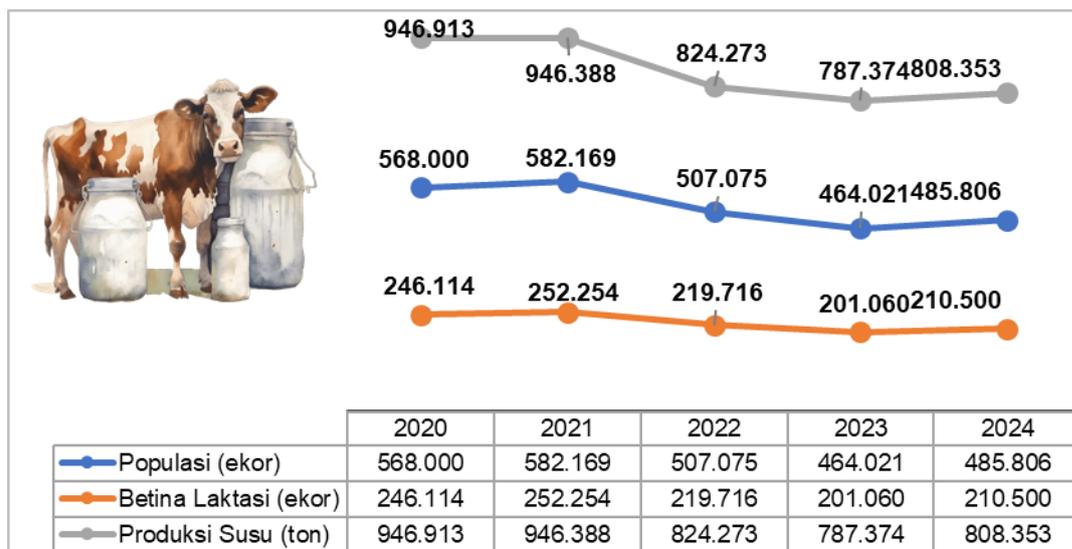




- 5) Penguatan Regulasi melalui Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).

b. Susu

Pada 2024, produksi susu mencapai 808,35 ribu ton, meningkat 2,66% dari 2023 yang sebesar 787,37 ribu ton. Pertumbuhan produksi susu bersifat fluktuatif, dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Pada 2020, produksi naik 0,25% akibat meningkatnya konsumsi selama pandemi Covid-19. Namun, pada 2022-2023, produksi menurun akibat wabah PMK yang menyebabkan kematian dan penurunan produktivitas sapi perah (Gambar 9). Peningkatan produksi susu 2024 didukung oleh populasi 210.501 ekor sapi perah laktasi, naik 4,48% dari 201.060 ekor pada 2023. Meski mengalami peningkatan, jumlah ini masih belum mencukupi kebutuhan susu nasional.



Gambar 9. Produksi Susu Nasional Tahun 2020-2024

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan produksi sapi perah yaitu:

- 1) Pembinaan UPTD dan kelompok peternak dengan penerapan GBP/GFP.
- 2) Penyusunan regulasi pembibitan dan produksi sapi perah.
- 3) Peningkatan kompetensi SDM melalui kerja sama dengan Denmark.
- 4) Dukungan investasi untuk impor sapi perah guna menambah populasi.
- 5) Impor sapi perah 2020-2024 sebanyak 8.026 ekor.
- 6) Produksi benih & bibit unggul (semen beku dan embrio).
- 7) Impor 75.000 dosis semen beku (Jersey: 7.300 dosis, FH: 67.700 dosis) dari AS & Kanada.
- 8) Uji Zuriat Sapi Perah Nasional 2020-2026 yang meliputi kebuntingan PC, kelahiran, dan pemeliharaan DC guna meningkatkan produktivitas sapi perah nasional tahun 2022-2026, dengan angka Kebuntingan: 3.797 ekor dan kelahiran: 2.222 ekor

Kenaikan produksi susu pada tahun 2024 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, produksi tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan





nasional. Untuk mencapai swasembada susu, diperlukan peningkatan produksi sebesar 6% per tahun. Oleh karena itu, berbagai upaya akan dilakukan pada tahun 2025 guna meningkatkan produksi susu, di antaranya:

- 1) Pembinaan UPTD yang menangani perbibitan dan produksi sapi perah.
- 2) Pembinaan kelompok peternak dengan penerapan GBP/GFP.
- 3) Pembuatan regulasi terkait pembibitan dan produksi sapi perah.
- 4) Pemasukan ternak baru dari AS dan Brazil untuk meningkatkan mutu genetik.
- 5) Peningkatan kompetensi SDM melalui kerja sama dengan Denmark (Program SSC) untuk manajemen pemeliharaan dan produksi ternak.
- 6) Dukungan investasi bagi pelaku usaha PMA & PMDN, termasuk:
 - Kemudahan akses lahan dengan status *clear and clean*.
 - Penyediaan infrastruktur (jalan, listrik, fasilitas kesehatan, sekolah, dll).
 - Akses pembiayaan (suku bunga, bea impor, pajak, subsidi, asuransi, dll).

c. Telur

Produksi telur merupakan total dari produksi telur ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh. Produksi telur tahun 2024 sebesar 6,88 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,42% dari tahun sebelumnya. Peningkatan Produksi Telur periode 2020-2024 bervariasi dalam rentang 0,32% - 9,71% (Tabel xx). Produksi telur dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Tahun 2020 permintaan telur meningkat karena telur merupakan sumber protein yang terjangkau sebagai penambah daya tahan tubuh pada saat pandemi Covid-19. Tahun 2021 permintaan telur menurun tetapi tahun 2022 permintaan telur meningkat sehingga produksi Day Old Chick Final Stock (DOC FS) ayam ras meningkat yang berdampak pada peningkatan produksi telur.

Tabel 19. Produksi Telur Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Tahun					%peningkatan 2024/2023
		2020	2021	2022	2023	2024*	
1	Ayam Buras	358,86	368,7	389,27	214,73	236,65	10,21
2	Ayam Ras Petelur	5.141,57	5.156,00	5.579,25	6.116,07	6.342,71	3,71
3	Itik	316,95	313,84	316,17	200,21	236,48	18,12
4	Itik Manila	24,65	24,27	22,02	26,17	27,62	5,54
5	Puyuh	32,35	30,63	33,18	28,3	32,83	16,01
Jumlah		5.874,38	5.893,43	6.339,89	6.585,49	6.876,28	

Kinerja produksi telur selama 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif dalam sektor perunggasan, namun diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Oleh karena itu, Ditjen PKH terus mendorong ekspor telur tetas (*hatching egg*) serta meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, telur sebagai sumber protein hewani yang terjangkau terus dipromosikan untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri. Untuk menjaga stabilitas ketersediaan, Ditjen PKH juga berkoordinasi dengan pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga terkait.





Peningkatan produksi telur sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi. Faktor yang mempengaruhi produksi meliputi perbaikan genetik ayam ras petelur, peningkatan kualitas pakan dengan bahan lokal, serta penerapan teknologi dalam pemeliharaan. Namun, produksi menghadapi tantangan seperti kesulitan bahan baku pakan (jagung), wabah flu burung H5N1 dan *Newcastle Disease*.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi telur adalah:

- 1) Koordinasi dengan stakeholder terkait (peternak rakyat, perusahaan perunggasan layer, asosiasi peternak layer, BPS dan Badan Pangan Nasional).
- 2) Pemantauan pelaporan secara online melalui aplikasi POULTRYNESIA.
- 3) Koordinasi penetapan impor GPS layer dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.
- 4) Koordinasi dengan perangkat daerah dalam mendata peternak layer untuk calon penerima Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
- 5) Melakukan pembinaan teknis sebagai implementasi dari penerapan Good Farming Practices (GFP) baik di perusahaan peternakan dan asosiasi koperasi peternak.
- 6) Pengembangan klaster ayam petelur di luar daerah produksi ayam petelur.
- 7) Pelatihan peternak ayam petelur dalam penerapan peternakan yang baik melalui penerapan biosecurity dalam peternakan dan kandang.
- 8) Pelatihan pada peternak ayam petelur dalam penerapan ayam bebas kandang yang dapat meningkatkan produktivitas.
- 9) Kegiatan penetapan calon penerima Cadangan Jagung Pemerintah melalui skema penyaluran Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP). Kegiatan ini sangat membantu peternak dalam menyediakan bahan baku pakan atau jagung murah pada saat jagung langka atau mahal harganya.





SS 1. IKU 2 Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	
Target 91,94%	Realisasi 92,53%
% Capaian 100,64% Sangat Berhasil	

Pangan merupakan kebutuhan dasar, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak azasi manusia. Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktek-praktek penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sehingga meningkatkan terjadinya potensi kontaminasi atau residu pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Dari aspek kualitas pangan, kualitas yang rendah menyebabkan daya saing produk menjadi berkurang. Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga sampai di tangan konsumen.

Untuk menjamin keamanan pangan maka diperlukan upaya untuk mencegah dan mengendalikan pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan.

Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2024 yang terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar adalah persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (asal hewan). Pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang kaya akan asam amino esensial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan optimal. Disamping itu, pangan asal hewan memiliki nilai dan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, pangan asal hewan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (*perishable food*) dan memiliki potensi bahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan (*hazardous food*) karena mudah tercemar secara fisik, kimiawi, dan biologis sehingga dapat membahayakan keselamatan hidup manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta mengganggu ketenteraman batin masyarakat termasuk kehalalan. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penjaminan terhadap keamanan produk hewan bagi masyarakat.

Rumus perhitungan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan) (%) sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Sampel Produk Pangan Segar Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan}}{\sum \text{Sampel Produk Pangan Segar Asal Hewan}} \times 100\%$$





Jumlah pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah jumlah sampel pangan segar asal hewan jumlah seluruh parameter uji cemaran mikroba dan residu yang menunjukkan hasil di bawah ambang Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM) atau negatif terhadap jumlah sampel keseluruhan berdasarkan penerimaan sampel pasif yang diuji oleh UPT Pusat (Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan). Hal ini dikarenakan pada tahun 2024, tidak dialokasikan anggaran untuk monitoring dan surveilans keamanan produk hewan di UPT. Perhitungan hasil hanya berdasarkan sampel yang dikirimkan oleh unit usaha untuk permintaan pengujian.

Tabel 20. Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan Tahun 2024

Jenis Produk	Memenuhi Syarat (Sesuai Standar)	Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Sesuai Standar)	Jumlah	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)
Daging	18.009	1.591	19.600	$(23.526/25.424) * 100\%$ = 92,53%
Susu	737	153	890	
Telur	4.780	154	4.934	
Jumlah	23.526	1.898	25.424	

Capaian Indikator kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan tahun 2024 sebesar 92,53%. Angka ini didapat dari perhitungan persentase jumlah sampel produk pangan segar asal hewan (daging, susu dan telur) yang memenuhi persyaratan keamanan pangan dibandingkan total sampel produk pangan segar asal hewan. Dari 25.424 total sampel produk pangan segar asal hewan yang diuji oleh laboratorium UPT, terdapat 23.526 sampel produk yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. Sampel tersebut berasal dari unit usaha budidaya unggas petelur, budidaya ternak perah, rumah potong hewan, *cold storage*, kios daging, pengumpulan pengemasan pelabelan telur konsumsi (PPPTK), dan tempat penampungan susu. Data Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan, serta Rincian Sampel per UPT selengkapnya dapat dilihat pada tabel 19.

Target persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah 91,94% di tahun 2024 dengan realisasi 92,53% atau persentase capaian sebesar 100,64%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 meningkat sebesar 0,64%. Tahun 2024 merupakan tahun akhir Renstra 2020-2024, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan telah mencapai target jangka menengah sebesar 100,64%. Capaian indikator Kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2024 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.





Tabel 21. Rincian Target dan Realisasi Sampel Pangan Segar Asal Hewan Per UPT dan Wilayah Kerja Tahun 2024

No	UPT/ Jenis Sampel PSAH	Memenuhi Syarat (Sesuai Standar)	Tidak Memenuhi Syarat (Tidak Sesuai Standar)	Grand Total
1	BBVet Denpasar	3.227	209	3.436
	Daging	3.042	200	3.242
	Susu	55	1	56
	Telur	130	8	138
2	BBVet Maros	2.192	100	2.292
	Daging	1.494	60	1.554
	Telur	698	40	738
3	BBVet Wates	2.098	894	2.992
	Daging	1.633	779	2.412
	Susu	281	71	352
	Telur	184	44	228
4	BPMSPH Bogor	9.452	501	9.953
	Daging	7.849	400	8.249
	Susu	267	77	344
	Telur	1.336	24	1.360
5	BVet Banjarbaru	1.315	31	1.346
	Daging	1.253	31	1.284
	Susu	12	-	12
	Telur	50	-	50
6	BVet Bukittinggi	1.584	7	1.661
	Daging	262	66	328
	Susu	14	-	14
	Telur	1.308	11	1.319
7	BVet Lampung	2.080	30	2.110
	Daging	1.131	7	1.138
	Susu	76	3	79
	Telur	873	20	893
8	BVet Medan	1.287	9	1.296
	Daging	1.138	7	1.145
	Susu	9	1	10
	Telur	140	1	141
9	BVet Subang	169	14	183
	Daging	116	8	124
	Susu	23	-	23
	Telur	30	6	36
10	BVet Jayapura	122	33	155
	Daging	91	33	124
	Telur	31	-	31
Grand Total		23.526	1.898	25.424

Perkembangan capaian indikator persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (asal hewan) selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 22.

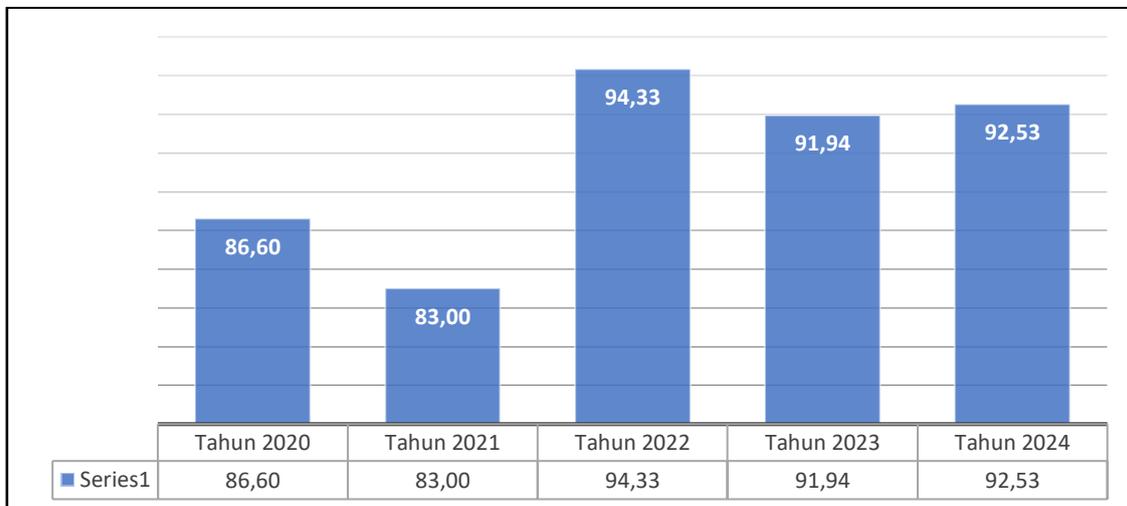




Tabel 22. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2020-2024

Sampel Produk Pangan Segar	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	16.367	16.862	13.560	12.260	23.526
Jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan	18.900	20.316	14.375	13.335	25.424
Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (asal hewan) (%)	86,60	83,00	94,33	91,94	92,53

Dalam rangka penjaminan keamanan pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (asal hewan), maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan, terutama pangan segar asal hewan. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Perkembangan Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2020-2024

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha produk hewan. Pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2024 antara lain: meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada unit usaha produk hewan untuk penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan sehingga produk hewan yang dihasilkan terjamin mutu dan





keamanannya, serta meningkatkan upaya pengawasan kesmavet di provinsi/kabupaten/kota serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.

Selain itu, pada tahun 2024 juga sudah diimplementasikan pengawasan lalu lintas produk hewan dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui aplikasi iSIKHNAS. Lalu lintas produk hewan mempersyaratkan antara lain produk hewan harus berasal dari unit usaha ber-NKV atau dalam pembinaan dan produk hewan memenuhi persyaratan keamanan produk hewan berdasarkan hasil pengujian laboratorium untuk parameter cemaran mikroba dan residu yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran lalu lintas produk hewan tentunya akan mendorong unit usaha untuk melakukan sertifikasi NKV serta memastikan produknya memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat dilalulintaskan.

Adapun upaya-upaya tindak lanjut pada tahun 2025 antara lain:

1. Memfokuskan arah dan rekomendasi pembinaan unit usaha berdasarkan analisis data hasil kegiatan monitoring, surveilans dan pengawasan keamanan produk hewan;
2. Melibatkan pengawas kesmavet dalam kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan sehingga secara efektif melakukan langkah-langkah tindak lanjut perbaikan penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan;
3. Meningkatkan kapasitas laboratorium kesmavet baik di UPT maupun UPTD untuk mendukung pelayanan pengujian keamanan produk hewan;
4. Mengajak keterlibatan *stakeholders* terutama asosiasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan hewani ASUH sekaligus mendorong unit usaha untuk dapat menerapkan sertifikasi NKV, registrasi produk hewan serta meningkatkan peran dan kapasitas laboratorium kesmavet di daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan keamanan produk hewan.
5. Khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terkait dengan penjaminan keamanan produk hewan yang menjadi bahan baku harus menjadi prioritas untuk pembinaan unit usaha dan pengawasan keamanan produk hewannya.





SS 1. IKU 3 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	
Target 89,87%	Realisasi 92,22%
% Capaian 102,61% Sangat Berhasil	

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan diperlukan strategi yang tepat dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Keberadaan OPT di lapangan dan kondisi iklim harus selalu dipantau. Hasil pemantauan/pengamatan lapangan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah-langkah operasional di lapangan.

Realisasi indikator Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani diperoleh dengan cara:

$$\frac{\sum(\text{rasio serangan OPT dan DPI yang ditangani terhadap luas serangan})}{\sum(\text{data rasio serangan OPT dan DPI yang ditangani})}$$

Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani diperoleh dengan cara membandingkan serangan OPT/DPI pada tahun berjalan terhadap luas serangan OPT/DPI tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\frac{(\text{luas terkena} - \text{luas puso serangan OPT atau DPI})}{(\text{luas terkena serangan OPT atau DPI})} \times 100\%$$

Serangan OPT dan DPI yang ditangani merupakan upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis agar tidak terjadi gagal panen pada tanaman pangan dan hortikultura. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 1995). Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam. Luas serangan DPI yang ditangani adalah luas areal pertanaman yang terkena DPI tapi tidak menyebabkan puso (gagal panen), karena adanya tindakan pengendalian baik upaya antisipasi maupun mitigasi. Dengan adanya pengendalian, luas Tanaman yang terserang OPT dan DPI akan mengalami perubahan kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat, sedangkan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso.





Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani tahun 2024:

$$\frac{98,99\% + 76,90\% + 99,69\% + 93,90\%}{4} = 92,37\%$$

erdasarkan hasil perhitungan tersebut maka capaian indikator persentase serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim yang Ditangani adalah 92,22% atau tercapai 102,61% dari target tahun 2024. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target target akhir jangka menengah sebesar 70,40% maka tercapai 130,99%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan telah melampaui target yang ditetapkan baik untuk tahun 2024 maupun target jangka menengah. Rincian persentase serangan OPT/DPI yang ditangani sektor pertanian Tahun 2024 terlihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	89,87	92,22	102,61
	1. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan tanaman pangan	%	99,50	98,99	99,48
	2. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI tanaman pangan	%	60,8	76,90	112,3
	3. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman Hortikultura	%	99,65	99,69	100,04
	4. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI tanaman hortikultura	%	93,05	93,30	100,27

Pencapaian kinerja selama 2020-2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan di 2022, strategi dan kebijakan yang diterapkan terbukti mampu mengembalikan tren positif dan mencapai hasil yang melampaui target jangka menengah. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program





yang dijalankan serta peningkatan kapasitas dalam mengatasi tantangan yang ada. Perkembangan persentase serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim yang ditangani dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24. Perkembangan Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	80,92	88,49	84,25	89,84	92,37

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura yaitu:

1. Perlindungan Tanaman Pangan
a. Pengendalian OPT

Upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis dilakukan terhadap komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, aneka umbi dan aneka kacang sehingga tidak menjadi puso. Dengan adanya pengendalian, luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat. Dan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Rincian serangan OPT untuk komoditas Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan Yang Ditangani (%)
Padi	217.259	2.612	98,80
Jagung	56.288	62	99,89
Kedelai	804	119	85,20
Kacang Tanah	1.046	-	100,00
Kacang Hijau	184	-	100,00
Ubi Kayu	750	9	98,76
Ubi Jalar	69	-	100,00
Total	276.400	2.802	98,99

Dengan demikian dari target 99,05%, terealisasi 98,99% sehingga capaian rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman Pangan adalah 99,48%. Keberhasilan upaya penanganan luas serangan OPT dipengaruhi oleh:

- 1) Kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di lapangan seperti PPHT, Gerdal OPT, bantuan pestisida dan lainnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak, antara lain aparat desa dan pemerintah setempat serta masyarakat sekitar.





- 2) Pelaksanaan pengamatan OPT yang dilakukan secara teratur, rutin dan intensif, serta tindakan pengendalian serangan OPT yang dilakukan sejak dini (pre-emptif) secara masif dapat lebih mengendalikan gangguan OPT di lapangan sehingga dapat menekan kejadian eksplosif serangan OPT dan risiko kerugian hasil.

Meskipun demikian, masih ditemui beberapa kendala dalam upaya penanganan serangan OPT tanaman pangan, antara lain:

- 1) Kendala anggaran seperti blokir, *refocusing*, *self-blocking*, serta pencairan anggaran yang lama menyebabkan keterlambatan kegiatan PPHT, penyiapan CPCL terburu-buru, serta tidak terpenuhinya permintaan bantuan rubuha dari daerah.
- 2) Perlindungan tanaman pangan bergantung pada kondisi alam yang tidak dapat diprediksi sehingga menghambat jadwal pengendalian OPT.
- 3) Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT tertunda akibat tambahan persyaratan SPTJM.

Upaya perbaikan yang diberikan atas kendala tersebut antara lain :

- 1) Mengawal proses administrasi dan koordinasi intensif untuk mempercepat pencairan, memastikan kelengkapan dokumen sejak awal tahun, serta mendorong swadaya petani dan pemerintah desa dalam pembuatan rubuha melalui Germas atau dana desa.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara optimal agar kegiatan tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca.
- 3) Menyampaikan kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun agar tidak terjadi keterlambatan akibat persyaratan tambahan seperti SPTJM.

Pada tahun 2024, upaya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada tanaman padi berhasil menyelamatkan produksi dalam jumlah yang signifikan. Luas terkena serangan OPT yang dapat ditangani mencapai 214.647 ha, dengan persentase produksi yang diselamatkan sebesar 2,14%, setara dengan 1,13 juta ton GKG. Sementara itu, luas puso akibat serangan OPT menyebabkan pengurangan produksi sebesar 0,03% atau sekitar 13.816 ton. Kontribusi penyelamatan OPT terhadap produksi padi nasional tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Kontribusi Penyelamatan OPT Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2024

Uraian	OPT
Provitas (ton/ha)	5,29
Luas Terkena (ha)	217.259
Luas Puso (ha)	2.612
Luas Yang Dapat Ditangani (ha)	214.647
Produksi Yang Diselamatkan (ton)	1.135.454
% Produksi Yang Diselamatkan*	2,14
Pengurangan Produksi Akibat Puso (ton)	13.816
% Pengurangan Produksi Akibat Puso*	0,03

Keterangan: Produksi yang digunakan berdasarkan KSA BPS Angka Tetap per tanggal 3 Februari 2025





Keberhasilan upaya penanganan luas serangan OPT dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penguatan pengendalian OPT:

- 1) Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
Kegiatan PPHT Padi sebanyak 5 unit
- 2) Gerakan Pengendalian OPT
Kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT Serealia terlaksana 25.000 ha yang tersebar di 32 Provinsi. Sedangkan untuk komoditas Aneka Kacang dan Umbi adalah seluas 3.000 ha yang tersebar di 16 Provinsi.



Gambar 11. Kegiatan Gerdal Padi dan Akabi Tahun 2024

- 3) Bantuan Pesticida
Kegiatan bantuan pestisida tahun 2024 adalah seluas 30.000 ha.

b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Dampak Perubahan Iklim (DPI) adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan/variabilitas iklim, antara lain banjir, kekeringan dan bencana alam. Banjir adalah tergenangnya areal pertanaman selama periode pertumbuhan Tanaman dengan ketinggian air dan jangka waktu tertentu, sedangkan kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air pada fase tertentu yang keduanya mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal sehingga berpotensi menurunkan produksi.

Luas terkena DPI yang dapat ditangani adalah luas Tanaman pangan yang terkena DPI tapi tidak menyebabkan puso (gagal panen), karena adanya tindakan pengendalian baik upaya antisipasi dan mitigasi. Luas yang terdampak DPI di periode Okt-Sept 2023/2024 adalah 413.268 ha, dan yang puso seluas 95.477 ha. Sehingga rasio serangan DPI yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman pangan adalah 76,90%. Rincian serangan DPI untuk komoditas Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 27.





Tabel 27. Capaian Luas Terkena DPI yang dapat ditangani untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas	Banjir (Ha)		Kekeringan (Ha)		Total (Ha)		Rasio Serangan DPI yang Ditangani
	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	
Padi	194.456	54.931	167.999	28.678	362.456	83.609	76,93
Jagung	12.096	3.858	37.346	7.804	49.442	11.662	76,41
Kedelai	154	127	146	40	300	167	44,29
Kacang Tanah	8	2	863	4	870	6	99,33
Kacang Hijau	68	20	100	-	168	20	88,12
Ubi Kayu	17	11	14	0	31	11	62,72
Ubi Jalar	3	1	-	-	3	1	54,55
Jumlah	206.801	58.950	206.467	36.527	413.268	95.477	76,90

Luas terkena DPI tanaman padi yang dapat ditangani tahun 2024 seluas 362.456 ha dengan persentase produksi yang diselamatkan sebesar 2,78% sehingga produksi yang dapat diselamatkan dari dampak DPI sebesar 1,47 juta ton. Luas puso DPI tanaman padi menyebabkan pengurangan produksi sebesar 0,83% atau setara dengan 0,44 juta ton. Kontribusi Penanganan DPI Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 28.

Tabel 28. Kontribusi Penanganan DPI Terhadap Produksi Padi Nasional Tahun 2024

Uraian	DPI
Provitas (ton/ha)	5,29
Luas Terkena (ha)	362.456
Luas Puso (ha)	83.609
Luas Yang Dapat Ditangani (ha)	278.846
Produksi Yang Diselamatkan (ton)	1.475.061
% Produksi Yang Diselamatkan*	2,78
Pengurangan Produksi Akibat Puso (ton)	442.281
% Pengurangan Produksi Akibat Puso*	0,83

Keberhasilan penanganan dampak perubahan iklim dipengaruhi oleh:

- 1) Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan di lapangan seperti PPDPI, Gerakan Penanganan DPI, Dem PDPI dan lainnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak, antara lain aparat desa dan pemerintah setempat serta masyarakat sekitar.
- 2) Antisipasi dan Mitigasi DPI dilakukan sejak dini oleh semua pihak terkait, upaya adaptasi dan penanganan DPI dilakukan secara komprehensif, efisien dan efektif.

2. Perlindungan Hortikultura

a. Penanganan Serangan OPT

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2024 adalah sebesar 99,69% dari





target minimal sebesar 99,65% atau capaian kinerjanya sebesar 100,04%. Luas terkena OPT komoditas strategis pada tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023 yaitu seluas 69.405,52 ha, dengan luasan puso 211,88 ha. Penambahan luas terkena terjadi pada komoditas alpukat, buah naga, jagung manis, jahe, jambu biji/kristal, jeruk, kelengkeng, mangga, melon, pisang dan tomat. Sedangkan penambahan luas puso terjadi pada komoditas pisang. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,22%, dimana tahun 2023 rasio yang ditangani sebesar 99,69% sedangkan tahun 2023 sebesar 99,40%. Rincian luas serangan dan luas pengendalian OPT Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan peningkatan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain:

- 1) Mengalokasikan anggaran untuk pengendalian OPT Hortikultura (2500 ha) dan penyediaan sarana perlindungan hortikultura (50 unit), termasuk bahan operasional, pendampingan, serta fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan.
- 2) Melaksanakan mekanisme pelaporan data OPT secara rutin melalui berbagai tingkat, dari POPT di wilayah hingga Direktorat Perlindungan Hortikultura.
- 3) Penyediaan bahan pengendali OPT ramah lingkungan (APH, Trichoderma spp., PGPR) untuk 54 LPHP/UPT yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan UPTD BTPH. Pemanfaatan bahan pengendali OPT ramah lingkungan seperti Agens Pengendali Hayati (APH) maupun bahan pengendali OPT ramah lingkungan lainnya diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan produk hortikultura bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing.
- 4) Pelaksanaan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT di lapangan dengan sosialisasi pengelolaan ramah lingkungan, pencegahan, dan penurunan intensitas serangan pada tanaman sayuran, buah, dan florikultura.



Gambar 12. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024

- 5) Fasilitasi pengendali OPT di area terdampak banjir fasilitasi pengendali OPT bawang merah ramah lingkungan, fasilitasi pengendali OPT lalat buah ramah lingkungan, dan fasilitasi bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP.





- 6) Bimbingan teknis kepada petani/kelompok tani tentang pengendalian OPT, budidaya ramah lingkungan, kebijakan, penggunaan pestisida hayati, dan mitigasi perubahan iklim.
- 7) Survei/verifikasi terhadap CPCL dan Kampung Perlindungan Hortikultura dengan pendampingan dan monitoring.

Beberapa kendala dalam pengendalian OPT hortikultura tahun 2024 antara lain:

- 1) Kesulitan POPT dalam menjadwalkan sosialisasi dan mengubah pola pikir petani terhadap PHT, yang membutuhkan pendekatan personal dan berkelanjutan.
- 2) Banyak petani yang belum memahami manfaat PHT dan cenderung mencari solusi instan untuk pengendalian OPT.
- 3) Penggunaan pestisida oleh petani bawang merah belum selaras dengan prinsip PHT.
- 4) Banyak petani yang belum dapat mengelola Agen Pengendali Hayati (APH).
- 5) Kurangnya pemberdayaan Klinik PHT dalam mendukung perbanyak APH untuk Gerakan Pengendalian OPT.

b. Penanganan DPI

Pada periode Januari-Desember 2024, luas lahan hortikultura yang terdampak DPI (banjir dan kekeringan) tercatat sebesar 4.095,94 ha (terkena) dan 274,24 ha (puso). Rincian lahan terdampak banjir meliputi komoditas sayur seluas 3.288,44 ha (terkena) dan 128,17 ha (puso); buah 495,05 ha (terkena) dan 143,87 ha (puso); serta tanaman obat 2 ha (terkena) dan 2 ha (puso). Sementara itu, pada lahan terdampak kekeringan, komoditas sayur tercatat seluas 310,45 ha (terkena) dan 0,2 ha (puso), sedangkan tidak ada laporan untuk komoditas buah dan tanaman obat. Data terkait kebanjiran dan kekeringan pada komoditas hortikultura untuk periode 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29. Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2023-2024

No.	Kategori	Komoditas	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)
1.	Banjir	Sayur	704,5	76,24	89,18	3.288,44	128,17	96,1
		Buah	64,49	4,64	92,81	495,05	143,87	70,94
		Tan. Obat	2	0	100	2	2	0
2.	Kekeringan	Sayur	193,75	0,5	99,74	310,45	0,2	99,94
		Buah	183	1	99,45			
Total			1.147,74	82,38	92,82	4.095,94	274,24	93,3





Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Pelaporan data DPI dilakukan secara rutin dan konsisten mulai dari petugas POPT hingga Direktorat Perlindungan Hortikultura, dengan laporan dibagi dalam dua periode tiap bulan.
- 2) Surat kewaspadaan terkait prediksi iklim/cuaca dikeluarkan secara rutin berdasarkan data BMKG, digunakan untukantisipasi musim penghujan dan kemarau.
- 3) Aplikasi EWS SIPANTARA menyediakan informasi peringatan dini terkait banjir, kekeringan, OPT, dan jadwal tanam untuk mendukung mitigasi DPI.
- 4) Fasilitasi kegiatan DPI dilakukan dengan menyediakan sarana penanganan kekeringan dan pompa untuk 200 ha, serta mitigasi DPI dengan agens hayati untuk 320 ha.



Gambar 13. Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT tahun 2024

- 5) Pendampingan dan monitoring intensif dilaksanakan di 23 kabupaten untuk memastikan dampak positif kegiatan DPI.
- 6) Fasilitasi pengembangan Klinik PHT diberikan berupa peralatan untuk meningkatkan peran klinik PHT dalam mendukung produk hortikultura yang bermutu.
- 7) Sinergitas dan koordinasi antara UPTD BTPH, POPT, dan petugas pusat untuk penanganan DPI yang lebih efektif.
- 8) Bimbingan teknis (bimtek) dilakukan secara offline dan online untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi DPI dan bencana alam.
- 9) Inventarisasi adaptasi/mitigasi DPI dilakukan dengan melibatkan Direktorat Perlindungan Hortikultura dan BPSI Agroklimat.





SS 1. IKU 4 Presentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target 80,50%	Realisasi 80,62
% Capaian 100,15 (Sangat Berhasil)	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/ atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis, bahwa dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk dan menyebarnya penyakit hewan, perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular. Kementerian Pertanian memprioritaskan Pengendalian Hewan Menular Strategis pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, dan *Hog Cholera* (RABAH). Dengan mewabahnya penyakit *African Swine Fever* (ASF), *Lumpy Skin Disease* (LSD), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Septicaemia Epizootica* (SE), Surra dan Jembrana maka prioritas pengendalian ditambahkan kelima penyakit tersebut.

Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMS khususnya lebih difokuskan pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, *Hog Cholera*, ASF, LSD, serta PMK. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat *zoonosis* atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas.

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah Identifikasi total wilayah yang terkendali dari PHMS (kabupaten/kota) (a) dibagi dengan Identifikasi total wilayah yang terdampak PHMS (kabupaten/kota) (b), dikali 100%, atau dengan rumus:





$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS Tahun 2024 sebesar 80,62% yang diperoleh dari rata-rata angka kesehatan hewan dari 11 (sebelas) PHMS (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD, PMK, Surra, SE, dan Jembrana) di kabupaten/ kota sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 30. Kegiatan Pengendalian Kabupaten/Kota Terhadap 11 Penyakit Hewan Menular Strategis

Penyakit	Kab/Kota Target pengendalian (b) (Kepmentan 311/ 2023)	Kab/Kota Terkendali (a)	Angka Kesehatan Hewan (a/b)
<i>Anthrax</i>	72	69	95,83%
<i>Avian Influenza</i>	170	150	88,24%
<i>Brucellosis</i>	96	88	91,67%
<i>Classic Swine Fever</i>	98	91	92,86%
<i>Rabies</i>	234	180	76,92%
<i>Septicaemia Epizootica</i>	103	67	65,05%
Jembrana	118	94	79,66%
<i>Lumpy Skin Disease</i>	170	110	64,71%
Penyakit Mulut dan Kuku'	356	238	66,85%
<i>Surra</i>	148	123	83,11%
<i>African Swine Fever</i>	144	118	81,94%
Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)			80,62%

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 80,50%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 100,15% atau masuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dimana capaiannya sebesar 80,57% maka capaian tahun 2023 naik sebesar 0,06%. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 80,50% maka realisasi tahun 2024 mencapai 100,15%. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 31.





Tabel 31. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) tahun 2020-2024

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	80,00	80,50	80,50	81,00	80,05	100,15
Realisasi IKSP (%)	80,01	80,74	80,00	80,57	80,62	

Keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari PHMS, diantaranya disebabkan:

1. Program vaksinasi massal *Rabies* dan tertarget dengan cakupan lebih dari 70% populasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan pelaksanaan vaksinasi *Rabies* pada 30 provinsi sebanyak 350.610 dosis tertarget pada wilayah tertular dan perbatasan.
2. Peningkatan implementasi kompartemen bebas *Avian Influenza* dengan melakukan pembinaan pada peternakan unggas terutama di daerah sentra ternak unggas.
3. Penerapan biosekuriti dengan tepat, pemusnahan unggas selektif (depopulasi) di daerah tertular, vaksinasi, pengendalian lalu lintas, surveilans, dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) sebagai strategi pengendalian dan penanggulangan *Avian Influenza*.
4. Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner pada tahun 2024 sebanyak 787 orang yang terdiri dari Dokter Hewan sebanyak 144 orang dan Paramedik Veteriner sebanyak 160 orang.
5. Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - a. Pengendalian Penyakit *Rabies*
Sampai dengan saat ini terdapat 11 dari 38 Provinsi di Indonesia yang berstatus bebas Rabies yaitu wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sedangkan pulau yang telah dibuktikan bebas Rabies yaitu Pulau Lombok (bebas historis), Pulau Pisang, Pulau Meranti, Pulau Weh, Pulau Mentawai, Pulau Enggano (2015), Pulau Tarakan, Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Pulau Tabuan (2018), Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagulandang, Siau, Biaro Kab Kep Sitaro (2019). Pada tahun 2023 dalam proses penetapan status bebas dari Rabies oleh Menteri Pertanian untuk Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan Pulau Weh Aceh.
 - b. Pengendalian Penyakit *Avian Influenza* (AI)
Sampai dengan tahun 2024, terdapat 3 provinsi yang memiliki status bebas *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yaitu Provinsi Papua (2017), Maluku (2016) dan Maluku





Utara (2016), Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan. Hingga tahun 2024 tercatat 287 unit usaha perunggasan telah mendapat sertifikat kompartemen bebas dari AI.

- c. **Pengendalian Penyakit *Brucellosis***
Penyakit *Brucellosis* atau penyakit keluron merupakan salah satu penyakit prioritas yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan populasi ternak di wilayah tertular. *Roadmap* Pengendalian dan Penanggulangan *Brucellosis* telah disusun dengan pola pengendalian penyakit dengan vaksinasi, pembebasan wilayah, sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan penyusunan NSPK pengendalian *Brucellosis*. Pada Tahun 2024, Kegiatan Pengendalian *Brucellosis* dilaksanakan melalui pembebasan kompartemen bebas dari *Brucellosis* sebanyak 4 unit.
- d. **Pengendalian Penyakit *Anthrax***
Penyakit *Anthrax* merupakan penyakit yang secara epidemiologis sangat sulit untuk dibebaskan apabila suatu wilayah telah tertular, mengingat sifat bakteri penyebabnya dapat membentuk spora dan bertahan hidup dalam tanah hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, penyakit *Anthrax* merupakan salah satu penyakit yang diprioritaskan pengendaliannya. Langkah pengendalian penyakit *Anthrax* antara lain dengan pengobatan, vaksinasi, surveilans, pengawasan lalu lintas antar daerah, bimtek, sosialisasi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
- e. **Pengendalian Penyakit *Hog Cholera***
Pengendalian dan penanggulangan *Hog Cholera* (HC)/ *Classsical Swine Fever* (CSF) adalah melalui vaksinasi di daerah endemis dan pengobatan hewan sakit. Sampai dengan saat ini, wilayah yang bebas HC sebanyak 2 provinsi yaitu Sumatera Barat (2014) dan Kalimantan Barat (2021).
- f. **Pengendalian Penyakit *African Swine Fever* (ASF)**
Tantangan penanganan penyakit ASF yaitu tidak adanya vaksin ASF yang tersedia di dunia, jadi hanya mengandalkan penerapan biosekuriti dimana tipikal sistem pemeliharaan di Indonesia peternakan rakyat dengan berbagai level biosekuriti, serta pengendalian lalu lintas babi. Oleh karena itu dilakukan upaya pemberantasan dan pembebasan penyakit hewan wilayah dengan pendekatan kompartemen. Kompartemen yang berhasil ditetapkan status bebas dari penyakit ASF sejumlah 2 kompartemen.
- g. **Pengendalian Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD)**
Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) merupakan penyakit kulit pada ruminansia sapi dan kerbau, namun banyak dilaporkan pada sapi dan tidak bersifat *zoonosis*.
- h. **Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)**
Dalam upaya pengendalian PMK dilakukan vaksinasi sebanyak 16.489.092 dosis dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular untuk mengurangi penyebaran PMK ke wilayah/daerah sekitar. Program penanggulangan PMK dilakukan di wilayah-wilayah prioritas dengan melakukan vaksinasi masal dengan target melakukan vaksinasi pada sapi, kerbau, kambing, dan babi





pada basis kabupaten secara serentak dengan durasi waktu pelaksanaan yang cepat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemahaman nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian dan pemberantasan PMK melalui KIE, melakukan identifikasi wilayah-wilayah berisiko lalu lintas ternak dari lokasi tertular dengan tujuan meningkatkan pengawasan.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS, antara lain:

1. Fasilitasi anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa operasional pusat kesehatan hewan (puskeswan) untuk obat hewan dan pendukungnya, operasional pelaporan iSIKHNAS, operasional pengobatan PHMS, surveilans dan pengujian.
2. Pelaksanaan surveilans tertarget di 21 UPT UPT Veteriner dan UPT Perbibitan dengan realisasi sebesar 362.716 sampel (123,1%).
3. Produksi obat dan vaksin oleh Pusvetma sejumlah 7.432.260 dosis (106,7%).
4. Pengujian dan sertifikasi obat hewan dalam rangka penjaminan mutu obat hewan sejumlah 3.447 sampel (167,33%).
5. Pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan, dan media pembawa (HPM) melalui penerbitan regulasi lalu lintas HPM, pengembangan aplikasi pengawasan lalu lintas HPM serta penerapan biosekuriti pada unit kompartemen.
6. Pengawasan obat hewan melalui pengawasan mutu dan peredaran obat hewan dengan kegiatan penerapan CPOHB, registrasi obat hewan, pelatihan pengawas obat hewan, dan pengawasan peredaran obat hewan oleh pengawas obat hewan.
7. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan melalui penguatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi dan fasilitasi Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner di Puskeswan dan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan lainnya.
8. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Hewan melalui dan kapasitas laboratorium veteriner pada 11 UPT veteriner.





SS 1. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	
Target 54,47%	Realisasi 53,41%
% Capaian 98,05% Berhasil	

Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, prasarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya pertanian. Prasarana tersebut meliputi lahan, jaringan irigasi dan/atau drainase, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Ketersediaan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi produksi, sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Prasarana tersebut meliputi: (1) pengairan lahan pertanian; (2) ketersediaan lahan pertanian; dan (3) pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Sumber data untuk indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian terdiri dari:

1. Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (a)
2. Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (b)
3. Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (c)

Cara perhitungan indikator Dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Data berdasarkan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (Kegiatan Irigasi Pertanian), Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan) serta Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (Kegiatan Pembiayaan Pertanian).
2. Perhitungan tingkat pemenuhan prasarana pertanian berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$x = \left(\frac{a + b + c}{3} \right)$$

Keterangan :

x = Tingkat pemenuhan prasarana pertanian

a = Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian

b = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian

c = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

Data hasil perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan untuk pengairan lahan pertanian, ketersediaan lahan pertanian serta pemenuhan pembiayaan dan perlindungan





usaha pertanian capaian kinerja tingkat pemenuhan prasarana pertanian dapat dilihat pada Tabel 26, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$x = \left(\frac{a + b + c}{3} \right) = \left(\frac{39,80 + 62,90 + 57,54}{3} \right) \times 100\% = 53,41\%$$

Keterangan :

x = Tingkat pemenuhan prasarana pertanian

a = Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (39,80%)

b = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (62,90%)

c = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (57,54%)

Tabel 32. Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2024

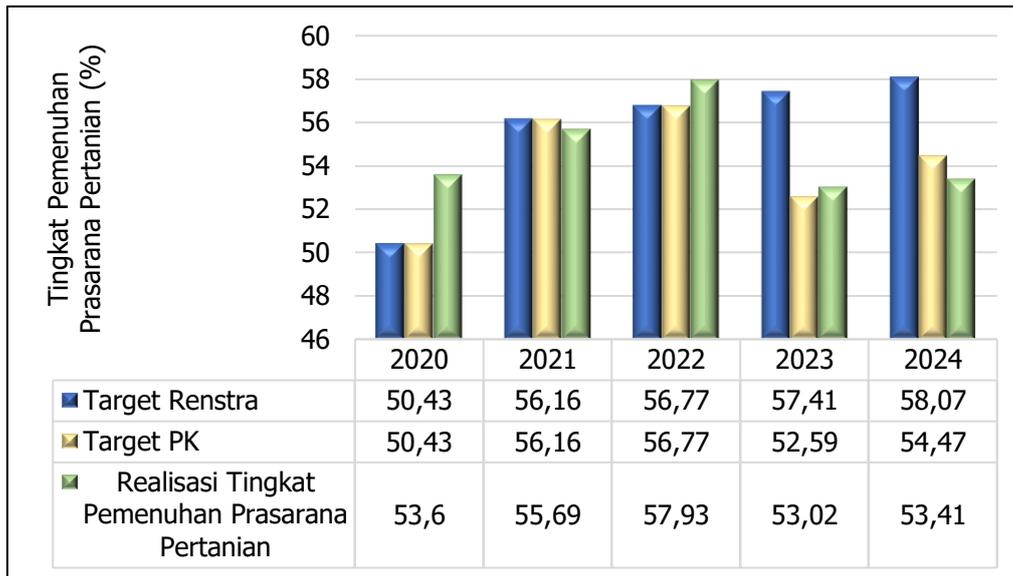
No	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	54,47	53,41	98,05
a.	Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian	39,96	39,80	99,60
b.	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian	64,12	62,90	98,10
c.	Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	59,34	57,54	96,97

Sumber: Ditjen PSP, 2023

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian tahun 2024 sebesar 53,41%, sehingga capaian indikator ini jika dibandingkan dengan target sebesar 54,47% sebesar **98,05%** atau dengan kategori **berhasil**. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 53,02% namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang mencapai 57,93%.

Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian sebesar 53,41%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 58,07%, capaiannya sebesar 91,98% yang berarti target akhir jangka menengah tidak tercapai. Capaian yang belum memenuhi target jangka menengah disebabkan karena adanya perubahan kebijakan sehingga menyebabkan adanya refocusing anggaran untuk kegiatan lainnya. Realisasi indikator tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi sehingga berdampak pada capaiannya dan perkembangan realisasi indikator Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian dapat dilihat pada gambar 14.





Gambar 14. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2020-2024

Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai kegiatan mendukung tercapainya target tingkat pemenuhan prasarana pertanian tahun 2024 yang meliputi kegiatan pengairan lahan pertanian, penyediaan lahan pertanian serta pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Pengairan Lahan Pertanian.

Pengairan yang dimaksud adalah lahan pertanian mendapatkan suplai air. Jika belum terdapat data terkait kebutuhan jaringan irigasi, maka dapat digunakan asumsi dengan menggunakan jumlah irigasi per luas tanam sebagai dasar perhitungan. Suplai air bisa didapatkan dari hasil rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan embung pertanian, dan pengembangan sumber air yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Tingkat pemenuhan pemenuhan pengairan lahan pertanian dihitung berdasarkan:

- Data Total lahan pertanian yang mendapat suplai air sebesar **4.737.659 Ha** yang diperoleh dari realisasi RJIT, Irigasi Perpompaan, Irigasi Perpipaan, Irigasi Bertekanan, Dam Parit, Normalisasi Saluran dan Bangunan Konservasi Air ditambah total luas lahan yang mendapat suplai air 2023. Total luasan lahan tambahan yang mendapatkan suplai air pada tahun 2024 adalah seluas 240.237 ha, sedangkan total luas lahan yang mendapat suplai air dari tahun 2015 sampai dengan 2023 adalah seluas 4.497.422 Ha.
- Identifikasi total kebutuhan lahan pengairan berdasarkan luas lahan pertanian (Ha) sebesar 11.904.564 Ha yang diperoleh dari data luas lahan sawah irigasi, sawah non irigasi, ladang/huma bersumber dari statistik lahan pertanian tahun 2015 (Pusdatin).

Perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut:





$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{4.737.659}{11.904.564} \times 100\% = \mathbf{39,80\%}$$

Keterangan :

x = Identifikasi Tingkat Pemenuhan lahan pertanian yang mendapat suplay pengairan

a = Identifikasi total luas lahan yang mendapat suplai air

b = Identifikasi total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan

Realisasi Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian adalah sebesar 39,80% dari total luas lahan 11.904.564 ha yang membutuhkan pengairan untuk lahan pertanian. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 37,78%.

Keberhasilan atas tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian kegiatan TA. 2024 pada tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian meliputi:

- a. Rehabilitasi jaringan irigasi terdiri dari 1.663 unit atau untuk luasan 41.575 Ha;
- b. Pengembangan sumber air sebanyak 13.705 unit untuk luasan 190.350 Ha yang terdiri irigasi perpompaan sebanyak 9.498 unit untuk luasan 148.310 Ha dan irigasi perpipaan sebanyak 4.204 unit untuk luasan 42.040 Ha.
- c. Bangunan Konservasi Air sebanyak 415 unit untuk luasan sebesar 6.469 Ha, yang terdiri dari: (1) irigasi bertekanan sebanyak 233 unit; (2) dam parit sebanyak 100 unit; (3) normalisasi saluran sebanyak 24 unit; dan (4) bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim mendukung *food estate* sebanyak 58 unit.



Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Perhitungan luas cakupan tingkat pemenuhan pengairan pada lahan pertanian TA 2024 dapat dilihat pada tabel 33.





Tabel 33. Perhitungan Capaian tingkat pemenuhan pemenuhan pengairan pada lahan pertanian TA. 2024

No.	Kegiatan	Target		Realisasi	
		Unit	Ha	Unit	Ha
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (Pusat)	1.663	41.575	1.663	41.575
2	Pengembangan Irigasi Perpompaaan (TP)	9.904	99.040	9.498	148.310
3	Pengembangan Irigasi Perpipaana (TP)	5.435	54.350	4.204	42.040
4	Pengembangan Irigasi Bertekanan (Pusat)	266	2.660	233	3.041
5	Pengembangan Damparit (Pusat)	121	2.420	100	2.239
6	Normalisasi Saluran (Pusat)	33	1.650	24	712,3
7	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung Food Estate	58	2.320	58	2.320
(a)	Total Realisasi	17.480	204.015	15.780	240.237
(b)	Total luas lahan yg mendapat suplai air 2023				4.497.422
(c) = (a) + (b)	Total luas lahan yg mendapat suplai air 2024				4.737.659
(d)	Total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan pertanian (Ha)				11.904.564
(e) = (c) / (d)	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)				39,80

2. Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau sesuai untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Identifikasi total lahan pertanian yang tersedia saat ini adalah dalam ukuran (ha) dan berdasarkan perhitungan data luas lahan baku sawah berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala BPN No. 686/SK-PG.0303/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 seluas **7.463.948 ha** ditambah Realisasi kegiatan Optimasi Lahan dan lahan pertanian pangan produktif seluas **348.758,71 ha**, jadi total luas lahan pertanian yang tersedia **7.812.707 ha**.

Data jumlah kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi pada Komoditas Padi yang diperoleh dari prediksi Luas Panen (Ha) tahun 2024 (target Produksi padi 2024 sebesar 65.400.000 Ton dibagi Produktivitas Padi Nasional tahun 2023) ditambah dengan luas lahan terkena puso (Ha). Produktivitas padi nasional tahun 2023 diperoleh dengan pendekatan total produksi gabah tahun 2023 dibagi dengan luas panen padi tahun 2023:

Produktivitas Padi Nasional 2023 (ton/ha)	=	$\frac{\text{Produksi 2023 (ton GKG)}}{\text{Luas Panen 2023 (ha)}}$	=	$\frac{53.980.993}{10.213.705}$	=	5,29
---	---	--	---	---------------------------------	---	------

Jumlah kebutuhan lahan berdasarkan target produksi didapatkan melalui:

$$\text{Jumlah Kebutuhan Lahan Pertanian 2024 (Ha)} = \frac{\text{Target Produksi padi 2024 (ton GKG)}}{\text{Produktivitas padi (ton/Ha)}}$$





$$= \frac{64.500.000}{5,29} = 12.374.287 \text{ Ha}$$

Untuk menghitung luas lahan terdampak puso, menggunakan asumsi sebesar 0,37% dari luas panen, sehingga luas lahan terdampak puso diperkirakan sebesar 45.785 Ha. Total kebutuhan luas lahan pertanian tahun 2024 diperoleh dari luas kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi ditambahkan dengan luas lahan pertanian terdampak Puso (Ha) sehingga diperoleh total kebutuhan lahan pertanian tahun 2024 sebesar **12.420.072 Ha**.

Perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{7.812.707}{12.420.072} \times 100\% \\ = \mathbf{62,90\%}$$

Keterangan :

x = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian

a = Total luas lahan pertanian yang tersedia saat ini

b = Jumlah kebutuhan lahan padi berdasarkan target produksi

Berdasarkan perhitungan, tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian adalah sebesar 62,90%. Capaian tahun 2024 ini merupakan pencapaian yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 64,92%. Kebutuhan akan lahan pertanian semakin meningkat seiring dengan peningkatan target produksi. Oleh sebab itu, realisasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah nasional yaitu pada Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024, belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 64.12%.

Dukungan dari tingkat pemenuhan ketersediaan lahan adalah melalui kegiatan Optimasi Lahan dan Lahan Pertanian Pangan Produktif. Kegiatan optimasi lahan dilakukan pada lahan rawa dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa yang potensial mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa untuk meningkatkan ketersediaan lahan pertanian. Kondisi yang terjadi saat ini, lahan rawa umumnya hanya dimanfaatkan untuk satu kali musim tanam dalam satu tahun.

Untuk meningkatkan pemanfaatan maupun peningkatan indeks pertanaman di lahan rawa terdapat beberapa tantangan, meliputi: (1) Kondisi air yang fluktuatif sehingga genangan air biasanya tinggi pada saat banjir/pasang, serta dangkal dan mengalami kekeringan pada saat musim kemarau; (2) Infrastruktur lahan dan air yang masih sangat terbatas dan belum berfungsi dengan optimal; (3) Tingkat kesuburan lahan yang rendah, (4) Masih rendahnya penggunaan benih unggul bersertifikat berumur genjah; (5) Teknis dan pola pengolahan lahan rawa yang belum dilaksanakan sesuai kaidah teknis; (6) Tingginya biaya usaha tani di lahan rawa; (7) Kelembagaan petani di lokasi lahan rawa belum tertata dengan baik; dan (8) pH tanah sangat masam dan potensi keracunan Fe/Al.





Berdasarkan indentifikasi tantangan pemanfaatan lahan rawa sebagai lahan pertanian, diperlukan upaya melalui kegiatan Optimasi Lahan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan rawa melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air dengan prioritas pada kegiatan: (1) Pembangunan dan/atau rehabilitasi tanggul; (2) Pembangunan dan/atau rehabilitasi pintu air; (3) Pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran air irigasi dan saluran pembuang (drainase) di tingkat usaha tani; (4) Pembangunan pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM); (5) Pembangunan/rehabilitasi jembatan usaha tani; dan (6) Kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan rawa sesuai kebutuhan spesifik lokasi.

Kegiatan optimasi lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur lahan pertanian rawa melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur tata lahan dan tata air, sehingga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan produksi dan/atau meningkatnya indeks pertanaman. Kegiatan optimasi lahan rawa terdiri dari beberapa kegiatan meliputi:

a. SID Optimasi Lahan

Kontrak penyusunan SID dilakukan di seluruh wilayah pada 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan) dan Survey dan Identifikasi serta Desain dilaksanakan di seluruh wilayah pada 12 Provinsi sesuai dengan kontrak yang telah dilakukan. Untuk kegiatan ini dapat direalisasikan sesuai tahapan, meliputi

- Kontrak seluas 351.657 Ha (99,35%)
- Survey/Investigasi seluas 351.011 Ha (99,82%)
- Desain seluas 351.011 Ha (99,82%)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SID yaitu, curah hujan tinggi sehingga menyebabkan lahan tergenang dan menghambat penyelesaian SID, sehingga pekerjaan SID baru dilaksanakan pada pertengahan tahun. Terlambatnya pekerjaan SID dapat berdampak pada lambatnya pelaksanaan tahapan optimasi lahan selanjutnya.

b. Konstruksi Optimasi Lahan

Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan yang dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur yang telah dirancang. Untuk fisik kegiatan sudah terealisasi seluas 348.758 Ha atau sebesar 99,36% dari target pada tahun 2024 seluas 351.017 ha. Dalam pelaksanaannya, meskipun tidak banyak namun terdapat tantangan atau kendala yaitu tingginya curah hujan sehingga menyebabkan lahan tergenang dan menghambat progres/penyelesaian konstruksi. Selain itu, pada praktiknya terdapat beberapa lokasi melakukan penanaman tanpa olah tanah. Beberapa hasil kegiatan konstruksi Optimasi Lahan Rawa 2024 dapat dilihat pada gambar 16.





Gambar 16. Konstruksi Optimasi Lahan Rawa TA 2024 di Provinsi Kalsel dan Olah tanah di Provinsi Lampung

c. Kegiatan Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa

Kegiatan olah tanah pada tahun 2024 dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan. Realisasi Fisik kegiatan olah tanah dilakukan di 12 Provinsi yang telah ditargetkan yang terdiri dari 74 Kabupaten dengan total luasan sebesar 267.005 Ha atau 77,11% dari target seluas 346.278,25 ha.

Kegiatan olah tanah dilakukan untuk mempersiapkan tanah hingga siap tanam, dengan melakukan penggemburan, pemupukan tanah sehingga dapat meningkatkan kesuburan dan struktur tanah. Pelaksanaan olah tanah dengan baik dapat meningkatkan kondisi fisik dan kimia tanah sehingga tanah siap untuk ditanam dan tanaman dapat tumbuh dengan optimal.

Secara umum tingkat pemenuhan ketersediaan lahan belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena beberapa kendala yaitu:

- Keterbatasan SDM tim teknis di Kabupaten/Provinsi dalam hal menganalisis laporan hasil pengawasan kegiatan SID dan konstruksi kondisi lahan dan pola tanam yang bervariasi sehingga waktu pengerjaan yang berbeda-beda
- Curah hujan tinggi sehingga menyebabkan beberapa lokasi tergenang air (banjir)
- Pelaksanaan konstruksi mundur karena keterlambatan kontrak pekerjaan dengan IPL/pihak pelaksana
- Terdapat lahan yang sudah beralih fungsi dari lahan pertanian ke lahan sawit atau kelapa yang berada pada areal yang sudah dilakukan SID tahun 2021
- pekerjaan konstruksi dan pengolahan lahan baru bisa dikerjakan setelah musim panen selesai karena dikhawatirkan mobilisasi alat dan pengoperasian alat berat akan merusak pertanaman

Sebagai upaya perbaikan, maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Penyusunan SID dilakukan pada T-1;
- Melakukan evaluasi kegiatan optimasi lahan rawa yang dilaksanakan oleh pihak





- eksternal;
- c. Menyusun rencana kegiatan dengan mencantumkan target waktu penyelesaian setiap tahapan kegiatan;
- d. Mendorong Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten untuk mengadakan pelatihan terhadap tim teknis di bidang konstruksi;
- e. Lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan para stakeholder, pembinaan dan pendampingan serta pengawalan pelaksanaan kegiatan SID, Konstruksi, Olah Tanah

3. Tingkat Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian.

Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan memudahkan petani untuk mendapatkan modal untuk menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha pertanian.

Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian dihitung menggunakan rumus:

$$x = \frac{\frac{a}{b} + \frac{\frac{c}{e} + \frac{d}{f}}{2}}{2} \times 100\%$$

Keterangan :

- x = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian
- a = Identifikasi total usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan (Pelaku usaha yang mendapatkan akses KUR, fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan LKM-A dan koperasi pertanian, dan permodalan dari *privet sector*)
- b = Identifikasi Target total usaha pertanian (pelaku usaha)
- c = Identifikasi total lahan pertanian yang terlindungi asuransi pertanian (Ha) yaitu luasan lahan sawah (hektar) yang dialokasikan untuk diberi bantuan premi AUTP pada TA. 2024 oleh Kementerian Pertanian
- d = Identifikasi total ternak yang terlindungi asuransi pertanian (Ekor) yaitu target jumlah ternak sapi/kerbau (ekor) yang dialokasikan untuk diberi bantuan premi AUTS/K pada TA. 2024
- e = Identifikasi total lahan pertanian (Ha) yaitu total luas lahan pertanian yang berpotensi puso karena terletak di wilayah rawan bencana dan lahan sawah yang berpotensi untuk puso walau berada di wilayah aman bencana. Angka ini diperoleh dengan mengasumsikan 10% dari total luasan pertanaman padi per tahun seluas 14.927.896 hektar, berpotensi mengalami puso. Perkiraan luas total pertanaman padi per tahun diperoleh dengan mengasumsikan 100% dari luas baku lahan





sawah nasional sebesar 7.463.948 ha (Keputusan Menteri/Kepala BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019) akan mengalami 2 kali pertanaman

- f = Identifikasi total ternak (Ekor) yaitu jumlah total ternak sapi/kerbau betina yang berumur > 1 tahun dan masih berproduksi. Data diperoleh dari penjumlahan total ternak kerbau, ternak sapi perah dan sapi potong yang berumur > 1 tahun kemudian dikali 50% yang merupakan representasi dari jumlah ternak betina (Data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan)

Berdasarkan data yang diperoleh, nilai dari masing-masing variabel, yaitu:

- Total usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan (pelaku usaha) sebesar 2.115 pelaku usaha.
- Total pelaku usaha pertanian (pelaku usaha) sebesar 2.000 pelaku usaha.
- Jumlah luas lahan yang terlindungi asuransi pertanian (Ha) sebesar 278.832 Ha.
- Jumlah ternak yang terlindungi asuransi pertanian (Ekor) sebanyak 0 ekor
- Total luas lahan pertanian (Ha) sebesar 1.492.789 Ha
- Total ternak (Ekor) sebesar 9.895.286 ekor.

Hasil perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian tahun 2024, yaitu :

$$x = \frac{\frac{a}{b} + \frac{\frac{c}{e} + \frac{d}{f}}{2}}{2} \times 100\% = \frac{\frac{2.115}{2.000} + \frac{\frac{278.832}{1.492.789} + \frac{0}{9.895.286}}{2}}{2} \times 100\% = 57,54 \%$$

Hasil perhitungan menunjukkan tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian tahun 2024 sebesar 57,54% yang berarti rata-rata sebesar 57,54 persen yang mendapatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha tani baik lahan pertanian maupun ternak. Capaian ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 yang capaiannya sebesar 53,36%.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan tingkat pembiayaan, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, yaitu:

- Tidak adanya kegiatan AUTS/K pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 yang masih memiliki target sejumlah 20.000 ekor menurunkan rerata rasio untuk Asuransi Pertanian.
- Rasio capaian AOTP terhadap target AOTP tahun 2024 sebesar 18,68% lebih rendah dibandingkan rasio capaian tahun 2023 sebesar 20,47%.
- Peningkatan rasio pelaku usaha pada tahun 2024 menjadi 105% dari sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 102,38%.

Capaian ini masih belum tercapai jika dibandingkan target jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 sebesar 67,32%, sehingga dengan realisasi sebesar 57,54% capaiannya baru mencapai 86,96% dari target jangka menengah. Tidak





tercapainya target jangka menengah disebabkan karena adanya perubahan kebijakan yang menyebabkan refocusing anggaran sehingga berpengaruh pada anggaran untuk asuransi ternak dan asuransi padi.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tani padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 hektar dan pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen atau kematian ternak. Secara umum aktivitas AUTP berkontribusi dalam mendukung program swasembada pangan dengan melakukan mitigasi gagal panen dari usaha tani padi yang terealisasi seluas 278.832,47 Ha pada tahun 2024. Sedangkan aktivitas AUTS/K berkontribusi dalam mendukung program swasembada daging melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi/kerbau akibat mati dan atau kehilangan namun untuk tahun ini tidak dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.

Adapun upaya-upaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama 2024 ini meliputi :

- a. Akselerasi kegiatan AUTP baik offline dengan percepatan langsung ke daerah-daerah maupun online via zoom meeting untuk percepatan pendaftaran dan serapan realisasi;
- b. Berkoordinasi dengan Dinas dan PT. Jasindo terkait sosialisasi, koordinasi dan realisasi AUTP;
- c. Berkoordinasi dengan Dinas dan PT. Jasindo terkait sosialisasi, koordinasi dan realisasi pembayaran klaim AUTP;
- d. Melakukan rekonsiliasi klaim Asuransi Pertanian baik antara Kementan dan Jasindo Pusat maupun antara Jasindo Cabang dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan sinergi kegiatan Asuransi Pertanian dengan program bantuan pemerintah lingkup Kementan lainnya; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian TA. 2024.

Walaupun sudah meningkat secara persentase capaian yang memenuhi target, namun masih terdapat kendala yang ditemui, diantaranya adalah :

- a. Kesadaran petani untuk membayar premi asuransi masih rendah. Petani yang memiliki lahan berisiko tinggi lebih tertarik untuk mendaftar AUTP sedangkan petani yang lahan sawahnya berisiko rendah kurang tertarik mendaftar AUTP. Hal ini membuat realisasi AUTP cukup sulit;
- b. Petani yang sudah berulang kali menjadi peserta AUTP namun tidak pernah klaim, enggan untuk mengikuti program AUTP kembali;
- c. Kurangnya pemahaman petugas di lapangan dalam memahami aplikasi SIAP yang menyebabkan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTP terhambat dikarenakan kesalahan input/ketidaksesuaian data dan pemenuhan kelengkapan data yang lambat;





- d. Kurangnya infrastruktur digitalisasi di tingkat petugas lapangan sehingga menghambat pelaksanaan asuransi pertanian melalui aplikasi SIAP;
- e. Terbatasnya petugas Dinas Teknis dan SDM mitra pelaksana dalam pelaksanaan asuransi sehingga pelayanan belum optimal dan menghambat proses pendaftaran dan klaim;
- f. Perusahaan pelaksana asuransi menolak pendaftaran AUTP dalam rangka mitigasi resiko namun pada beberapa kasus tidak sesuai dengan pedoman umum, mitra pelaksana juga membatasi pendaftaran hanya untuk beberapa wilayah kecamatan; dan
- g. Perusahaan pelaksana asuransi menolak permohonan klaim dari petani, pada beberapa kasus, penolakan klaim tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksana AUTP.

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, telah dilakukan upaya tindak lanjut dan tindakan antisipatif di tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Jasindo sudah melakukan kerjasama dengan PT. POS Indonesia untuk pengiriman polis AUTP dan distribusi pembayaran klaim AUTP sehingga uang klaim AUTP akan langsung diterima oleh petani yang bersangkutan;
- b. Meningkatkan sosialisasi aplikasi SIAP kepada para petugas lapangan (PPL);
- c. Meningkatkan sosialisasi, komunikasi dan publikasi tentang asuransi pertanian kepada sasaran petani;
- d. Melakukan koordinasi kepada Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan asuransi pertanian sesuai pedoman;
- e. Penyempurnaan pedoman yang ada sesuai dengan perkembangan di lapangan dan kebutuhan; dan
- f. Meminta PT. Jasindo untuk meningkatkan pelayanan melalui penambahan SDM dan perbaikan aplikasi SIAP serta percepatan proses pembayaran klaim AUTP.

Untuk menunjukkan pencapaian kinerja perlindungan usaha dapat dilihat trend pagu, target, realisasi anggaran, dan realisasi fisik AUTP (Ha) selama 10 tahun pada Tabel berikut:

Tabel 34. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2015 – 2024

No	Tahun	Pagu (Rp)	Target (Ha)	Realisasi (Rp)	Realisasi Fisik (Ha)	%
1	2015	144.000.000.000	1.000.000	33.623.935.200	233.499,55	23,35
2	2016	72.000.000.000	500.000	71.994.564.000	499.962,25	99,99
3	2017	144.000.000.000	1.000.000	143.706.317.760	997.960,54	99,80
4	2018	144.000.000.000	1.000.000	116.092.748.160	806.199,64	80,62
5	2019	144.000.000.000	1.000.000	139.855.501.440	971.218,76	97,12
6	2020	144.000.000.000	1.000.000	144.000.198.720	1.000.001,38	100,00
7	2021	57.600.000.000	400.000	57.600.001.440	400.000,01	100,00
8	2022	55.077.811.200	382.484	50.869.224.000	353.258,50	92,36
9	2023	43.999.920.000	305.556	43.999.920.000	305.558,12	100,00
10	2024	40.148.064.000	278.806	40.148.064.000	278.832,47	100,00
TOTAL		988.825.795.200	6.866.846	841.890.474.720	5.846.491	85,14





Tahun 2024 dana bantuan premi AUTP senilai Rp40.148.064.000,- dan telah disalurkan sebanyak 12 tahap, yang mencakup areal sawah seluas 278.832 Ha di 24 Provinsi. Pada tahun 2024 bantuan premi disalurkan kepada petani padi yang melakukan usahatani di sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah rawa pasang surut dan sawah rawa lebak.

Bantuan dana bantuan premi AUTS/K tahun 2024 semula dialokasikan namun karena mengalami refocusing anggaran, sehingga anggarannya dialihkan untuk mendukung program prioritas yaitu Optimasi Lahan dan Cetak Sawah. Perkembangan pagu, target, realisasi anggaran, dan realisasi fisik AUTS/K (ekor) selama 9 tahun terakhir dijabarkan pada tabel 35.

Tabel 35. Realisasi AUTS/K Tahun 2016 – 2024

No	Tahun	Pagu (Rp)	Target (Ekor)	Realisasi (Rp)	Realisasi Fisik (Ekor)	%
1	2016	3.200.000.000	20.000	3.200.000.000	20.000	100,00
2	2017	19.200.000.000	120.000	14.692.960.000	91.831	76,53
3	2018	19.200.000.000	120.000	14.187.680.000	88.673	73,89
4	2019	24.000.000.000	150.000	22.430.400.000	140.190	93,46
5	2020	19.200.000.000	120.000	19.200.000.000	120.000	100,00
6	2021	16.000.000.000	100.000	16.000.160.000	100.001	100,00
7	2022	14.764.800.000	92.280	10.789.760.000	67.436	73,08
8	2023	3.200.000.000	20.000	3.200.000.000	20.000	100,00
9	2024	0	0	0	0	0,00
TOTAL		118.764.800.000	742.280	103.700.960.000	648.131	87,32





SS 1. IKU 6	
Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	
Target 94,62%	Realisasi 96,68%
% Capaian 102,18% Sangat Berhasil	

Indikator ini untuk mengetahui pemanfaatan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian. Sarana tersebut meliputi benih tanaman dan benih hewan atau bibit hewan; pupuk, pestisida, pakan dan alsintan.

Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian secara keseluruhan dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian})}{\sum \text{eselon I yang melaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian}}$$

Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pertanian di Eselon I yang melaksanakan fasilitas sarana pertanian, yaitu Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat oleh Kementerian Pertanian, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian.

Indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian merupakan Indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Kementerian Pertanian Revisi II dan terbit pada akhir tahun 2021 dan merupakan indikator baru pasca revisi, sehingga pengukuran terhadap indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian baru dilakukan untuk pelaporan kinerja Kementerian Pertanian tahun 2021. Indikator ini selanjutnya dijabarkan lebih rinci pada Renstra Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sarana produksi pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian meliputi sarana produksi hortikultura, sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan, serta sarana produksi pertanian prapanen (pupuk, pestisida dan alsintan). Capaian tingkat kemanfaatan sarana pertanian tahun 2024 terlihat pada Tabel 36.

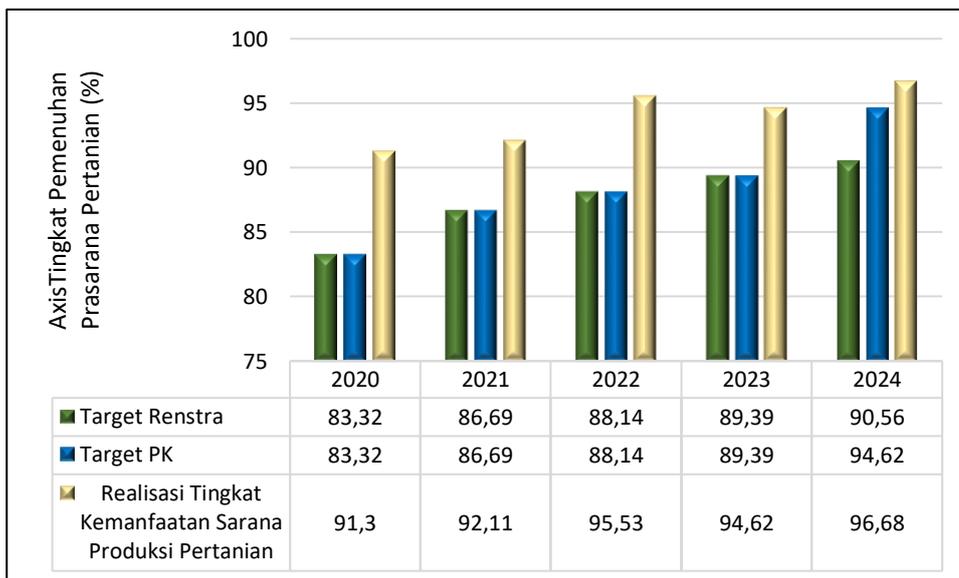




Tabel 36. Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Produksi Pertanian	Target (%)	Tingkat Kemanfaatan (%)	Capaian (%)
1	Total Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian	94,62	96,68	102,18
a.	Fasilitasi Sarana Produksi Hortikultura	95,66	95,88	100,23
b.	Fasilitasi Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	100	99,05	99,05
c.	Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian Pupuk, Pestisida dan Alsintan	92,50	95,12	102,83

Berdasarkan tabel 36, realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian adalah sebesar 96,68% yang berhasil melebihi target 94,62% atau tercapai sebesar 102,18% dengan kategori **sangat berhasil**. Capaian Tahun 2024 ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 94,62%. Realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Kementan 2020-2024 sebesar 90,56%, maka capaian tahun 2024 telah melampaui target jangka menengah dengan capaian sebesar 106,78%. Realisasi indikator tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan perkembangan realisasi indikator Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian dapat dilihat pada gambar 17.



Gambar 17. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Tahun 2020-2024

Keberhasilan pencapaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian didukung oleh kemanfaatan dari fasilitasi sarana produksi pertanian, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:





1. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Produksi Hortikultura

Pengukuran tingkat kemanfaatan fasilitas sarana produksi hortikultura merupakan kemanfaatan benih hortikultura yang dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner kepada penerima bantuan benih sebar. Pengukuran tingkat kemanfaatan benih dilakukan karena diperlukan data dan fakta fasilitas bantuan benih yang telah diberikan memberikan nilai manfaat atau tidak bagi penerima manfaat. Pengembangan hortikultura memerlukan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul, sehingga penting memahami manfaat dari fasilitas benih yang diberikan. Penggunaan benih bermutu varietas unggul salah satu faktor penting yang berperan dalam menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing yang dicirikan antara lain oleh produk dengan produktivitas tinggi, mutu hasil dan efisiensi usaha tani.

Sampel tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura tersebut diambil dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia yang menerima fasilitas benih hortikultura yang terdiri dari kelompok tani, Gapoktan maupun balai benih hortikultura. Berdasarkan hasil olah data, tingkat kemanfaatan perbenihan hortikultura mencapai 95,88%, yang berarti sebanyak 95,88 persen penerima manfaat benih hortikultura mendapatkan manfaat fasilitas benih hortikultura yang diberikan berdasarkan beberapa aspek penilaian meliputi: (1) kecukupan kebutuhan benih yang diterima (jumlah/volume/target tanam); (2) kesesuaian jenis benih yang diterima (komoditas dan varietas sesuai dengan permintaan); (3) kesesuaian waktu tanam dengan waktu serah terima benih (sesuai dengan jadwal tanam); (4) kualitas benih (benih yang diterima berlabel); (5) waktu tanam benih bantuan (apakah benih yang diterima sudah ditanam); (6) keragaan kondisi benih yang sudah ditanam; (7) manfaat bantuan benih terhadap biaya produksi (apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi); (8) kepuasan terhadap benih yang diberikan; (9) kemandirian usaha budidaya (tanpa bantuan dari pemerintah); (10) pemanfaatan hasil panen; dan (11) Pendampingan dari Dinas/ PPL dan bentuk pendampingan (setelah diberikan bantuan benih).

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul sudah menjadi kebutuhan dalam berbudidaya, namun demikian penggunaan benih bermutu pada sebagian petani/masyarakat masih terbatas atau bahkan belum mengetahui varietas unggul dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain terbatasnya ketersediaan benih bermutu, penyediaan benih bermutu memerlukan waktu, kekurangtahuan masyarakat terhadap manfaat penggunaan benih bermutu dan masih terlalu tingginya harga benih bermutu. Kondisi tersebut membuat petani/masyarakat masih ada yang menggunakan benih yang dibuat sendiri tanpa diketahui asal usul benih sumbernya dan digunakan berulang-ulang, sehingga tentunya mutu benih tersebut semakin lama semakin menurun dan kemungkinan besar tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan.





Pada Tahun 2024, fasilitasi bantuan benih hortikultura kelompok tani, Gapoktan maupun balai benih hortikultura yang tersebar di 25 Provinsi, dan 868 penerima bantuan. Adapun benih yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- a. Benih buah (nenas, jeruk, durian, melon, stroberi, anggur, alpukat).
- b. Benih sayuran (bawang merah, bawang putih).
- c. Benih tanaman obat (jahe).

Tingkat kemanfaatan benih dilakukan dengan survei melalui pemilihan sampel dengan metode purposive sampling dari penerima bantuan di 20 provinsi sebanyak 868 petani penerima, yang telah mengisi survei sebanyak 194 responden (22,35%), dengan sebaran sampel seperti pada **Lampiran 6**.

Kemanfaatan fasilitasi sarana produksi hortikultura sebesar 95,88% jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 sebesar 95,66%, maka capaian kemanfaatan fasilitasi sarana produksi hortikultura sebesar 100,23%. Capaian ini menunjukkan bahwa target jangka menengah berhasil dipenuhi bahkan mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tentunya harus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga berkelanjutan, sehingga bantuan benih yang diberikan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/masyarakat. Secara rinci hasil survei tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pendorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih secara berkesinambungan.

- a. Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu
 - 1) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih.
 - 2) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
 - 3) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.
- b. Upaya Peningkatan Kemanfaatan Benih
 - 1) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima
 - 2) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam
 - 3) Pendampingan dan pembinaan
 - 4) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*)





2. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tingkat kemanfaatan bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan dihitung berdasarkan kemanfaatan fasilitas sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan yang telah diberikan, meliputi sarana kesehatan masyarakat veteriner, sarana kesehatan hewan, sarana perbibitan dan produksi ternak, dan sarana pakan, telah diberikan oleh Kementerian Pertanian. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitas sarana dan prasarana peternakan yang diberikan pada tahun sebelumnya (t-1) sehingga dapat diketahui penggunaan atau pemanfaatan fasilitas yang diberikan telah sesuai atau tidak dengan tujuannya.

Pengumpulan data dan informasi sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan cara:

- Sarana pakan berupa sarana Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Pakan Olahan, dilakukan dengan monitoring ke kelompok penerima manfaat menggunakan kuisioner.
- Sarana perbibitan dan produksi ternak dan kesmavet menggunakan kuisioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang Menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menerima bantuan.
- Sarana prasarana kesehatan hewan menggunakan kuisioner dengan beberapa parameter penilaian. Tingkat kemanfaatan sarana-prasarana laboratorium kesehatan hewan dilakukan menggunakan kuisioner dengan menggunakan beberapa parameter penilaian berupa: kelengkapan administrasi, pengendalian dan pembinaan, serta pemeliharaan) dan didistribusikan ke 8 (delapan) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Veteriner.

Hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan secara detail dapat dilihat pada tabel 37.

Tabel 37. Realisasi Kemanfaatan Sarana Produksi Asal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

Jenis Sarana	Jumlah Alsintan yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel Alsintan (Unit)	Alsintan Yang Dimanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
a. Sarana Pakan				100
• Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	63	63	63	100
• Sarana Prasarana Pakan Olahan	3	3	3	100
b. Sarana perbibitan dan Produksi Ternak				
• Container Container Lapangan, Semen Beku, Depo N2 Cair	183	183	180	98,36
c. Sarana Kesehatan Hewan				
• Sarana Prasarana Lab. Veteriner	427	427	427	100
d. Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	6	6	97,83
Rata-rata Tingkat Kemanfaatan Sarana				99,05





Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 sebesar 99,05% yang meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 96,65%. Peningkatan kemanfaatan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan didukung oleh berbagai kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pakan

Sarana pakan diberikan untuk memfasilitasi kegiatan Hijauan Pakan Ternak dan Pakan Olahan di daerah. Capaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana pakan tahun 2024 mencapai 100%, diperoleh dari pemanfaatan sarana Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang didistribusikan pada tahun 2023 sebanyak 66 unit di 15 provinsi yang peruntukannya untuk kelompok peternak dan UPTD.

Sarana pakan terdiri dari alsintan penanaman/pemanenan hijauan pakan ternak dan pengolahan pakan. Dengan adanya sarana prasarana ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerapan penanaman hijauan pakan berkualitas dan pengolahan pakan yang baik dan benar sehingga mampu meningkatkan efisiensi kerja, peningkatan produksi dan produktivitas ternak.

Keberhasilan tercapainya indikator tingkat kemanfaatan sarana pakan yang dialokasikan dalam rangka peningkatan kegiatan penyediaan pakan hijauan dan pakan olahan karena ditunjang dengan adanya beberapa hal diantaranya yaitu:

- 1) Penentuan kriteria lokasi dan kelompok penerima sarana yang tepat.
- 2) Jenis dan spesifikasi sarana sesuai dengan kebutuhan penerima.
- 3) Adanya pelaksanaan verifikasi kelompok berdasarkan hasil CP/CL yang dilakukan oleh tim teknis.
- 4) Adanya penetapan lokasi dan kelompok penerima berdasarkan usulan tim teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
- 5) Komitmen penerima manfaat dalam memanfaatkan sarpras yang telah diberikan.
- 6) Adanya pendampingan, pemantauan dan evaluasi terhadap sarana yang diberikan kepada penerima bantuan.

b. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Perbibitan dan Produksi Ternak

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana perbibitan dan produksi ternak yang didistribusikan tahun 2023 maka dilakukan identifikasi jumlah sarana berupa kontainer di provinsi. Kontainer tersebut digunakan untuk mendistribusikan semen beku dan N₂ cair dalam mendukung kegiatan optimalisasi reproduksi. Dalam rangka pendistribusian semen beku tahun 2023 telah didistribusikan 122 unit kontainer lapangan, 33 unit kontainer depo N₂ cair, dan 28 unit kontainer depo semen beku. Frekuensi penggunaan kontainer semen beku dan N₂ cair yang berasal dari pengadaan tahun 2023 berdasar pada jumlah pengadaan N₂ cair sebanyak 1.487.423 liter yang telah terealisasi.

c. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Kesehatan Hewan

Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan hewan diperoleh dengan distribusi kuesioner ke 8 (delapan) UPT Veteriner dengan beberapa parameter penilaian sebagaimana Tabel 37 atas pengadaan sarana dan





prasarana laboratorium kesehatan hewan tahun 2023 sebanyak 427 unit untuk laboratorium Virologi, Bakteriologi, Parasitologi, Bioteknologi, Serologi, dan Patologi.

Keberhasilan pencapaian target kinerja persentase pemanfaatan sarana prasarana kesehatan hewan tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan diantaranya monitoring dan evaluasi berkala terhadap parameter evaluasi kegiatan pemanfaatan sarana kesehatan hewan/ alat dan bahan laboratorium veteriner, identifikasi dan pemetaan gap standar dan masalah terhadap parameter evaluasi kegiatan pemanfaatan sarana kesehatan hewan/ alat laboratorium veteriner, melakukan perbaikan dan pelatihan untuk penguatan kapasitas dan kompetensi teknis terkait kegiatan pemanfaatan sarana kesehatan hewan/ alat laboratorium veteriner, memperkuat kolaborasi, koordinasi dan veterinary laboratory networking system untuk updating dan pemutakhiran kinerja dan prosedur teknis standar kemanfaatan sarana kesehatan hewan UPT wilayah barat dan timur dengan stakeholder/ sektor dan mitra pembangunan terkait, menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC dan LMT untuk kemanfaatan sarana kesehatan hewan UPT wilayah barat dan timur untuk penjaminan kualitas kinerja laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner dan output kemanfaatan sarana kesehatan hewan yang dimonitor secara periodik dan berkelanjutan.

- d. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
Tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner tahun 2024 dihitung dengan melihat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner yang difasilitasi pada tahun 2023 meliputi fasilitasi sarana RPHR diberikan Kabupaten Depok dan Kabupaten Gowa, fasilitasi unit penanganan madu di Kabupaten Sumbawa Barat, fasilitasi sarana penanganan kesejahteraan hewan uji di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dan Balai Besar Pusat Veteriner Fatrma Pusvetma, dan fasilitasi sarana laboratorium kesmavet di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Tingkat kemanfaatan sarana prasarana tahun 2024 sebesar 97,83% dengan rincian pada tabel 38.

Tabel 38. Rincian Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

Uraian	Lokasi	Volume	Satuan	% Pemanfaatan
Fasilitasi RPHR Kota Depok	Kota Depok, Jawa Barat	1	Unit	100,00%
Fasilitasi RPHR Kab. Gowa	Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Unit Penanganan Madu	Kab. Sumbawa Barat, NTB	1	Unit	87,00%
Fasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	BBPMSOH	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Sarana Penanganan Kesejahteraan Hewan Uji	PUSVETMA	1	Unit	100,00%
Fasilitasi Sarana Laboratorium Kesmavet	BPMSPH Bogor	1	Unit	100,00%
Rata-rata				97,83%





Pemanfaatan fasilitas unit penanganan mutu yang belum mencapai 100% disebabkan oleh adanya perbedaan selisih harga, antara perencanaan dan realisasi sehingga terdapat beberapa fasilitas yang belum lengkap sesuai rencana.

Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan sesuai permintaan dan pengajuan proposal dari dinas provinsi, kelompok, dan lab. veteriner;
- b. Penerima bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan pada Direktorat Pakan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku KPA;
- c. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap parameter evaluasi kegiatan pemanfaatan sarana kesehatan hewan/ alat dan bahan laboratorium veteriner;
- d. Adanya koordinasi yang optimal antara satker provinsi, kabupaten/kota dengan pusat, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- e. Penguatan kapasitas dan bimbingan teknis terkait:
 - 1) Peningkatan sistem mutu laboratorium
 - 2) Penggunaan peralatan pengujian laboratorium;
 - 3) Pakan olahan;
 - 4) Kesmavet.

3. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Produksi Pertanian Pra Tanam (Pupuk, Pestisida Dan Alsintan)

Kemanfaatan fasilitas sarana produksi pertanian pra tanam dihitung melalui rata-rata tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida serta tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian. Sarana pertanian yang dimaksud meliputi alat dan mesin pertanian (pra panen) serta pupuk dan pestisida.

Perhitungan tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian pra tanam berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut:

$$x = \left(\frac{a + b}{2} \right)$$

Keterangan :

- x = Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian pra tanam
- a = Identifikasi tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida
- b = Identifikasi tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen

Perhitungan tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida diperoleh sebesar 100%, dan tingkat kemanfaatan alsintan sebesar 90,23% sehingga tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian pra tanam (pupuk, pestisida dan alsintan) diperoleh sebesar 95,12%, dengan perhitungan:





tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian pra tanam:

$$= \left(\frac{100 + 90,23}{2} \right)$$

$$= 95,12\%$$

Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian pra tanam pada tahun 2024 sebesar 95,12% yang berarti distribusi pupuk dan pestisida serta fasilitasi bantuan alat dan mesin pertanian memberikan manfaat sebesar 95,12% dalam rangka pelaksanaan usahatani. Realisasi sebesar 95,12% meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 91,78%.

Kegiatan yang mendukung capaian tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian (pupuk, pestisida dan alsintan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemanfaatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida diukur melalui identifikasi dengan metode survey dengan sampling baik secara langsung dan tidak langsung terhadap penerima manfaat (petani/poktan/gapoktan). Hal ini dikarenakan jumlah penerima bantuan yang banyak dengan jangkauan wilayah yang luas sementara sumberdaya manusia/petugas terbatas. Pupuk dan Pestisida dimaksud meliputi Pupuk Subsidi (A) dan Dolomit (B).

Penentuan jumlah sampel/responden tingkat kemanfaatan pupuk dan pestisida dihitung dengan menggunakan metode Slovin dengan tingkat margin error 5%. Pengukuran sampel ini dilakukan pada tiap-tiap jenis kegiatan direktorat pupuk dan pestisida. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 790 unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39. Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida

No	Jenis Bantuan Pukpes	N	e	$N \times e^2$	$1 + (N \times e^2)$	n
A	Pupuk Subsidi	10.370.021	5%	25.925	400	400
B	Dolomit	14.009	5%	35	389	390
Total		10.384.026	5%	29.960		

Sedangkan tingkat kemanfaatan per jenis bantuan pupuk dan pestisida dihitung dengan rumus :

$$\left(\frac{X}{n} \right) \times 100\%$$

dimana :

x = Jumlah sampel pupuk dan pestisida yang dimanfaatkan

n = Jumlah sampel pupuk dan pestisida





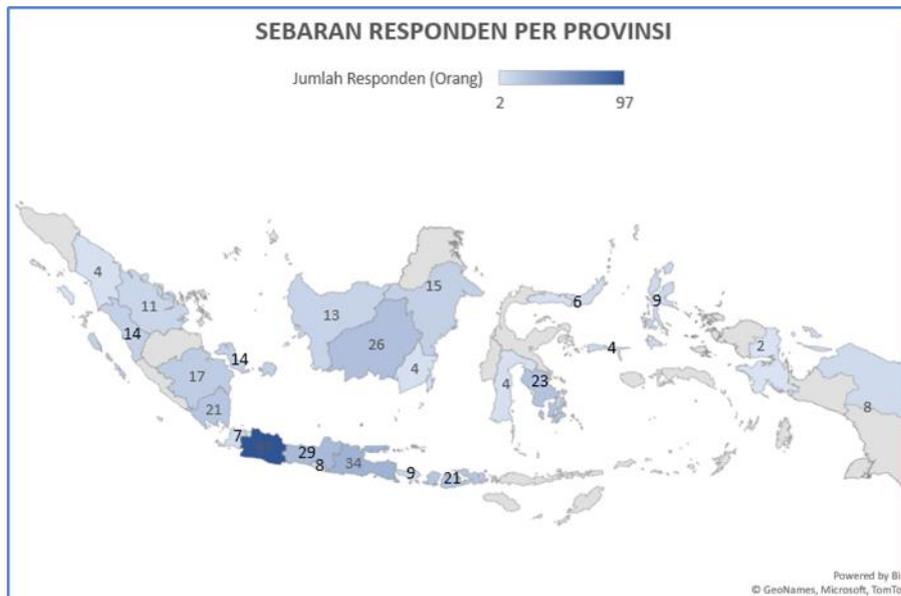
Tabel 40. Identifikasi Indikator Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida

No.	Jenis Sampel	Populasi	Σ Pukpes Sampel	Realisasi
1	Pupuk Bersubsidi	10.370.021	400	100
2	Dolomit	14.009	390	100

Maka dari hasil survei tersebut dapat diperoleh pupuk dan pestisida yang telah dimanfaatkan oleh petani.

$$= \left(\frac{X}{n}\right) \times 100\% = \left(\frac{100 + 100}{2}\right) \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Populasi kegiatan pupuk subsidi adalah jumlah petani yang melakukan penebusan pupuk subsidi selama tahun 2024 sebanyak 10.370.021 orang. Berdasarkan perhitungan dengan metode slovin, diperoleh jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 400 orang. Setelah dilakukan survey, responden yang diambil tersebar di 24 provinsi sebagaimana bagan berikut :



Gambar 18. Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Subsidi

Responden paling banyak di Provinsi Jawa Barat sebanyak 97 orang dan responden paling sedikit di Provinsi Papua Barat sebanyak 2 orang. Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sebanyak 400 orang sudah memanfaatkan pupuk subsidi untuk lahan pertaniannya, sehingga realisasinya sebesar 100%.

Populasi kegiatan penyediaan dolomit untuk mendukung upaya khusus percepatan peningkatan produksi tanaman pangan adalah jumlah perwakilan petani di masing-masing poktan penerima bantuan sebanyak 14.009 orang. Berdasarkan perhitungan dengan metode slovin, diperoleh jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 389 orang. Setelah dilakukan survey, responden yang diambil tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sebanyak 390





orang sudah memanfaatkan dolomit untuk lahan kegiatan olah (optimasi lahan), sehingga realisasinya sebesar 100%.

b. Kemanfaatan Alsintan

Dalam proses produksi pertanian, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai berhasil meningkatkan produksi pertanian dan sekaligus mengontrol perekonomian masyarakat. Alsintan merupakan salah satu elemen penting untuk mendorong sektor pertanian semakin maju, mandiri dan modern. Alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.

Kemanfaatan Alsintan dihitung berdasarkan alsintan pra panen yang membantu dalam proses budidaya pertanian. Pemanfaatan alsintan menilai pemanfaatan bantuan alsintan yang diberikan Kementerian Pertanian kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Brigade yang sudah didistribusikan dapat digunakan dengan tepat guna oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Brigade untuk mendukung produksi komoditas strategis pertanian nasional. Tingkat kemanfaatan alsintan dirumuskan melalui perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Kemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan

a : Jumlah alat dan mesin pertanian yang dimanfaatkan (unit)

b : Jumlah sampel alat dan mesin pertanian (unit)

Data variabel (a) diperoleh melalui survei secara langsung atau tidak langsung (online) terhadap penerima manfaat (poktan/gapoktan/UPJA/Brigade) (t-1), sedangkan data variabel (b) diperoleh melalui perhitungan menggunakan metode Slovin dengan tingkat margin error 5%-10%.

Perhitungan tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian dilakukan dengan menggunakan metode sampling. Hal ini disebabkan oleh bantuan alat dan mesin pertanian yang banyak dengan jangkauan wilayah yang sangat luas sementara waktu, sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Data yang digunakan untuk pengukuran tingkat pemanfaatan adalah data bantuan alsintan T-1 (tahun 2023) sebanyak 23.081 unit. Dari data tersebut dilakukan penghitungan menggunakan rumus Slovin dengan margin

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)} \quad \text{sebagai berikut.}$$

N = jumlah populasi

e = tingkat margin error yang digunakan





Pengukuran tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian pra tanam dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$= \frac{\sum a_i}{b}$$

Dimana:

$\sum a_i$: Jumlah tingkat kemanfaatan per jenis alsintan pra panen (%)

b : Jumlah jenis alsintan pra panen (unit)

Tingkat kemanfaatan alsintan menghitung kemanfaatan pada 6 jenis alsintan pra tanam yang terdiri dari hand sprayer, cultivator, pompa air, traktor roda 2, traktor roda 4, dan kendaraan roda 3. Dari setiap jenis alsintan, masih terdapat alsintan yang belum digunakan hingga proses pengambilan data dilakukan, seperti rincian yang terdapat pada tabel 41.

Tabel 41. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian

No	Jenis Alsintan	Volume 2023 (unit)	Sampel (unit)	IKU TW IV				% terhadap IKU Tahunan
				Realisasi Sampel (unit)	Persentase Sampel (%)	Sudah	Belum	
1	HAND SPRAYER	10,266	385	385	100.00	348	37	90.39
2	CULTIVATOR	2,775	350	350	100.00	314	36	89.71
3	POMPA AIR	2,888	351	351	100.00	302	49	86.04
4	TRAKTOR RODA 2	5,504	373	373	100.00	324	49	86.86
5	TRAKTOR RODA 4	1,076	292	292	100.00	268	24	91.78
6	KENDARAAN RODA 3	572	235	235	100.00	227	8	96.60
	Jumlah	23,081	1,986	1,986	100.00	1,783	203	541.38
	Rata-rata							90.23

Berdasarkan perhitungan, tingkat kemanfaatan asintan pra tanam pada tahun 2024 sebesar 90,23% yang berarti sebesar 90,23% alsintan yang telah didistribusikan telah dimanfaatkan oleh responden. Hal perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga alat dan mesin pertanian lebih tepat sasaran dan bermanfaat serta berkontribusi terhadap upaya peningkatan produksi pertanian.





Gambar 19. Pemanfaatan Pompa Air Bantuan TA. 2023 di Gapoktan Ngadirejo Desa Ngadirejo





SASARAN STRATEGIS 2 (SS 2) Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pertanian

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas pertanian telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti komoditas perkebunan. Pada sisi lain, Kementerian Pertanian juga telah berupaya untuk menekan laju pertumbuhan impor melalui peningkatan produksi komoditas substitusi impor. Demikian pula dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari suatu produk pertanian, Kementerian Pertanian mendistribusikan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu Kementerian Pertanian melakukan upaya untuk memperkuat penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian serta berupaya meningkatkan ekspor komoditas pertanian prospektif. Upaya dimaksud diwujudkan melalui kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan industri pertanian yang didukung pengembangan mesin-mesin industri pertanian tepat guna untuk menunjang pengembangan agroindustri pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan kesehatan hewan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor produk pertanian Indonesia menunjukkan tren positif dengan meningkatnya permintaan terhadap komoditas hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Namun, tantangan seperti ketergantungan terhadap bahan baku impor untuk sektor pengolahan dan fluktuasi harga komoditas global tetap menjadi perhatian. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengembangkan program diversifikasi pangan, mendorong penggunaan teknologi pertanian presisi, serta memperkuat sinergi antara sektor pertanian dan industri pengolahan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan (2) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional.





SS 2. IKU 7 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	
Target 91,19%	Realisasi 93,07%
% Capaian 102,06% Sangat Berhasil	

Salah satu ciri pertanian modern adalah pemanfaatan alat dan mesin dalam sistem usahatani baik pada saat budidaya maupun pasca panen dan pengolahan hasil. Dengan mekanisasi, pertama kita dapat melaksanakan pengolahan lahan, panen dan pasca panen dengan cepat. Kedua, lebih efisien, kebutuhan ongkos (*cost production*) lebih rendah dibandingkan secara tradisional. Ketiga, menekan kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah, Keempat, meningkatkan pendapatan. Mekanisasi pertanian memberikan kontribusi untuk menurunkan biaya produksi, meningkatnya hasil dan menurunnya susut hasil, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan usaha tani. Namun pada dasarnya, keempat posisi strategis mekanisasi itu menuntut prasyarat kelengkapan dan kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pertanian di Eselon I yang melaksanakan fasilitasi sarana pertanian, yaitu Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen Peternakan&Kesehatan Hewan, atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian})}{\sum \text{Eselon I yang melaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian}}$$

Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk hingga pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Kemudian pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan pun harus dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan kepada penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan pertanian. Sampel sarana pascapanen dan pengolahan tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia.





Berdasarkan cara pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian berdasarkan, maka capaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian adalah:

$$= \frac{86,24+94,55+100+91,48}{4}$$
$$= 93,07$$

Capaian tingkat kemanfaatan sarana pertanian adalah sebesar 93,07% atau terealisasi sebesar 102,06% dengan kriteria sangat berhasil. Capaian ini meningkat 2,06% jika dibandingkan tahun lalu sebesar 91,19%. Lebih signifikan lagi capaian tahun 2024 ini telah melampaui target jangka menengah sebesar 86,90%, dengan realisasi mencapai 107,10%, menegaskan komitmen dan efektivitas dalam pengelolaan sarana pertanian.

Sarana pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian meliputi sarana pasca panen dan pengolahan hasil sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan& kesehatan hewan. Rincian jumlah alsintan, jumlah sampel, dan tingkat kemanfaatan sarana pertanian tahun 2024 terlihat pada tabel 42.

Tabel 42. Jumlah Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tahun 2024

Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel (Unit/Kelompok)	Sarana Pertanian Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Sub Sektor Tanaman Pangan				86,24%
Sarana Pascapanen dan pengolahan hasil	4.581	1.577	1.360	86,24%
Sub Sektor Hortikultura				94,55%
Sarana pascapanen	164	55	53	96,36%
Sarana Pengolahan	164	55	51	92,73%
Sub Sektor Perkebunan				91,48%
Sarana pascapanen	85	37	34	93,24%
Sarana pengolahan	165	68	61	89,71%
Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan				100%
Sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	17	17	17	100%
Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	18	18	18	100%
Total Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian				93,07%

Keberhasilan pencapaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian didukung oleh kemanfaatan dari fasilitasi sarana pertanian, yaitu sebagai berikut:





1. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan merupakan stimulan penerapan pascapanen yang baik dan benar, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas. Pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan harus dilaporkan dalam bentuk pembuatan laporan pemanfaatan. Sehingga, kegiatan tersebut dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Analisa kemanfaatan alsintan dilakukan dengan menggunakan kuesioner online aplikasi google form. Responden tersebut diambil dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia untuk bantuan combine harvester besar. Bantuan combine harvester besar tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20. Combine Harvester Besar Bantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2024

Sebaran sampel alsintan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 43.

Tabel 43. Sebaran Sampel Alsintan Pada Kuesioner Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen Tahun 2024

No	Jenis Sarana Pascapanen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Alat dan Mesin Pasca Panen	5.179	7.572	4.511	3.060	1.407
1	Combine Harvester Kecil	141	25	0	10	0
2	Combine Harvester Sedang	180	58	5	5	0
3	Combine Harvester Besar	311	12	398	1.165	1.400
4	Corn Combine Harvester Sedang	35	0	0	0	0
5	Corn Combine Harvester Besar	35	10	0	0	0
6	Combine Harvester Multifungsi	169	212	7	0	0
7	Power Thresher	1.681	2.866	1.448	707	0
8	Corn Sheller	1.060	1.854	1.224	354	0
9	Corn Sheller Mobile	405	420	172	84	0
10	Power Thresher Multiguna/Kedelai	334	1.515	741	517	0
11	Power Thresher Multiguna Mobile	713	357	352	137	0
12	Vertical Dryer Padi Kap 6 Ton	10	4	1	0	0
13	Vertical Dryer Padi Kap. 10 Ton	15	47	48	8	7
14	Vertical Dryer Padi Kap. 10 Ton Stainless	0	0	0	27	0





No	Jenis Sarana Pascapanen	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
15	Vertical Dryer Padi Kap. 30 Ton	0	0	0	14	0
16	Vertical Dryer Jagung 10 Ton	2	3	1	0	0
17	Dryer UV	20	59	0	0	0
18	Dryer Mobile	1	0	32	10	0
19	RMU	35	57	15	15	0
20	RMU Pneumatic	3	0	3	0	0
21	RMP	0	0	0	2	0
22	Packing grading	13	3	0	0	0
23	Color Sorter	6	15	3	5	0
24	Husker dan Polisher	10	55	61	0	0
B	Alat Pengolahan Hasil	121	141	156	114	0
1	UPH Jagung	41	53	59	44	0
2	UPH Kedelai	49	43	45	26	0
3	UPH Tanaman Pangan Lainnya	31	45	52	44	0

Sampel untuk kuesioner tingkat kemanfaatan alsintan pasca panen diperoleh sebanyak 1.577 responden atau 34,42% dari total 4.581 unit (bantuan 2023 dan 2024) yang tersebar di 34 provinsi. Berdasarkan hasil analisis, alsintan pascapanen yang telah dimanfaatkan sebanyak 1.360 unit, sehingga indeks kemanfaatan sarana pascapanen tanaman pangan tahun 2024 mencapai 86,24%. Sebaran sampel dan hasil tingkat kemanfaatan disajikan pada **Lampiran 8**.

Pemanfaatan alsintan pascapanen berperan dalam mendukung penyelamatan produksi. Sebanyak 1.360 unit combine harvester besar yang dimanfaatkan telah diperkirakan berkontribusi terhadap penyelamatan produksi padi nasional, yaitu mencapai 0,18% berdasarkan angka tetap KSA BPS per 3 Februari 2025. Kontribusi ini setara dengan 94.673 ton padi dengan nilai ekonomi sekitar Rp 568,04 miliar.

Keberhasilan pencapaian tingkat kemanfaatan sarana Pasca Panen dan pengolahan didukung oleh:

- Verifikasi CPCL penerima sarana pascapanen diperlukan untuk kepastian pemanfaatan.
- Spesifikasi sarana pascapanen disesuaikan dengan karakteristik wilayah kerja sarana tersebut.
- Pelatihan dan bimbingan teknis dapat memastikan pemanfaatan sarana secara optimal.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- Proses administrasi distribusi sarana pascapanen yang lama akan mengakibatkan pemanfaatan terhambat.
- Pemanfaatan sarana pascapanen menunggu musim panen.
- Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota terlambat menyampaikan laporan pemanfaatan.

Beberapa upaya perbaikan yang diberikan atas kendala tersebut antara lain:

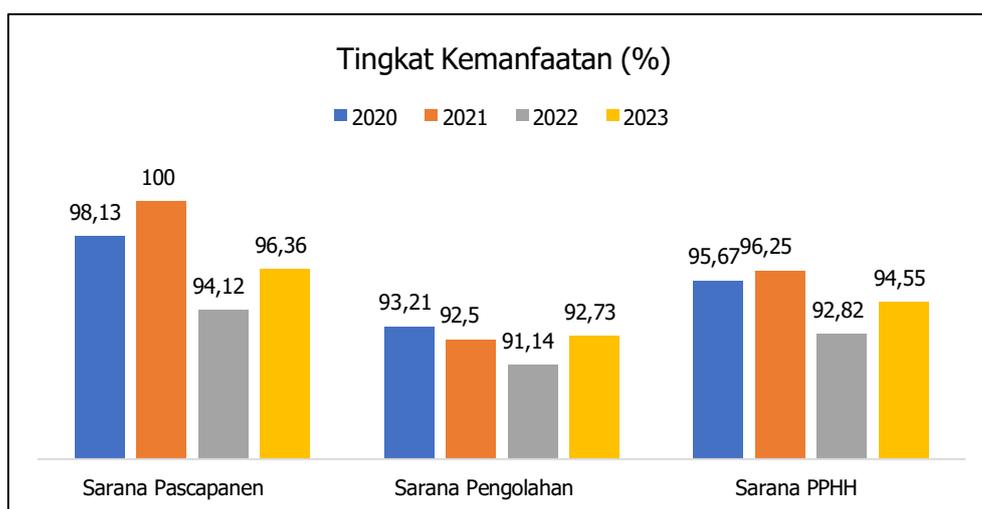
- Proses percepatan distribusi sarana pascapanen yang sesuai dengan SOP.
- Distribusi sarana pascapanen disesuaikan dengan musim panen pada wilayah penerima bantuan.





2. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Tingkat kemanfaatan sarana hortikultura diukur berdasarkan hasil survei secara *online* menggunakan kuesioner digital berbasis webform dengan responden kelompok tani penerima fasilitas bantuan penumbuhan UMKM yang terdiri dari sarana paspanen dan pengolahan hortikultura yang disalurkan pada TA 2023. Dalam survei tersebut terdapat dua kriteria yang bisa dipilih oleh responden terkait pemanfaatan sarana yang diterima yaitu a) masih dimanfaatkan sampai dengan saat survei dilaksanakan, b) belum dimanfaatkan. Berdasarkan hasil survei, diperoleh hasil tingkat kemanfaatan adalah sebesar 94,55% dengan rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 96,36% dan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 92,73% seperti terlihat pada gambar 21.



Gambar 21. Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2020-2023

Berdasarkan data kelompok penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan tahun 2023, terdapat 164 kelompok yang menerima 1 (satu) paket bantuan lengkap berupa sarana pascapanen dan pengolahan sebagai bagian dari kegiatan penumbuhan UMKM Hortikultura. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling menyebarkan kuesioner ke seluruh dinas dan kelompok tani penerima bantuan sarana prasarana pascapanen. Berdasarkan Manual IKU yang telah dibuat, jumlah minimum responden yang di Survei adalah 10% dari total penerima bantuan sarana atau sebesar 16-17 kelompok dari 164 kelompok. Selain mengukur tingkat kemanfaatan, dalam survei juga dilakukan evaluasi beberapa parameter yang mempengaruhi tingkat kemanfaatan sarana yang diberikan yaitu a) tingkat kesesuaian sarana dengan kebutuhan kelompok, dan b) tingkat kualitas sarana yang diberikan.

Pada tahun 2023, kelompok tani yang ditargetkan menjadi UMKM Hortikultura menerima paket lengkap sarana pascapanen dan pengolahan untuk meningkatkan daya saing produk hortikultura, baik segar maupun olahan. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas kelompok penerima bantuan telah berhasil memproduksi hortikultura olahan,





seperti abon cabai, serbuk cabai, bawang goreng, minyak bawang, keripik buah, dan selai. Diversifikasi ini membuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus menjadi strategi menghadapi fluktuasi harga akibat overproduksi.

Penggunaan sarana pengolahan juga berdampak positif pada daya saing produk, terutama melalui pengemasan yang lebih menarik dan meningkatkan minat pembeli. Selain memperpanjang umur simpan, produk kini dikemas dengan bahan berkualitas seperti standing pouch, aluminium foil, dan botol. Sebagian besar produk telah melalui proses branding, serta mendapatkan sertifikasi dari Dinas Kesehatan, BPOM, dan sertifikasi halal. Dibandingkan survei sebelumnya, kinerja produk olahan dari bantuan tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga akhir tahun 2024.

3. Fasilitasi Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Produk Perkebunan

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk perkebunan, Kementerian Pertanian mendistribusikan sarana pascapanen dan pengolahan kepada poktan/gapoktan sebagai bagian dari transformasi pertanian modern yang mutlak diperlukan. Penggunaan alat dan mesin pertanian dalam proses produksi diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk, sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani. Selain itu, pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan juga harus dapat diukur dan dievaluasi, agar menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk memastikan efektivitas dan tingkat kemanfaatan bantuan tersebut, dilakukan pengukuran melalui survei yang mencakup dua metode, yaitu survei langsung di lapangan dengan pengisian kuesioner oleh penerima manfaat serta survei online menggunakan kuesioner digital. Sampel yang diukur berasal dari bantuan tahun 2023 (t-1) dengan cakupan minimal 25% dari total unit bantuan, yang dipilih dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia.

Pada tahun 2024, pengukuran tingkat kemanfaatan mencakup sarana pascapanen, seperti *pulper*, *huller*, *solar dryer portable*, kotak fermentasi, mesin pengupas pinang, mesin pengupas sabut kelapa, mesin pengering kelor, dan *solar dryer dome*. Sementara itu, untuk sarana pengolahan, alat yang dinilai mencakup mesin pengolahan kopi, sereh wangi, dan kelapa. Melalui pengukuran ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas bantuan serta perbaikan yang diperlukan untuk optimalisasi manfaat di masa mendatang. Secara rinci rekapitulasi jumlah sarana pascapanen dan pengolahan yang dimanfaatkan dapat dilihat pada tabel 44.





Tabel 44. Rekapitulasi Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

No	Indikator Kinerja	Jumlah Sarana Tahun 2023 (unit)	Jumlah Sampel (Unit)	Jumlah Sarana Dimanfaatkan (unit)	Jumlah Sarana yang Masih Operasional (unit)	Realisasi Tingkat Kemanfaatan (%)
1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen	85	37	34	35	93,24
2	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan	165	68	61	61	89,71
Total		250	105	95	96	91,48

Berdasarkan Tabel 40, dari 105 unit sarana pascapanen dan pengolahan yang disurvei, 95 unit dimanfaatkan dan 96 unit masih operasional.

a. Kemanfaatan Sarana Pascapanen

Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen perkebunan mencapai 107,62% dari target 85%. Dari 85 unit bantuan tahun 2023, diambil sampel 37 unit, dengan 34 unit dimanfaatkan dan 35 unit masih operasional. Sarana yang diukur meliputi *pulper*, *huller*, *solar dryer portable*, kotak fermentasi, dan *solar dryer dome*. Kendala utama sehingga sarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal antara lain karena biji pinang tidak terkelupas dengan baik dan biji ada yang hancur sehingga mesin pengupas biji pinang tidak dimanfaatkan serta beberapa mesin rusak.

b. Kemanfaatan Sarana Pengolahan

Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan mencapai 105,54% dari target 85%. Dari 165 unit yang didistribusikan ke 44 kelompok tani, diambil sampel 68 unit, dengan 7 unit tidak dimanfaatkan dan tidak operasional. Sarana yang diukur meliputi mesin pengolahan kopi, kelapa, dan serai wangi. Kendala utama sehingga sarana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal antara lain karena mesin roasting, grinder, dan sealer kekurangan bahan baku serta beberapa mesin rusak sehingga tidak dapat digunakan

Disamping itu, kemajuan pengembangan produk perkebunan (kopi dan kelapa) saat ini dapat terwujud melalui fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan yang diberikan ke kelompok tani penerima bantuan. Dari fasilitasi tersebut dapat dihasilkan produk-produk hasil perkebunan yang dapat dipasarkan di pasar-pasar lokal, bahkan beberapa ada yang produknya sudah diekspor dan mengikuti pameran-pameran produk hasil perkebunan. Penjualan produk juga melalui *market place* (shopee, tokopedia). Selain itu, dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan Ditjen Perkebunan juga melakukan pembinaan dan pendampingan serta bimbingan teknis dalam peningkatan mutu produk hasil perkebunan.





Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan diberikan berdasarkan proposal dari kelompok tani melalui dinas kabupaten/provinsi sesuai dengan alat dan mesin yang dibutuhkan oleh kelompok tani. Untuk Kopi adalah: *Pulper, huller, solar dryer portable, Roasting, Grinder dan Sealer*, seperti contoh sarana pascapanen kopi yang ditunjukkan pada gambar 22. Contoh lainnya yaitu, fasilitasi pascapanen kelapa berupa *solar dryer* untuk pengeringan kelapa menjadi kopra dan sarana pengolahan kelapa berupa pengolahan minyak kelapa seperti yang ditunjukkan pada gambar 22.



Gambar 22. Bantuan Sarana Pacapanen Kopi kepada Kelompok tani Mitra Tani, Kab Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu



Gambar 23. Bantuan Solar *Dryer Portable* kepada Kelompok Tani Karya Maju, Kab.Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

- Keberhasilan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :
- Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh kelompok tani sebagai penerima manfaat melalui proposal dan hasil verifikasi CPCL
 - Kelompok tani sebagai penerima manfaat bantuan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CPCL yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten atau PPK pusat





- c. Koordinasi yang optimal antara satker pusat, provinsi dan kabupaten terkait dengan pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik
- d. Adanya keinginan kuat dari kelompok tani sebagai penerima manfaat untuk maju dalam hal meningkatkan mutu produk yang dihasilkan sebelum mendapatkan bantuan menjadi produk yang bermutu dan mempunyai nilai tambah serta nilai jual yang tinggi

4. Fasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan maka dilakukan sensus terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya. Data tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan diperoleh berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh pembina daerah dan penerima manfaat. Jenis sarana prasarana dan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dapat dilihat pada tabel 45.

Tabel 45. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah yang disalurkan	Jumlah Sampel (unit)	Jumlah yang Termanfaatkan (unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	17	17	17	100
Sarana Pengolahan Telur	1	1	1	100
Sarana Pengolahan Susu	3	3	3	100
Sarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	4	4	4	100
Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	4	4	4	100
Sarana Pasar Ternak	4	4	4	100
Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	1	1	100
Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	18	18	18	100
Prasarana Pengolahan Telur	1	1	1	100
Prasarana Pengolahan Susu	2	2	2	100
Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	4	4	4	100
Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	4	4	4	100
Prasarana Pasar Ternak	4	4	4	100
Prasarana Tata Niaga	2	2	2	100
Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	1	1	1	100
Jumlah	35	35	35	100
Rata-Rata Tingkat Kemanfaatan				100

Sumber: Ditjen PKH, 2024

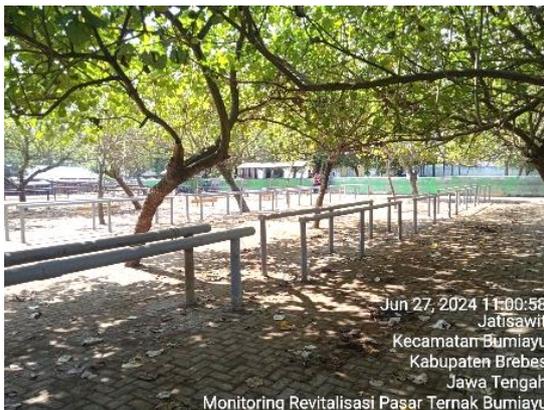




Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan serta pemasaran hasil peternakan. Pada tahun 2023 (T-1), bantuan yang disalurkan berjumlah 35 unit, terdiri dari 17 unit sarana dan 18 unit prasarana. Seluruh fasilitas yang telah diberikan tersebut telah dimanfaatkan secara optimal dengan tingkat pemanfaatan mencapai 100%. Kegiatan ini menunjukkan bahwa fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan serta pemasaran hasil peternakan telah berjalan dengan efektif. Dengan tingkat pemanfaatan yang mencapai 100%, bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan, memperluas akses pasar, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.

Keberhasilan kinerja tingkat kemanfaatan sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Ketepatan pemilihan lokasi penerima sarpras pada saat CP/CL;
- 2) Ketepatan jenis dan spesifikasi sarpras dengan kebutuhan penerima, yang sebelumnya dilakukan pada saat RKP (Rencana Kebutuhan Penerima);
- 3) Komitmen penerima manfaat dalam memanfaatkan sarpras yang telah diberikan;
- 4) Kondisi sarana prasarana (kondisi baik dan tidak rusak);
- 5) Tingkat pemahaman dan keterampilan personil yang mengoperasikan sarana pengolahan;
- 6) Bimbingan teknis penggunaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan



Gambar 24. Fasilitasi Prasarana Pengoalahan dan Pemasaran di Pasar Ternak Bumi Ayu Brebes





SS 2. IKU 8	
Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional	
Target 6,53%	Realisasi 15,44%
% Capaian 120%	
Sangat Berhasil	
*) capaian sebesar 283% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Nilai ekspor produk pertanian utama terdiri dari nilai ekspor 41 (tiga puluh sembilan) komoditas dari empat subsektor yaitu, yaitu subsektor tanaman pangan (padi/beras, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, porang), subsektor hortikultura (mangga, manggis, pisang, durian, nanas, salak, jahe, krisan, kentang, jamur, cabai, bawang merah), subsektor perkebunan (Kelapa, karet, sawit, kopi, teh, lada, kakao, cengkeh, vanili, pala, jambu mete, nilam, tembakau, sagu) dan sub sektor peternakan (Hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, benih dan bibit ternak). Pertumbuhan nilai ekspor diukur dalam nilai persentase dengan membandingkan jumlah pertumbuhan nilai ekspor pertanian dengan jumlah komoditas ekspor pertanian atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional})}{\sum(\text{komoditas ekspor pertanian})}$$

Dimana:

Pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian (%):

$$\left(\frac{\text{Nilai ekspor komoditas tahun ke } t - \text{Nilai ekspor komoditas tahun ke } (t - 1)}{\text{nilai ekspor komoditas tahun ke } (t - 1)} \right)$$

Target kinerja pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian utama tahun 2024 adalah sebesar 6,53%, sedangkan realisasinya mencapai 18,48%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 236,45% dan menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat.

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 12,28%, capaian Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional tahun 2024 telah melampaui target, yaitu mencapai 150,49% atau berarti 120%, untuk mengurangi menghindari bias capaian kinerja. Konsisten peningkatan daya saing komoditas perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan nilai ekspor komoditas pertanian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor. Akselerasi program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan nilai tambah produk untuk meningkatkan daya saing menjadi fokus untuk meningkatkan ekspor, juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mulai dari aspek hulu hingga hilir. Secara rinci nilai ekspor





dan pertumbuhan nilai ekspor tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 46.

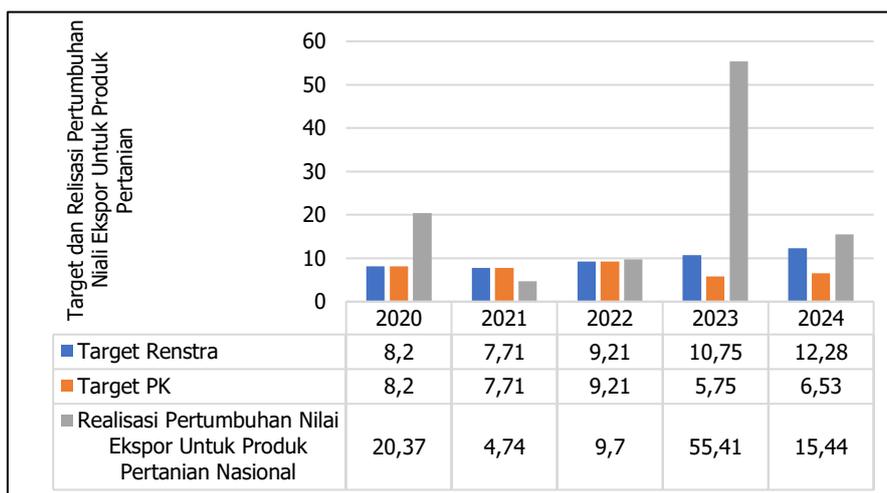
Tabel 46. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2019-2024

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 USD)						2024-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Padi/Beras	1.192	1.431	3.036	2.433	2.492	1.783	-28,43
2	Kacang Tanah	12.170	14.761	13.787	15.527	11.264	10.972	-2,59
3	Ubi Jalar	8.918	10.033	11.309	12.121	12.978	11.826	-8,87
4	Jagung	15.481	36.136	36.957	81.782	68.634	55.490	-19,15
5	kedelai	22.000	23.066	27.915	31.313	28.278	29.578	4,60
6	ubi kayu (olahan)	9.439	40.936	124.362	9.099	90.693	15.725	-82,66
7	kacang hijau	36.730	52.422	42.293	25.833	38.917	49.044	26,02
8	porang	10.191	23.109	10.791	8.278	1.390	1.149	-17,29
9	Mangga	1.742	1.172	758	558	1.397	1.751	25,30
10	Nenas	203.819	274.126	336.889	331.696	277.954	316.085	13,72
11	Manggis	42.619	81.151	71.562	75.578	111.951	146.177	30,57
12	Salak	1.891	1.297	1.781	3.055	4.171	4.333	3,88
13	Pisang	11.344	5.650	6.090	8.588	9.567	10.522	9,99
14	Krisan	700	733	904	1.220	1.510	2.506	65,99
15	Kentang	6.051	8.111	5.961	4.820	2.668	2.662	-0,24
16	Jamur	4.625	4.882	5.053	5.729	11.299	8.985	-20,48
17	Jahe	4.933	4.440	3.563	5.449	28.400	8.509	-70,04
18	Durian	301	232	149	181	1.076	1.817	68,92
19	Bawang Merah	10.586	13.741	7.097	4.180	11.786	18.716	58,80
20	Cabai	14.824	25.079	22.404	19.003	22.007	22.939	4,23
21	Lada	147.343	160.388	166.751	146.662	114.539	311.278	171,76
22	Pala	138.024	158.420	198.114	185.317	173.673	169.300	-2,52
23	Cengkeh	111.537	176.540	96.054	56.623	99.606	324.938	226,22
24	Jambu Mete	182.675	149.748	114.910	275.031	62.260	151.157	142,78
25	Kopi	883.123	821.932	858.558	1.148.383	929.009	1.638.116	76,33
26	Kelapa Sawit	16.801.686	19.707.894	30.337.660	31.459.726	25.611.073	22.861.108	-10,74
27	karet	3.654.931	3.246.592	4.122.650	3.650.667	2.551.798	3.008.617	17,90
28	kakao	1.198.735	1.244.184	1.206.775	1.259.655	1.197.695	2.618.592	118,64
29	Kelapa	890.810	1.171.840	1.650.422	1.715.645	1.314.430	1.642.025	24,92
30	Teh	92.347	96.323	89.158	89.902	69.014	52.852	-23,42
31	Nilam	116.055	113.834	135.141	166.385	205.909	321.218	56,00
32	Tembakau	201.976	195.919	213.408	266.026	218.793	227.479	3,97
33	Vanili	69.610	60.248	39.930	22.954	15.157	13.158	-13,19
34	Sagu	3.277	2.861	2.467	4.114	13.786	4.096	-70,29
35	Kayu Manis	133.734	151.292	160.688	130.799	99.704	112.245	12,58
36	Tebu	122	37	20	21	39	-	-100,00
37	Obat Hewan	179.626	136.322	172.856	162.592	87.673	65.673	-25,09
38	Hewan Hidup	65.904	80.416	61.863	63.934	27.184	5.414	-80,08
39	Hasil Ternak	646.978	883.136	894.873	1.014.915	1.063.664	1.074.988	1,06
40	Produk hewan non pangan	141.183	139.391	175.819	193.294	198.475	205.151	3,36
41	Benih dan bibit ternak.	2.196	1.548	1.057	1.974	2.156	3.030	40,52
Total		25.947.573	29.170.043	41.271.128	42.530.242	34.694.327	35.531.006	2,09
		Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2023-2024						15,44

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel 46, Total nilai ekspor pertanian dari 41 komoditas pada tahun 2024 senilai US\$35,53 Miliar meningkat jika dibandingkan dengan nilai ekspor 41 komoditas pertanian tahun 2023 yang mencapai US\$34,7 Miliar. Kontribusi pertumbuhan nilai ekspor masih didominasi oleh komoditas perkebunan dan hortikultura, sedangkan komoditas tanaman pangan dan peternakan rata-rata mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian tahun 2020-2024 mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada gambar 25.





Sumber: BPS, 2025, diolah Pusdatin (angka tetap)

Gambar 25. Target dan Perkembangan Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Ekspor Tahun 2020-2024

Secara umum nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia mengalami peningkatan, meskipun nilai pertumbuhannya mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2020-2024. Rata-rata pertumbuhan komoditas pertanian dari 41 komoditas mampu tumbuh di atas 10 poin bahkan pada tahun 2023 rata-rata pertumbuhannya mencapai 55.41%. Pertumbuhan nilai ekspor juga melampaui target jangka menengah dengan target 12,28% yang berarti nilai ekspor komoditas pertanian menunjukkan kinerja yang baik.

Rata-rata pertumbuhan komoditas pertanian tahun 2024 masing-masing subsektor, yaitu: tanaman pangan sebesar -16,05%, komoditas hortikultura sebesar 15,89%, komoditas perkebunan 39,43% dan komoditas peternakan sebesar -12,05%. Pertumbuhan nilai ekspor komoditas pertanian tertinggi dari 41 komoditas yaitu komoditas perkebunan, seperti lada, cengkeh, jambu mete dan kakao, selain itu sebagian komoditas hortikultura seperti krisan, durian dan bawang merah.

Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional tidak terlepas dari upaya peningkatan ekspor komoditas pertanian melalui berbagai kegiatan pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dan kesehatan hewan. Pertumbuhan nilai ekspor komoditas perkebunan masih menjadi penopang pertumbuhan ekspor komoditas pertanian meskipun beberapa komoditas sub sektor lainnya juga mengalami peningkatan. Upaya peningkatan nilai ekspor dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, seperti peningkatan kualitas benih, penerapan GAP dan GHP yang sesuai dengan standar negara tujuan ekspor, peningkatan kualitas produk, pengembangan jejaring kemitraan, promosi dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan ekspor komoditas pertanian. Perkembangan dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ekspor pada setiap sub sektor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekspor Komoditas Tanaman Pangan

Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas tanaman pangan tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 16,05% meskipun beberapa komoditas





menyumbang pertumbuhan komoditas pertanian. Perlambatan ini disebabkan adanya beberapa komoditas tanaman pangan yang memiliki nilai ekspor yang menurun cukup signifikan seperti ubi kayu, padi/beras, jagung dan porang. Namun demikian terdapat komoditas yang menunjukkan pertumbuhan positif seperti kedelai, dan kacang hijau. Secara rinci perkembangan nilai ekspor komoditas pertanian tanaman pangan dan pertumbuhannya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 47.

Tabel 47. Perkembangan eskpor Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2023-2024

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 USD)						2024-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Padi/Beras	1.192	1.431	3.036	2.433	2.492	1.783	-28,43
2	Kacang Tanah	12.170	14.761	13.787	15.527	11.264	10.972	-2,59
3	Ubi Jalar	8.918	10.033	11.309	12.121	12.978	11.826	-8,87
4	Jagung	15.481	36.136	36.957	81.782	68.634	55.490	-19,15
5	kedelai	22.000	23.066	27.915	31.313	28.278	29.578	4,60
6	ubi kayu (olahan)	9.439	40.936	124.362	9.099	90.693	15.725	-82,66
7	kacang hijau	36.730	52.422	42.293	25.833	38.917	49.044	26,02
8	porang	10.191	23.109	10.791	8.278	1.390	1.149	-17,29
Total		116.123	201.893	270.450	186.386	254.644	175.56 9	
Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2023-2024								-16,05

Sumber: BPS, 2025

Penurunan nilai ekspor beberapa komoditas tanaman pangan terjadi cukup signifikan seperti yang ditunjukkan pada tabel 54. Komoditas kedelai dan kacang hijau mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,6% dan 26,02%. Pertumbuhan ini disebabkan karena adanya peningkatan volume ekspor. Peningkatan volume ekspor komoditas kacang hijau juga tergambar dari adanya peningkatan produksi sehingga membuka peluang adanya peningkatan ekspor meskipun secara rata-rata sepanjang tahun 2024 harga kacang hijau di tingkat internasional relatif turun. Secara rinci perkembangan volume dan nilai ekspor komoditas tanaman pangan dapat dilihat pada tabel 48.

Tabel 48. Pertumbuhan Volume dan Nilai Ekspor Tahun 2023 dan 2024

Komoditas	2023		2024		Pertumbuhan	
	Volume (kg)	Nilai (US\$)	Volume (kg)	Nilai (US\$)	Volume (kg)	Nilai (US\$)
Padi	2.623.858,42	2.491.802,44	1.809.494,56	1.783.414,45	-31,04%	-28,43%
Jagung	180.256.610,87	68.633.681,34	145.843.080,19	55.457.909,42	-19,09%	-19,20%
Kacang Tanah	4.237.399,91	11.263.521,35	3.787.510,39	10.972.288,64	-10,62%	-2,59%
Kedelai	20.309.426,97	28.278.025,45	20.760.401,88	29.577.911,37	2,22%	4,60%
Ubi Jalar	14.937.829,77	12.977.862,72	14.569.509,82	11.826.198,01	-2,47%	-8,87%
Ubi Kayu	180.255.621,16	80.370.511,30	24.319.638,06	15.725.108,32	-86,51%	-80,43%
Kacang hijau	36.193.464,82	38.917.011,96	51.846.961,64	49.044.311,62	43,25%	26,02%
Porang	1.395.972,00	1.389.587,21	31.523.950,71	118.444.934,45	2158,21%	8423,75%

Nilai ekspor padi/beras mengalami penurunan lebih disebabkan karena adanya penurunan volume ekspor padi/beras dari 2.623,86 ton padi/beras pada tahun 2023 menjadi 1.809,5 ton padi/beras pada tahun 2024, sedangkan dari sisi harga internasional, rata-rata harga beras sepanjang 2024 relatif stagnan tidak banyak





berfluktuasi. Penurunan volume ekspor disebabkan karena harga domestik yang cukup baik dan lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Komoditas lain yang juga mengalami penurunan nilai ekspor adalah jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Volume ekspor ketiga komoditas ini juga mengalami penurunan namun jagung dan ubi jalar juga diperparah karena adanya penurunan harga di tingkat internasional. Penurunan volume ekspor komoditas tanaman pangan diduga juga disebabkan karena penurunan volume produksi sehingga lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kegiatan pendukung sebagai upaya untuk meningkatkan nilai ekspor komoditas tanaman pangan tahun 2024 antara lain:

- a. Adanya bantuan saprodi untuk padi dan jagung.
- b. Selain beras, komoditas tanaman pangan bukan komoditas LARTAS.
- c. Komoditas porang: ekspor porang khususnya chips porang yang diekspor ke China harus teregister GACC dan Kode HS yang digunakan adalah 1212.99.99.90 CIQ code 110. terdapat 25 perusahaan yang sudah teregister GACC.

Namun demikian, dengan banyaknya komoditas yang mengalami penurunan nilai ekspor baik disebabkan karena adanya penurunan volume maupun harga, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: (1) penurunan produksi komoditas; (2) harga domestik yang relatif tinggi dan turunnya harga tingkat internasional; (3) pemenuhan kebutuhan domestik; (4) tidak memenuhi persyaratan negara tujuan seperti komoditas kacang hijau yang ditemukan residu pestisida untuk tujuan ke China atau Taiwan; dan (5) turunnya harga produk berbahan baku komoditas tanaman pangan seperti harga tapioka global yang turun menyebabkan ekspor bahan baku tapioka (ubi kayu) menurun.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan seperti: (1) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan yang berdaya saing; (2) koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian masalah komoditas yang mengalami gejala seperti ubi kayu; (3) mendorong pelaku usaha untuk ekspor porang lebih tinggi; dan sedang melakukan pengajuan kohe HS untuk porang agar dapat memperoleh kode HS tunggal dan masuk pada BTKI 2027.

2. Ekspor Komoditas Hortikultura

Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas hortikultura menunjukkan adanya peningkatan nilai ekspor yaitu sebesar 15,89%. Kontribusi pertumbuhan nilai ekspor komoditas hortikultura terbesar disumbang oleh komoditas durian yang tumbuh sebesar 68,92%, diikuti oleh krisan tumbuh sebesar 65,99%, bawang merah tumbuh sebesar 58,80%, manggis tumbuh sebesar 30,57% serta komoditas lainnya seperti mangga, nanas, salak, pisang dan cabai. Namun komoditas lainnya ada yang menunjukkan pertumbuhan yang menurun seperti





kentang, jamur, jahe, seperti yang ditunjukkan pada tabel 49.

Tabel 49. Perkembangan ekspor Komoditas Hortikultura

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 USD)						2024-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mangga	1.742	1.172	758	558	1.397	1.751	25,30
2	Nenas	203.819	274.126	336.889	331.696	277.954	316.085	13,72
3	Manggis	42.619	81.151	71.562	75.578	111.951	146.177	30,57
4	Salak	1.891	1.297	1.781	3.055	4.171	4.333	3,88
5	Pisang	11.344	5.650	6.090	8.588	9.567	10.522	9,99
6	Krisan	700	733	904	1.220	1.510	2.506	65,99
7	Kentang	6.051	8.111	5.961	4.820	2.668	2.662	-0,24
8	Jamur	4.625	4.882	5.053	5.729	11.299	8.985	-20,48
9	Jahe	4.933	4.440	3.563	5.449	28.400	8.509	-70,04
10	Durian	301	232	149	181	1.076	1.817	68,92
11	Bawang Merah	10.586	13.741	7.097	4.180	11.786	18.716	58,80
12	Cabai	14.824	25.079	22.404	19.003	22.007	22.939	4,23
Total		303.434	420.614	462.211	460.057	483.786	545.001	
		Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2023-2024						15,89

Sumber: BPS, 2025

Pertumbuhan positif nilai ekspor komoditas hortikultura didukung oleh inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing hortikultura. Beberapa negara tujuan ekspor yang mensyaratkan rumah kemas (*packing house*) yang teregistrasi serta suplai komoditas dari kebun yang teregistrasi.

Kementerian Pertanian terus melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi. Pencapaian ini ditunjang oleh adanya dukungan kegiatan sepanjang tahun 2024 yaitu melakukan berbagai kegiatan promosi produk hortikultura melalui *bussines matching* (Kedutaan – Manhattan hotel, Asia Fruits Logistica - Hongkong, bilateral Indonesia-Singapura), pameran (IKN, Manhattan Hotel, Ritz Carlton, OASE Makasar) dan pembagian produk hortikultura gratis di propinsi DKI, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Jawa Tengah, serta Promosi hortikultura untuk masyarakat umum.

Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang nilai ekspornya menurun pada tahun 2024, yaitu kentang (-0,24%), jamur (-20,48%), dan jahe (-70,04%). Penurunan tersebut diduga disebabkan karena produksi dalam negeri mengalami penurunan serta lebih diutamakan/diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Selain itu, terdapat beberapa kendala lain yang teridentifikasi, yang turut mempengaruhi volume dan nilai ekspor hortikultura diantaranya:

- Permasalahan sistem pasar hulu - hilir (petani - eksportir) yakni: 1) petani/produsen kesulitan menjual produknya, 2) Eksportir kesulitan mendapatkan produk bermutu dari petani, 3) Eksportir sulit melakukan usaha yang kontinu karena keterbatasan bahan baku sesuai standard dan kurang mengenal pasar ekspor, dan 4) Banyak eksportir bergerak di bidang usaha dengan komoditas yang sama.
- Adanya penolakan dari negara tujuan ekspor dan meminta untuk mengikuti protokol ekspor. Sejak tahun 2013 hingga saat ini terdapat 10 protokol





- ekspor komoditas tumbuhan yang harus dipatuhi.
- c. Kapasitas petani yang masih perlu ditingkatkan terkait registrasi kebun/lahan, registrasi rumah kemas, kelembagaan, jejaring pemasaran.
 - d. Proses perizinan yang cukup lama.
 - e. Kendala non teknis seperti komoditas potensi ekspor yang bukan binaan Kementerian Pertanian, aplikasi SIP Mentan sering lambat.

Tantangan yang dihadapi tentunya tidak menjadi penghalang, namun menjadi perhatian untuk perbaikan selanjutnya. Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing produk hortikultura selama tahun 2024, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi pelaksanaan gerakan tiga kali lipat ekspor sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan potensi untuk meningkatkan ekspor komoditas pertanian.
- b. Melakukan akselerasi dengan berbagai *stakeholder* untuk mempersiapkan komoditas potensi ekspor dapat masuk ke pasar negara tujuan.
- c. Mengikuti kegiatan *business matching*.
- d. Memberikan fasilitasi sarana produksi untuk meningkatkan mutu produk komoditas hortikultura seperti mangga.
- e. Melakukan registrasi rumah kemas.
- f. Mengadakan promosi produk hortikultura Indonesia ke pasar internasional
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama stakeholder ke lapangan untuk melihat proses hulu-hilir komoditas potensi ekspor
- h. Menyusun kajian mendukung ekspor komoditas hortikultura yang salah satunya terkait *non host status* lalat buah pada manggis
- i. Melaksanakan sekolah lapang (SL) GAP dan GHP untuk komoditas potensi ekspor
- j. Menyusun SOP ekspor komoditas hortikultura seperti SOP ekspor salak
- k. Menyusun pemetaan potensi ekspor komoditas hortikultura

Menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sepanjang tahun 2024, maka perlu disusun rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan di masa depan diantaranya:

- a. Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam peningkatan ekspor produk hortikultura seperti perlu dibentuk Satgas Ekspor dengan Barantin sebagai komite pengarah, yang terdiri dari satgas ekspor hewan, tumbuhan, dan ikan. Satgas ekspor tumbuhan terdiri dari koordinator bidang penyusunan protokol ekspor, penyiapan dan pengembangan produk ekspor, informasi pasar dan pengembangan ekspor dan riset dan teknologi. Koordinator penyiapan dan pengembangan produk ekspor terdiri dari kelompok pangan, hortikultura, dan perkebunan
- b. Penguatan negoisasi diplomasi dan perdagangan dengan negara mitra.
- c. Pada pertemuan selanjutnya perlu mengundang para eskportir, institusi dan stakeholder terkait lainnya untuk membahas kendala ekspor.
- d. Melanjutkan Pemetaan Potensi Ekspor Komoditas Hortikultura





- e. Perlu dilakukan pembinaan intensif untuk bisa memenuhi standar ekspor permintaan buyer luar negeri
- f. Senantiasa melaksanakan bimbingan/pelatihan teknis baik dari sisi budidaya mendukung ekspor (penerapan GAP dan SOP), pengairan, pascapanen, pengendalian OPT, hingga kelembagaan pemasaran terhadap petani disertai pendampingan/pembinaan.
- g. Senantiasa memfasilitasi registrasi kebun/lahan, sertifikasi yang memudahkan petani dalam memasok produk hortikultura yang memenuhi persyaratan untuk ekspor.
- h. Program pengembangan kampung hortikultura terpadu hulu hilir skala komersial.



Gambar 26. *Asia Fruit Logistica Business Meet-Up*: Stasiun Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024



Gambar 27. Launching Ekspor Manggis di Kab. Purwakarta, 07 Maret 2024

- 3. Ekspor Komoditas Perkebunan
Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas perkebunan untuk 16 komoditas perkebunan strategis ekspor tumbuh positif pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 39,43% relatif terhadap nilai ekspor tahun 2023. Kontribusi pertumbuhan nilai ekspor komoditas perkebunan tertinggi disumbang oleh





pertumbuhan nilai cengkeh sebesar 226,22%, dan diikuti oleh pertumbuhan nilai ekspor komoditas lada sebesar 171,76%, jambu mete sebesar 142,78%, kakao sebesar 118,64%, kopi sebesar 76,33%, nilam sebesar 56%, kelapa 24,92%, karet 17,9% dan tembakau 3,97%, sedangkan komoditas lainnya mengalami penurunan nilai ekspor yaitu peala, kelapa sawit, teh dan sagu. Secara rinci nilai ekspor dan pertumbuhan nilai ekspor tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 50.

Tabel 50. Perkembangan eskpor Komoditas Perkebunan

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 USD)						2024-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Lada	147.343	160.388	166.751	146.662	114.539	311.283	171,77
2	Pala	138.024	158.420	198.114	185.317	173.673	169.338	-2,50
3	Cengkeh	111.537	176.540	96.054	56.623	99.606	325.233	226,52
4	Jambu Mete	182.675	149.748	114.910	275.031	62.260	151.157	142,78
5	Kopi	883.123	821.932	858.558	1.148.383	929.009	1.638.116	76,33
6	Kelapa Sawit	16.801.686	19.707.894	30.337.660	31.459.726	25.611.073	22.861.081	-10,74
7	karet	3.654.931	3.246.592	4.122.650	3.650.667	2.551.798	3.008.617	17,90
8	kakao	1.198.735	1.244.184	1.206.775	1.259.655	1.197.695	2.618.500	118,63
9	Kelapa	890.810	1.171.840	1.650.422	1.715.645	1.314.430	1.641.828	24,91
10	Teh	92.347	96.323	89.158	89.902	69.014	52.852	-23,42
11	Nilam	116.055	113.834	135.141	166.385	205.909	321.218	56,00
12	Tembakau	201.976	195.919	213.408	266.026	218.793	227.479	3,97
13	Vanili	69.610	60.248	39.930	22.954	15.157	13.158	-13,19
14	Sagu	3.277	2.861	2.467	4.114	13.786	4.096	-70,29
15	Kayu Manis	133.734	151.292	160.688	130.799	99.704	112.245	12,58
16	Tebu	122	37	20	21	39	-	-100,00
Total		24.492.130	27.306.723	39.231.999	40.447.090	32.576.745	33.456.179	
Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2023-2024								39,43

Sumber: BPS, 2025

Komoditas perkebunan merupakan komoditas andalan ekspor pertanian, karena menjadi penyumbang terbesar pada pertumbuhan nilai ekspor pertanian tahun 2024. Kelapa sawit masih menjadi penyumbang terbesar nilai ekspor komoditas perkebunan bahkan komoditas pertanian, namun nilainya menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pertumbuhan yang cukup signifikan ditunjukkan oleh komoditas cengkeh yang mampu meningkatkan nilai ekspor hingga 226,22%. Tidak hanya dari sisi nilai, namun volume ekspor cengkeh juga meningkat dari 11,89 juta kg pada tahun 2023 menjadi 43,58 juta kg pada tahun 2024. Selain cengkeh, lada juga menunjukkan kinerja ekspor yang sangat baik terbukti dengan pertumbuhan nilai ekspor sebesar 171,76% yang juga diikuti peningkatan volume ekspor.

Kelapa sawit sebagai komoditas primadona ekspor, pada tahun 2024 mengalami penurunan nilai ekspor dibandingkan dengan tahun 2023. Berdasarkan data produksi tahun 2023-2024, meskipun terjadi peningkatan produksi kelapa sawit sebesar 3,16%, volume ekspor justru menurun sebesar 13,88%. Penurunan ini terutama terjadi pada kelapa sawit, yang menghadapi hambatan regulasi perdagangan dan kampanye negatif di pasar internasional.

Kelapa sawit, sebagai komoditas utama, memiliki dua kelompok pemanfaatan utama, yakni ekspor dan kebutuhan domestik, seperti pangan, oleokimia, dan





biodiesel. Kebijakan peningkatan biodiesel dari B40 ke B50 akan menyerap lebih banyak *Crude Palm Oil* (CPO) untuk sektor energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga memengaruhi pasokan untuk ekspor dan industri pangan. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas produksi, peremajaan kebun, penerapan teknologi pertanian, serta efisiensi pengolahan menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan kebutuhan akan bahan baku sawit. Diversifikasi produk berbasis sawit juga perlu diperkuat agar industri tetap kompetitif di pasar global. Dengan pengelolaan kebijakan yang tepat, keseimbangan antara kebutuhan energi, pangan, dan ekspor dapat dijaga, sehingga industri kelapa sawit tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang luas.

Tantangan dalam peningkatan nilai ekspor komoditas perkebunan diantaranya terjadi karena beberapa hal, yaitu:

a. Kondisi Ekonomi Global

Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian pasca pandemi COVID-19 dan adanya konflik global menyebabkan ketidakpastian meningkat. Beberapa hal yang menjadi isu global dan dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional, termasuk komoditas perkebunan diantaranya:

- 1) Perlambatan ekonomi global dari 2,6% (2023) menjadi 2,4% (2024) berdampak pada harga komoditas dunia.
- 2) Negara tujuan ekspor seperti AS (1,6%) dan Tiongkok (4,5%) mengalami perlambatan ekonomi, menurunkan konsumsi dan permintaan ekspor.
- 3) Konflik global (Ukraina, Timur Tengah) dan inflasi tinggi di negara maju menghambat perdagangan.
- 4) IMF memprediksi harga komoditas non-minyak dunia turun -0,9% (yoy), menekan daya saing produk Indonesia.

b. Kondisi Pasar Ekspor

Beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap ekspor komoditas perkebunan diakibatkan situasi dan kondisi pasar komoditas perkebunan itu sendiri, seperti:

- 1) Kelapa sawit, yang menyumbang 85% volume dan 75% nilai ekspor, mengalami penurunan harga akibat persaingan dengan minyak nabati lain.
- 2) Rusia membuka jalur perdagangan biji-bijian dan minyak nabati murah ke Eropa, China, dan India, menekan harga sawit.
- 3) Hambatan perdagangan seperti regulasi EUDR Uni Eropa dan proteksionisme negara tujuan ekspor menghambat penyerapan pasar.
- 4) Persyaratan mutu yang lebih ketat tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas produk dalam negeri.
- 5) Kendala logistik akibat konflik di Ukraina, Palestina, dan Laut Merah menyebabkan gangguan distribusi dan kenaikan biaya shipping.

c. Faktor Dalam Negeri

Faktor dalam negeri juga turut mempengaruhi ekspor komoditas perkebunan,





seperti:

- 1) Kurangnya pengetahuan petani dan pelaku usaha mengenai kebijakan ekspor, standardisasi mutu, dan perdagangan internasional.
- 2) Dampak El Niño menyebabkan gagal panen, mengurangi ketersediaan stok ekspor dan menurunkan volume ekspor.

Sebagai upaya menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka Kementerian Pertanian melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai ekspor, yaitu melalui:

a. Pengembangan akses pasar:

- 1) Pengembangan akses pasar ekspor ke negara non tradisional seperti pasar Afrika yang tidak terdapat hambatan perdagangan non tarif yang mempengaruhi penyerapan ekspor perkebunan.
- 2) Upaya strategis dalam pendataan dan informasi pasar negara ekspor melalui dokumen *market intelligence* yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar, standardisasi produk, kualitas produk, buyer potensial, dan lain-lain.
- 3) Optimalisasi peran KBRI, atase perdagangan, atase pertanian dan diaspora dalam membranding produk perkebunan Indonesia, sekaligus aktor dalam *positive campaign* dalam menggali peluang pasar dan menghalau hambatan atau isu-isu negatif terkait komoditas perkebunan.

b. Pengembangan promosi dan misi dagang:

- 1) Memperkuat misi dagang dan exhibition dengan target *positive campaign* dan branding komoditas.
- 2) Pelaksanaan promosi bertaraf internasional baik yang diinisiasi Kementerian/ Lembaga maupun secara reguler diadakan di negara tujuan ekspor, tentunya dengan kerjasama KBRI, atase Perdagangan, ITPC, dan diaspora Indonesia.

c. Pengembangan perjanjian kerjasama luar negeri:

- 1) Penyelesaian perjanjian kerjasama bilateral yang masih *pending review* terutama sifatnya *request offer* komoditas (*preferential trade agreement*) untuk mereduksi beberapa hambatan tarif terutama terkait tingginya bea masuk.
- 2) Penyelesaian hambatan non tarif melalui perundingan bilateral dan regional yg lebih komprehensif.
- 3) Lobi perdagangan dengan negara mitra baru melalui diplomasi bilateral, terutama terkait perundingan PTA (*Preferential Trade Agreement*) dalam menyepakati akses pasar per HS, penurunan/mereduksi tarif bea masuk, dan memberikan kemudahan perdagangan dalam penyelesaian hambatan non tarif.
- 4) Melakukan kesepakatan kerjasama secara *business to business (B to B)* dalam bentuk *business matching meeting* dengan calon pembeli mancanegara untuk membuat kesepakatan pemasaran dengan produsen/pelaku usaha/petani di Indonesia, tentunya dibawah koordinasi





- KBRI/Atase Perdagangan/Atase Pertanian dan melibatkan para diaspora Indonesia.
- 5) Mengoptimalkan peran negosiasi perundingan dan misi dagang antara *government to government* (G to G) dan *government to business* (G to B) baik secara bilateral, regional maupun multilateral dalam organisasi Internasional termasuk terlibat dalam setiap sidang/ *conference*, seminar dan workshop pemasaran internasional.
- d. Pengembangan produk Nilai Tambah dan Berdaya Saing:
- 1) Peningkatan nilai tambah produk (hilirisasi), karena dengan produk yg di ekspor dengan nilai tambah tinggi maka punya daya saing dari sisi harga;
 - 2) Peningkatan pembinaan SDM pelaku usaha dan petani terkait kebijakan ekspor, standarisasi ekspor, perdagangan internasional, mutu produk, pascapanen dan pengolahan melalui Bimtek, Pelatihan dan lain-lain.
 - 3) Dukungan regulasi ekspor di tingkat pemerintah pusat seperti Kemendag, Kementan, Kemenperin dan Kemenko Ekonomi. Contoh terbitnya Permentan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian; Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional; Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
4. Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Rata-rata pertumbuhan nilai ekspor komoditas strategis peternakan mengalami perlambatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 12,05%. Dari lima komoditas strategis ekspor yang diukur pertumbuhannya pada tahun 2024, 2 komoditas melambat dan 3 komoditas tumbuh positif. Komoditas yang berkontribusi terhadap pertumbuhan nilai ekspor komoditas peternakan maupun komoditas pertanian yaitu hasil ternak sebesar 1,06%, produk hewan non pangan sebesar 3,36% serta benih dan bibit ternak sebesar 40,52%. Komoditas yang melambat atau tidak mengalami pertumbuhan pada tahun 2024 yaitu obat hewan dan hewan hidup. Secara rinci, nilai ekspor komoditas peternakan sejak tahun 2019 hingga 2024 serta pertumbuhannya pada tahun 2024 relatif terhadap tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 51 berikut ini.

Tabel 51. Perkembangan eskpor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 USD)						2024-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Obat Hewan	179.626	136.322	172.856	162.592	87.673	65.673	-25,09
2	Hewan Hidup	65.904	80.416	61.863	63.934	27.184	5.414	-80,08
3	Hasil Ternak	646.978	883.136	894.873	1.014.915	1.063.664	1.074.988	1,06
4	Produk hewan non pangan	141.183	139.391	175.819	193.294	198.475	205.151	3,36
5	Benih dan bibit ternak.	2.196	1.548	1.057	1.974	2.156	3.030	40,52
Total		1.035.887	1.240.813	1.306.468	1.436.709	1.379.152	1.354.241	
Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2023-2024								-12,05

Sumber: BPS, 2025





Penurunan ekspor secara signifikan terjadi untuk kelompok hewan hidup, terutama pada ternak unggas terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 35,16% yang disebabkan karena adanya penurunan volume ekspor sebesar 59,01%. Penurunan ekspor unggas hidup terjadi karena sebagian besar ekspor ke Timor Leste dihentikan. Pengehentian ini dilakukan karena pemerintah Timor Leste yang baru meminta dilakukan ulang *Import Risk Assessment* (IRA) yang sebenarnya telah dilaksanakan pada 17-23 September 2025. Hal ini menyebabkan ekspor pada 9 (Sembilan) unit usaha yaitu PT. Icon Niaga Internusa, PT. Charoen Pokphand Indonesia, PT. Super Unggas Jaya, PT. Dua Putra Utama, PT. Ciomas Adisatwa, PT. Rumah Makan Delta Sari Indah, PT. Sukanda Djaya, PT. Cisarua Mountain Dairy and PT. Suryagati Nusaraya menjadi tertunda pada tahun 2024.

Penurunan ekspor untuk hasil ternak juga terjadi pada ternak babi akibat adanya wabah *African Swine Fever* (ASF) yang melanda Pulau Bulan dan beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu juga masih terdapat hambatan pasar ekspor untuk komoditas kambing dan domba dari Indonesia yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) juga menjadi salah satu penyebab kurang berhasilnya kinerja peningkatan ekspor. Sedangkan untuk kelompok obat hewan juga terjadi penurunan nilai ekspor produk premix dan lysin pada tahun 2024.

Secara umum penurunan aktivitas ekspor obat hewan selama periode Tahun 2024 disebabkan adanya beberapa kendala meliputi:

- a. Adanya keterbatasan tersedianya armada pengangkutan melalui laut (kapal) serta bertambah jauhnya rute tempuh karena adanya konflik di beberapa negara.
- b. Pada periode tertentu terdapat penurunan permintaan terhadap sediaan obat hewan dari Indonesia karena adanya produk serupa produksi cina dengan harga yang lebih murah dengan selisih harga sekitar 20%.
- c. Dibutuhkan produk lain yang dapat diorder secara berkelanjutan, namun produk ini masih dalam tahap pendaftaran/registrasi di Kementan ataupun KLHK karena adanya kandungan GMO.
- d. Terbatasnya jumlah produsen obat hewan di Indonesia mengingat unit usaha ini membutuhkan biaya yang besar. Hingga saat ini hanya 116 produsen yang terdaftar di Indonesia. Dengan jumlah produsen yang terbatas, maka jumlah produk obat hewan hanya sedikit dan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.
- e. Jumlah unit usaha eksportir obat hewan yang aktif melakukan kegiatan masih sangat terbatas
- f. Bahan baku untuk produksi sebagian besar merupakan sediaan yang berasal dari importasi
- g. Kurang aktifnya kegiatan yang bersifat promosi ke negara pengimpor, sehingga perlu peran aktif pemerintah melalui atase pertanian atase perdagangan yang menjadi perwakilan pemerintah Indonesia untuk dapat membuka peluang ekspor.





Untuk mendukung upaya meningkatkan pertumbuhan ekspor komoditas peternakan, maka dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan ekspor komoditas peternakan dan Kesehatan hewan yaitu:

- a. Melakukan audit ke 8 unit usaha perunggasan yang sudah dan akan melakukan ekspor ke Singapura oleh *Singapore Food Agency* (SFA) karena sudah terbukan pasar ekspor unggas ke Singapura.
- b. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Instansi terkait tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPOM dan perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Atase Pertanian, serta *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) untuk mendorong pembukaan akses pasar bagi komoditi dan produk peternakan Indonesia ke mancanegara.
- c. Menerbitkan sertifikat kompartemen bebas AI sebanyak 287 unit usaha tersebar di 20 provinsi
- d. Melakukan pendampingan pelaku usaha ekspor dengan melibatkan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan provinsi dan UPT bidang peternakan dan kesehatan hewan. Melalui kegiatan pendampingan pelaku usaha ekspor tersebut, dapat diidentifikasi potensi komoditi di masing-masing wilayah yang memiliki potensi ekspor, dan para pelaku usaha peternakan yang siap ekspor atau perlu dilakukan pendampingan agar siap ekspor.
- e. Melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi unit usaha produk hewan dan menjadi salah satu persyaratan bagi unit usaha yang akan melakukan pemasukan (impor) dan/atau pengeluaran (ekspor).
- f. Meningkatkan status kesehatan hewan melalui penerapan kompartementalisasi bebas penyakit sebagai salah satu persyaratan produk peternakan yang akan diekspor.
- g. Meningkatkan investasi melalui pemanfaatan KUR untuk usaha budidaya maupun pasca panen dan pengolahan.
- h. Mengembangkan Kawasan Peternakan Berbasis Korporasi Peternak baik di tingkat nasional.
- i. Menambah negara mitra dagang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, KBRI sebagai Perwakilan Negara Indonesia, termasuk diaspora Indonesia di negara tujuan ekspor serta memanfaatkan berbagai forum perundingan dan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral.
- j. Meningkatkan volume ekspor dengan cara koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para stakeholder termasuk para pelaku usaha ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K).

Dalam melakukan ekspor ternak dan hasil ternak beberapa tantangan yang





dihadapi Indonesia diantaranya:

- a. Masih adanya proses G to G yang belum selesai dengan beberapa negara tujuan ekspor;
- b. Status Penyakit Hewan seperti PMK, LSD, dan ASF menghambat eksportasi hewan hidup, antara lain: ekspor babi ke Singapura, ekspor kambing ke Malaysia, dan domba ke Brunei Darussalam.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk mendorong peningkatan ekspor komoditas peternakan dan Kesehatan hewan, maka Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan negara tujuan dalam pemenuhan persyaratan terkait adanya kasus PMK dan ASF di Indonesia.
- b. Melakukan penyelesaian proses penyelesaian G to G dengan beberapa negara melalui pendekatan dengan KBRI maupun atase pertanian dan perdagangan yang ada melalui promosi produk ke beberapa negara (Denmark, Jepang, dan Uni Emirat Arab).
- c. Melakukan tindakan mengendalikan penyebaran PMK dan ASF di wilayah NKRI.





SASARAN STRATEGIS 3 (SS 3) **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional**

Dalam konteks pembangunan pertanian, penelitian merupakan salah satu faktor yang penting bagi kemajuan pertanian secara umum, baik dalam sisi perubahan perilaku petani, peningkatan produksi, efektivitas dan efisiensi usaha tani bahkan ketepatan sasaran dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian pun tergantung dari sejauh mana kemajuan penelitian di suatu negara.

Pertanian di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan-persoalan mendasar seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan permintaan pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan pembibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, serta masih rawannya ketahanan pangan dan energi. Dengan masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian, maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Peran penelitian menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut, terutama penyediaan benih dan bibit unggul bermutu, teknik budi daya yang lebih maju dan inovasi teknologi prosesing yang makin beragam yang dapat meningkatkan nilai tambah dan metode alih inovasi teknologi yang cepat dari teknologi yang tepat guna. Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur dari pencapaian indikator: (1) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (2) Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya; dan (3) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi.





SS 3. IKU 9 Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya	
Target 90%	Realisasi 97,50%
% Capaian 108,33%	

Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkatkan kapasitasnya dilakukan melalui data peserta pelatihan yang sudah menerapkan materi pelatihan. Cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Nilai rata-rata dari :

$$\frac{\sum \text{SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan}}{\sum \text{Total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian}} \times 100\%$$

Dalam mengumpulkan data SDM yang mengikuti Pelatihan dan SDM Pertanian yang menerapkan Materi Pelatihan digunakan aplikasi Elektronik Pemantauan Indikator Kinerja (EPIK) yang bisa diakses oleh peserta pelatihan yang telah memiliki akun pada link <https://new-epik.puslatan.id/> yang mempunyai tampilan beranda sebagai berikut:

Gambar 28. Tampilan Beranda Aplikasi Elektronik Pemantauan Indikator Kinerja (EPIK)

Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dimaksudkan adalah realisasi fisik peserta yang mengikuti pelatihan. Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan materi pelatihan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 52.





Tabel 52. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Tahun 2024

NO	SATKER	Σ SDM yang mengikuti pelatihan	ΣSDM yang menerapkan Materi pelatihan	%
1	BBPMKP CIAWI	2.880	2.867	99,55
2	BBPKH CINAGARA	2.563	2.480	96,76
3	BBPP LEMBANG	2.307	2.287	99,13
4	BBPP KETINDAN	5.484	5.484	100,00
5	BBPP BATU	2.106	2.087	99,15
6	BBPP BATANGKALUKU	9.343	9.000	96,33
7	BBPP BINUANG	1.171	1.090	93,08
8	BBPP KUPANG	1.390	1.295	93,17
9	BPP JAMBI	801	786	98,13
10	BPP LAMPUNG	791	740	93,55
TOTAL		28.836	28.116	97,50

Berdasarkan Tabel 52 diperoleh data jumlah SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan sebanyak 28.116 orang, sedangkan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pertanian sebanyak 28.836 orang. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2024 adalah :

$$= (28.116 / 28.836) \times 100\%$$
$$= 97,50\%$$

Presentase capaian kinerja dihitung dari:

$$= (97,50 / 90) \times 100$$
$$= 108,33\% \text{ (sangat berhasil)}$$

Target persentase SDM yang menerapkan materi pelatihan tahun 2024 adalah 90% dengan realisasi 97,50%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja SDM yang menerapkan materi pelatihan adalah 108,33% (sangat berhasil).

Keberhasilan persentase peningkatan SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya didukung oleh:

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan;
Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik harus dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar





Kompetensi Kerja (SKK) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).

2. Metode dan kurikulum pelatihan yang tepat
Metodologi pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta pelatihan yang akan dilatih. Metodologi pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), *Experiential Learning Cycle* (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktek, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.
Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing-masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam tujuan, sasaran, mata pelatihan; dan silabus. Selain penyusunan kurikulum juga disusun silabus pelatihan. Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi pelatihan; dan perkiraan waktu pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.
3. Profesionalisme ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara)
Penetapan ketenagaan pelatihan didasarkan pada kesesuaian kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamaan bagi yang memiliki sertifikat pelatihan bagi pelatih di bidangnya.
4. Prasarana dan sarana pelatihan yang mendukung;
Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang pelatihan.
5. Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan
Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka sharing experience

Hambatan dan upaya penanggulangan dalam pengukuran indikator kinerja sasaran kegiatan persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya untuk tahun 2024 antara lain:

1. Masih terkendalanya aplikasi epik oleh purnawidya pelatihan baik terkait dengan system aplikasinya ataupun jaringan di lokasi purnawidya. Terkait dengan system aplikasi EPIK yang sampai saat ini belum dapat mengakomodir peserta pelatihan





dengan NIK sama yang mengikuti lebih dari 1 kali jenis pelatihan sehingga Peserta dengan NIK yang sama tidak bisa menginput hasil penerapan materi pelatihan lebih dari satu pelatihan di aplikasi EPIK. Upaya yang dilakukan, bagi purnawidya pelatihan dengan NIK yang sama menyampaikan hasil penerapan materi pelatihan secara manual.

2. Identifikasi Kebutuhan pelatihan (IKP) belum dilakukan secara maksimal, ini terkendala dengan tidak adanya anggaran khusus untuk melakukan IKP secara langsung ke calon peserta pelatihan. Upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan instansi pengirim untuk melakukan IKP calon peserta pelatihan.
3. Perubahan yang dinamis terhadap peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani belum sepenuhnya didukung oleh perubahan petunjuk pelaksanaan pelatihan untuk mendukung peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani sehingga acuan pelaksanaan pelatihan masih mencau pada juklak yang sudah ada. Upaya penanggulangannya adalah dengan menyesuaikan kearifan local pada materi pelatihan disesuaikan dengan juklak yang ada.
4. Peningkatan profesionalisme fasilitator dan ketenagaan pelatihannya masih perlu ditingkatkan, ini terkendala karena tidak ada anggaran khusus untuk peningkatan profesionalisme fasilitator dan ketenagaan pelatihan lainnya. Upaya yang dilakukan, peningkatan profesionalisme dilakukan secara individu/mandiri.
5. Dukungan sarana pembelajaran belum sepenuhnya dapat menunjang pelatihan yang ada, upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sarana pembelajaran yang tersedia di UPT Pelatihan.

Tabel 53. Capaian Kinerja 5 tahun terakhir dari 2020-2024 pada IKU 10 persentase peningkatan SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya

No	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	60,00	99,50	75,00	79,92	80,00	90,88	85,00	88,98	90	97,50

Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan pencapaian 108,33% pada tahun 2024. Ini mencerminkan keberhasilan program pelatihan dan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang berhasil meningkatkan kapasitas banyak individu dalam sektor pertanian. Komitmen yang kuat dalam pengembangan SDM terbukti memberikan hasil yang melebihi harapan.





SS 3. IKU 10 Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya	
Target 22%	Realisasi 22,06%
% Capaian 100,27% Sangat berhasil	

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya merupakan poktan/gapoktan yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

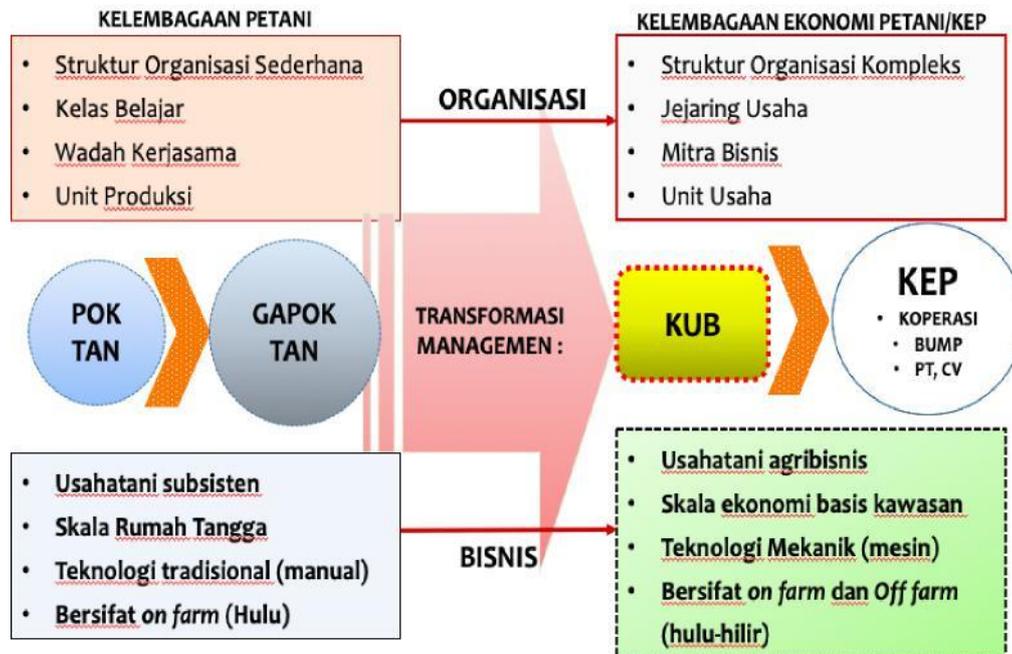
Secara umum, pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatannya, memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian dipedesaan.

Pembentukan KEP dalam bentuk badan hukum atau lainnya seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani, berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi yang dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani.

Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas.

Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusahatani secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir. Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas





Gambar 29. Transformasi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain:

1. Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
2. Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
3. Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
4. Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
6. Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
7. Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Indikator kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaan petani (gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan bentuk Koperasi Tani, Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP). IKU Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya tahun 2024 ditargetkan mencapai 22% dari jumlah Gapoktan yang terdata dalam aplikasi SIMLUHTAN tahun 2024, yaitu sebanyak 14.001 KEP dari 64.555 gapoktan (meningkat 1% dari tahun 2024).

Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2024 secara kumulatif mencapai **14.272 KEP (22,06%)**. Adapun capaian kinerja utama "Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya" diukur dengan formula pengukuran:





$$=(\Sigma \text{Kelembagaan Ekonomi Petani}) / (\Sigma \text{Total Kelembagaan Gapoktan}) \times 100\%$$

Berdasarkan formula pengukuran IKU tersebut, capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada pada bulan Desember 2024, yaitu :

1. Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sampai dengan Bulan Desember 2023, sebagai berikut
= **(14.272/64.555) x 100%**
= **22,06%**
2. Persentase capaian kinerja untuk Bulan Desember 2024 adalah:
= **(22,06/22) x100**
= **100,27% (sangat berhasil)**

Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada Bulan Desember tahun 2024 adalah 22,06 % dari target 22% pada Bulan Desember 2024 dipengaruhi oleh dukungan kegiatan pengawalan dan pendampingan korporasi yang berada di Pusat Penyuluhan Pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah 100,27% (sangat berhasil).

Pencapaian keberhasilan persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2024 (22,06%) dipengaruhi oleh dukungan kegiatan pengawalan dan pendampingan korporasi yang berada di Pusat Penyuluhan Pertanian. Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian telah mengupayakan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Mendorong Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan secara rutin kepada kelembagaan petani di wilayah kerjanya untuk peningkatan kapasitasnya agar dapat ditumbuhkembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi:
 - a. Melakukan identifikasi poktan, gapoktan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:
 - Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar
 - Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
 - Memiliki rencana usaha;
 - Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
 - Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
 - Telah membangun kemitraan usaha.
 - b. Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;
 - c. Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:





- Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
 - Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
 - Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
 - Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
 - Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.
2. Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan salah satunya informasi penumbuhkembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) melalui media *cyber exertion* dan berbagai media/kegiatan secara *offline* dan *online*;
 3. Peningkatan sinergitas dengan unit kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani.

Terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi KEP, yaitu:

1. Kurangnya anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari APBN dan APBD;
2. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dalam penumbuhkembangan KEP karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran;
3. Keterbatasan akses sumber informasi dan teknologi, permodalan, pemasaran dan kerjasama/kemitraan bagi kelembagaan petani dan KEP;
4. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
5. Kelembagaan petani dan KEP pada umumnya belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya.
6. Pengelola/pengurus kelembagaan petani dan KEP umumnya belum memiliki kemampuan manajerial yang baik

Tabel 54. Capaian Kinerja 5 tahun terakhir dari 2020-2024

No	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	18,00	18,00	19,00	19,83	20,00	20,25	21,00	21,06	22	22,06

Sumber Data: BPPSDMP tahun 2024

Dari tabel 54 menunjukkan persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dari tahun 2020-2024, hal ini tidak terlepas dari usaha Pusat Penyuluhan Pertanian dalam melakukan pendampingan, pengawalan dalam penumbuhkembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).





SS 3. IKU 11	
Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	
Target 90%	Realisasi 90,24%
% Capaian 100,27 % Sangat Berhasil	

Inovasi dan teknologi pertanian berperan penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas usahatani sehingga berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang salah satunya dindikasikan dari meningkatkannya ketahanan pangan rumah tangga petani. Hasil penelitian/pengkajian teknologi pertanian akan memberikan manfaat bagi petani apabila komponen teknologi yang dihasilkan diterapkan petani dalam pengelolaan usahatannya. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakikatnya adalah proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective) dan keterampilan (psychomotoric) petani dalam kegiatan usahatannya guna meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerapan teknologi pertanian adalah pentingnya peran diseminasi teknologi pertanian kepada petani melalui berbagai saluran/media (media elektronik, media cetak, dan media interpersonal) dan metode penyuluhan pertanian yang tepat. Diseminasi inovasi dan teknologi pertanian merupakan kegiatan penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian spesifik lokasi. Diseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi inovasi dan teknologi hasil penelitian dan pengkajian melalui berbagai kegiatan komunikasi, promosi, dan komersialisasi serta penyebaran paket teknologi unggul yang dibutuhkan.

Proses penyebarluasan inovasi dan teknologi hasil pengkajian yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusaha tani untuk peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan perbaikan kesejahteraan petani yang diupayakan melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian sebagai jembatan dalam penyebarluasan/ diseminasi inovasi dan teknologi hasil penelitian dan kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di pusat maupun daerah atau sumber lainnya kepada petani.

Penyuluh Pertanian berperan penting dalam memperkenalkan dan mendiseminasikan inovasi serta teknologi pertanian kepada petani agar mereka mau dan mampu mengadopsi teknologi pertanian sehingga mampu meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan





usahanya. Keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian salah satunya diindikasikan dengan adanya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta adopsi inovasi dan teknologi pertanian sehingga terjadinya peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya dalam berusaha tani.

Berkenaan dengan hal itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 Tahun 2024 adalah Persentase Petani yang menerapkan teknologi dengan target 90% dari total jumlah petani secara nasional yang tergabung dalam kelompok tani dan terekam dalam Aplikasi Simluhtan.

Berdasarkan Aplikasi Simluhtan tahun 2024, jumlah petani yang tergabung dalam poktan sebanyak 23.217.285 petani pada periode 2024 dan target dalam IKU tahun 2024 ditargetkan presentase petani yang menerapkan teknologi mencapai 90 persen dengan kata lain target jumlah petani yang menerapkan teknologi sebesar 20.895.557 petani. Realisasi jumlah petani yang menerapkan teknologi sebanyak 20.951.647 bersumber dari e-pusluh.

Adapun pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$= \frac{(\sum \text{Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian})}{\sum \text{total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian}} \times 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi Tahun 2024, sebagai berikut:

$$= \frac{(20.951.647/23.217.285) \times 100\%}{90,24\%}$$

Nilai persentase capaian kinerja Januari –Desember 2024 yaitu

$$= \frac{(90,24/90) \times 100\%}{100,27\% \text{ (sangat berhasil)}}$$

Pencapaian keberhasilan penerapan teknologi oleh 20.951.646 petani dari kegiatan penerapan teknologi pertanian oleh Penyuluh Pertanian yang difasilitasi BOP tahun 2024 dalam budidaya usahatani pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan Perkebunan. Pencapaian keberhasilan penerapan teknologi pertanian oleh **20.951.647 petani** sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan penyuluhan pertanian, diantaranya melalui pengawalan dan pendampingan serta diseminasi teknologi pertanian oleh penyuluh pertanian yang difasilitasi dengan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) dan Kegiatan Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian melalui Metode Sekolah Lapang.

Secara rinci data petani yang menerapkan teknologi pertanian hingga bulan Desember tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 55.





Tabel 55. Data Jumlah Poktan dan Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian Bulan Desember 2024

No	Provinsi	Jumlah Kelompok Tani Sasaran (Kelompok)	Jumlah Petani yang Menggunakan Teknologi				JUMLAH
			Tanaman Pangan	Hortikultura	Peternakan	Perkebunan	
1	ACEH	12,956	479,626	94,983	24,608	44,961	644,258
2	SUMATERA UTARA	17,458	621,917	122,260	56,940	54,976	856,123
3	SUMATERA BARAT	12,007	367,948	102,937	36,038	58,465	565,418
4	RIAU	4,910	293,318	55,342	8,514	18,983	376,188
5	JAMBI	7,002	190,967	75,467	13,992	60,205	340,681
6	SUMATERA SELATAN	14,385	453,583	135,169	37,568	119,010	745,420
7	BENGKULU	10,569	79,202	60,315	19,726	43,441	202,713
8	LAMPUNG	13,538	849,297	99,593	31,737	37,367	1,018,094
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4,902	20,051	19,937	3,618	24,802	68,447
10	KEPULAUAN RIAU	266	9,306	452	400	34	10,245
11	DKI JAKARTA	2	0	0	0	0	-
12	JAWA BARAT	23,382	2,878,219	88,139	17,396	19,246	3,003,150
13	JAWA TENGAH	46,278	2,826,141	287,387	104,432	109,749	3,327,770
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1,727	325,082	8,509	3,548	2,335	339,504
15	JAWA TIMUR	36,339	3,438,279	236,902	162,139	125,975	3,963,395
16	BANTEN	5,031	296,132	23,629	2,962	383	323,157
17	BALI	3,047	247,266	13,433	14,527	7,633	282,888
18	NUSA TENGGARA BARAT	20,141	616,606	66,998	61,925	6,259	751,848
19	NUSA TENGGARA TIMUR	18,640	273,941	151,399	83,841	54,821	564,032
20	KALIMANTAN BARAT	12,870	352,002	59,801	26,864	26,512	465,208
21	KALIMANTAN TENGAH	7,723	36,334	70,816	42,539	54,373	204,112
22	KALIMANTAN SELATAN	29,064	2,338	179,576	80,219	161,184	423,373
23	KALIMANTAN TIMUR	4,611	93,253	31,601	7,463	22,855	155,223
24	KALIMANTAN UTARA	2,064	12,534	8,259	11,221	8,070	40,113
25	SULAWESI UTARA	3,088	169,652	15,751	1,911	3,890	191,234
26	SULAWESI TENGAH	6,452	121,809	26,396	14,694	28,106	191,034
27	SULAWESI SELATAN	14,824	1,177,801	81,818	19,851	46,697	1,326,227
28	SULAWESI TENGGARA	6,233	103,469	31,982	12,560	22,231	170,272
29	GORONTALO	2,131	80,810	5,720	5,943	168	92,671
30	SULAWESI BARAT	2,021	160,574	6,656	1,102	5,901	174,263
31	MALUKU	2,098	13,216	30,484	3,478	3,476	50,685
32	MALUKU UTARA	3,587	22,138	12,104	5,310	5,675	45,258
33	PAPUA	1,044	13,157	13,813	428	999	28,427
34	PAPUA BARAT	0	2,583	3,626	1,056	0	7,294
35	PAPUA SELATAN	0	0	0	0	0	-
36	PAPUA TENGAH	162	29	18	0	0	47
37	PAPUA PEGUNUNGAN	1	0	0	0	0	-
38	PAPUA BARAT DAYA	174	518	1,159	1,195	0	2,872
JUMLAH		350,727	16,629,098	2,222,432	919,747	1,178,783	20,951,646

Kegiatan yang mendukung pencapaian keberhasilan jumlah petani yang menerapkan teknologi, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan Pertanian

Penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran inovasi dan teknologi pertanian kepada petani. Sebagai jembatan antara penelitian dan praktik di lapangan, penyuluh berfungsi untuk mengkomunikasikan, mendidik, dan memotivasi petani agar dapat memahami, menerima, dan mengimplementasikan teknologi baru dalam kegiatan pertanian mereka. Media yang digunakan dalam penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian sangat beragam, dari pertemuan kelompok tani hingga media digital modern. Pemilihan media yang tepat dengan mempertimbangkan aksesibilitas, preferensi, dan kemampuan petani untuk





memahami informasi yang disampaikan. Dengan pemanfaatan media yang efektif, penyuluhan dapat menjangkau lebih banyak petani, meningkatkan adopsi inovasi, dan mendorong kemajuan pertanian.

Dalam upaya meningkatkan motivasi dan kinerja Penyuluh Pertanian, maka mereka diberikan bantuan operasional bagi penyuluh pertanian (BOP) selama 12 bulan. Salah satu hasil/keluaran kegiatan penyuluhan pertanian meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Adapun jenis teknologi yang pada umumnya diterapkan oleh petani pada beberapa komoditas tanaman (pangan, hortikultura, dan perkebunan), yaitu: penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB), pengelolaan OPT, mekanisasi pertanian, dan pemupukan berimbang. Sedangkan jenis teknologi yang diterapkan pada komoditas peternakan yaitu pengelolaan panen dan pasca panen serta pengelolaan OPT.

2. Fasilitasi Webinar Bagi Penyuluh Pertanian dan Petani

Webinar menjadi alat penyuluhan yang sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani serta pelaku pertanian lainnya. Melalui webinar dapat mengatasi keterbatasan akses dan jarak, mendukung pembelajaran interaktif dan dua arah, serta tercapainya penyuluhan pertanian yang lebih inklusif, cepat, dan tepat sasaran. Selain itu, webinar juga menjadi sarana penting dalam membiasakan petani dan penyuluh menggunakan teknologi digital, yang semakin penting dalam ekosistem pertanian modern

Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki kegiatan webinar yang diselenggarakan 2 kali setiap minggu, yaitu: rari Selasa dengan nama acara webinar "Ngobrol Asyik Penyuluhan (Ngobras)", dan hari Jumát dengan nama acara webinar "Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP)".

3. Fasilitasi kegiatan Sekolah Lapang (SL) Tematik Pertanian Organik

Kegiatan Sekolah Lapang (SL) merupakan program Kementan yang dilaksanakan di 42 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tersebar di 42 Kabupaten dan 34 provinsi. Masing-masing BPP melibatkan 10 poktan dan diikuti minimal 3 orang pengurus/anggota dari masing-masing poktan.

Tujuan SL untuk meningkatkan kapasitas dari peserta dalam hal ini perwakilan dari pengurus poktan agar dapat menerapkan/ mengimplementasikan penggunaan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian. Tema pembelajaran pada kegiatan SL Tahun 2024 yaitu pertanian organik agar para petani mampu memproduksi pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah secara mandiri. Selain itu untuk mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis, menerapkan pertanian yang berkelanjutan, dan menjaga ketahanan pangan. Pelaksanaan SL dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan menerapkan prinsip learning by doing. Petani dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan sehingga bisa membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilannya, serta dapat memfasilitasi pertukaran pengalaman di antara peserta. Output dari kegiatan SL yaitu





petani peserta SL meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani terhadap materi yang diajarkan serta mereka dapat menerapkan teknologi pertanian organik.

Capaian Kinerja 5 tahun terakhir dari 2020-2024 pada indikator persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian dapat dilihat secara rinci pada tabel 56.

Tabel 56. Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)

No	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	70,00	70,19	75,00	75,51	80,00	80,83	85,00	85,22	90	90,24

Salah satu aspek yang diperhatikan adalah Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi, yang mengalami peningkatan dari 70,19% di tahun 2020 menjadi 90,24% pada tahun 2024. Meskipun ada kemajuan, pencapaian ini masih jauh di bawah target yang ditetapkan, yaitu 90%. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mengadopsi teknologi di kalangan petani masih perlu ditangani, terutama terkait aksesibilitas dan pemahaman terhadap manfaat teknologi baru.





SASARAN STRATEGIS 4 (SS 4) **Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian Yang Efektif Dan Efisien Serta Anggaran Yang Akuntabel**

Pemerintahan yang baik dan efektif sangat bergantung pada kualitas birokrasi yang profesional dan transparan. Reformasi birokrasi di Indonesia telah menjadi agenda utama sejak akhir 1990-an, dengan tujuan utama meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sejalan dengan perkembangan zaman, reformasi ini terus mengalami penyempurnaan melalui berbagai kebijakan strategis, seperti Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam praktiknya, reformasi birokrasi difokuskan pada delapan area perubahan yang mencakup tata kelola organisasi, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga transformasi budaya kerja. Regulasi terbaru seperti PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 mempertegas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap capaian reformasi, guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Langkah-langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil.

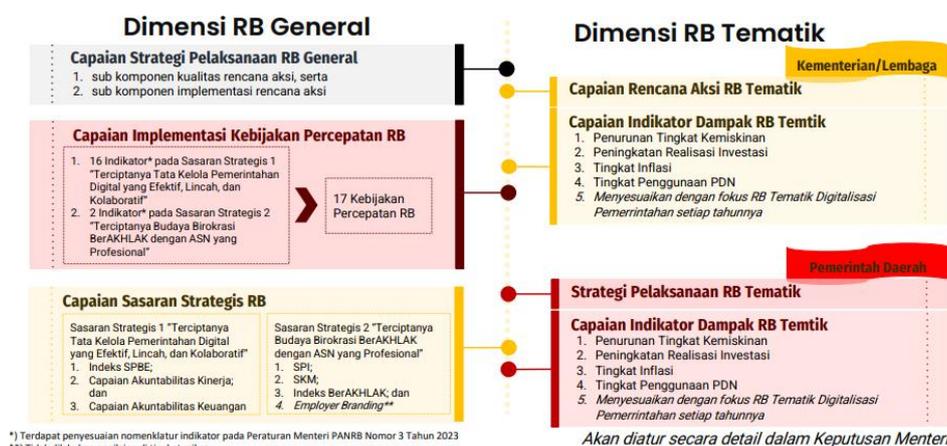
Di tingkat Kementerian/Lembaga, implementasi reformasi birokrasi dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti penyederhanaan prosedur layanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi. Berbagai instansi pemerintah juga terus melakukan inovasi untuk mempercepat pelayanan publik, memperbaiki sistem kerja, serta memastikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional. Upaya ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih adaptif terhadap perubahan, efisien dalam operasionalnya, serta lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.





SS 4. IKU 12	
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	
Target 84,76	Realisasi 84,8
% Capaian 100,05% Sangat Berhasil	

Mengacu pada: (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan (3) Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, maka terdapat perubahan evaluasi dan pengukuran kinerja indikator RB. Komponen penilaian evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023-2024 menggunakan dua pendekatan yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Secara rinci, komponen penilaian evaluasi RB untuk tahun 2023-2024 dapat ditunjukkan pada Gambar 30.



Gambar 30. Komponen Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, dalam upaya mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan Reformasi Birokrasi Berdampak, Kementerian Pertanian menyusun Rencana Aksi RB General yang terdiri dari 28 kegiatan utama, yaitu:

- | | |
|---|---|
| 1) Rencana Aksi Pembangunan RB General | 15) Indeks Reformasi Hukum |
| 2) Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General | 16) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| 3) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi | 17) Indeks Tata Kelola Pengadaan |





- | | |
|--|--|
| 4) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi | 18) Indeks Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN |
| 5) Tingkat Maturitas SPIP | 19) Indeks Pelayanan Publik |
| 6) Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI | 20) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik |
| 7) Nilai SAKIP | 21) Indeks SPBE |
| 8) Indeks Perencanaan Pembangunan | 22) Capaian Prioritas Nasional |
| 9) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE | 23) Capaian IKU |
| 10) Tingkat Digitalisasi Arsip | 24) Opini BPK |
| 11) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 25) Tindak Lanjut Rekomendasi |
| 12) Indeks Pengelolaan Aset | 26) Indeks BerAkhlak |
| 13) Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan | 27) Survei Penilaian Integritas |
| 14) Indeks Kualitas Kebijakan | 28) Survei Kepuasan Masyarakat |

Selain itu, dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 menetapkan 4 (empat) tema dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2024, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Realisasi investasi;
3. Digitalisasi pemerintahan; dan
4. Prioritas aktual Presiden.

Sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian, maka seluruh unit kerja juga turut mendukung pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diamankan dan akan dievaluasi secara berkala melalui indikator yang mendukung reformasi birokrasi.

Proses evaluasi RB dilaksanakan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal terdiri dari dua kegiatan utama yaitu evaluasi perencanaan RB dan evaluasi pelaksanaan RB. Evaluasi perencanaan RB dilakukan untuk memastikan *road map* dan Rencana Aksi RB memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan K/L/D. Evaluasi pelaksanaan RB dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di internal Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Internal Instansi, yang dalam hal ini untuk lingkup Kementerian Pertanian, evaluasi internal RB dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian kinerja atas indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian tahun 2024 adalah sebesar 84,8 atau terealisasi 100,05% dari target sebesar 84,76.





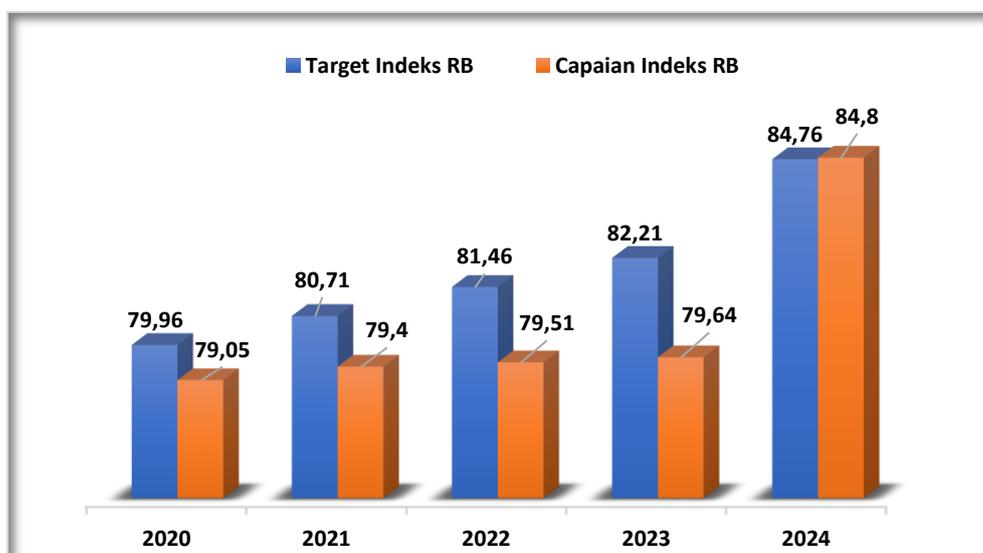
Nilai RB tersebut disampaikan oleh Kementerian PAN RB pada tanggal 27 Februari 2025 melalui portal Reformasi Birokrasi Nasional. Adapun rincian hasil nilai RB Kementan Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel 57.

Tabel 57. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian TA 2024

No.	Dimensi	Nilai
1.	RB General (skala 1-100)	78,16
2.	RB Tematik (skala 1-10)	6,64

Sumber: KemenPAN-RB, 2025

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,48% dari capaian tahun 2023 sebesar 79,64. Pencapaian nilai RB Kementerian Pertanian dari tahun 2020 hingga 2024 telah menunjukkan progres positif, mencerminkan peningkatan kinerja reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Target dan realisasi indikator nilai RB dalam lima tahun terakhir dijabarkan pada Gambar 31.



Gambar 31. Perkembangan Indeks RB Kementerian Pertanian Tahun 2020-2023

Kementerian Pertanian telah menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General 2024 dengan 28 kegiatan utama, mencakup penyederhanaan birokrasi, penguatan pengawasan, peningkatan layanan publik, serta digitalisasi. Upaya ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan reformasi tercermin dari peningkatan hasil evaluasi indikator RB oleh pihak eksternal dibandingkan tahun 2023, dengan capaian penilaian dapat dilihat pada Tabel 58.





Tabel 58. Capaian Indikator Penilaian RB kementerian Pertanian Tahun 2024

Indikator Penilaian		Realisasi		% 2024/2023
		2023	2024	
RB General				
A. Strategi Pelaksanaan RB General				
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,5	2,55	2,00
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi	89,37	100	11,89
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB				
HARD ELEMENT (Sasaran 1)				
KEBIJAKAN PERCEPATAN				
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	99,92	117,36	17,45
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	4	5	25,00
3	Tingkat Maturitas SPIP	2,99	2,85	-4,68
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1	1	0,00
5	Nilai SAKIP	74,05	74,45	0,54
6	Indeks Perencanaan Pembangunan	81,26	91,03	12,02
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	50,00
8	Tingkat Digitalisasi Arsip	96,84	96,97	0,13
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	89	88,45	-0,62
10	Indeks Pengelolaan Aset	2,76	2,78	0,72
11	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2	3	50,00
12	Indeks Kualitas Kebijakan	66,08	66,08	0,00
13	Indeks Reformasi Hukum	77,97	99,4	27,48
14	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,12	3,67	17,63
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	63,83	69,41	8,74
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)				
KEBIJAKAN PERCEPATAN				
1	Indeks Sistem Merit dan Sistem	273,5	273,5	0,00
2	Indeks Pelayanan Publik			
a.	Indeks Pelayanan Publik	4,59	4,69	2,18
b.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	91,45	87,94	-3,84
C. Capaian Sasaran Strategis RB				
HARD ELEMENT (Sasaran 1)				
1.	Indeks SPBE	3,86	4	3,63
2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja			
a.	Capaian Prioritas Nasional	97,5	98,63	1,16
b.	Capaian IKU	93,75	100	6,67
3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan			
a.	Opini BPK	WTP (5)	WDP (2)	- 60
b.	Tindak Lanjut Rekomendasi	83,8	79,50	-5,13
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)				
1	Indeks BerAkhlak	63,9	68,91	7,84
2	Survei Penilaian Integritas	66,79	74,46	11,48
3	Survei Kepuasan Masyarakat	88,73	90,5	1,99
NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN			76,63	
KOEFISIEN			1,53	
TOTAL RB GENERAL		74,73	78,16	
RB Tematik				
A. Capaian Utama RB Tematik				
1.	Pengentasan Kemiskinan	0,96	0,94	-2,08
2.	Realisasi Investasi	1,5	1,38	-8,00
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	0,94	1,02	8,51
4.	Prioritas Aktual Presiden			
a.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	1,51	1,84	21,85
b.	Pengendalian Inflasi	0	1,46	100,00
TOTAL RB TEMATIK		4,91	6,64	35,23
TOTAL NILAI RB		79,64	84,8	6,48

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2024





Rincian penjelasan dari analisa capaian kinerja indikator komponen CNRB Setjen Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General

Pelaksanaan agenda RB General dilakukan oleh masing-masing unit kerja penanggung jawab lingkup Kementerian Pertanian atau disebut dengan Leading Satker. Selama triwulan I tahun 2024, seluruh leading satker telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi RB General yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Bentuk rencana aksi RB General tahun 2024 adalah berupa 101 Kegiatan dan menghasilkan 17 Dokumen. Capaian rencana aksi pembangunan RB General Kementan tahun 2024 adalah 2,55.

2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General.

Pada Triwulan I Tahun 2024, seluruh leading satuan kerja RB General telah menyusun rencana aksi yang mencakup 101 kegiatan dan 17 dokumen. Dalam penyusunannya, masing-masing leading satuan kerja telah merinci rencana aksi beserta jadwal pelaksanaannya. Evaluator RB Internal, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, melakukan evaluasi periodik setiap triwulan terhadap capaian rencana aksi. Evaluasi dilakukan melalui wawancara dengan leading satuan kerja serta peninjauan evidence periodik yang disampaikan. Hasil evaluasi akhir pada Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi telah diselesaikan, sehingga menjadi dasar dalam penilaian tingkat implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General. Capaian akhir tahun 2024 mencapai 100%.

3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi

Penyederhanaan birokrasi melalui transformasi organisasi berbasis kinerja dan konsep agile berhasil memperoleh nilai sebesar 117,36. Capaian ini didukung oleh penetapan Matriks Penyederhanaan Organisasi, yang mencakup seluruh tingkatan, baik di level Kementerian Pertanian maupun di unit Eselon I. Selain itu, telah dilakukan evaluasi kelembagaan untuk memastikan efektivitas implementasi penyederhanaan struktur organisasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan responsivitas birokrasi dalam mendukung kinerja pemerintahan.

4. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian menyesuaikan sistem kerja pegawai sesuai dengan SE MenPAN RB No. 15 Tahun 2023. Dasar kebijakan yang sebelumnya berdasarkan SE Sekjen No. 365 Tahun 2023 diganti dengan Kepmentan No. 484 Tahun 2023 pada 16 Agustus 2023. Kepmentan ini menjadi evidence dalam evaluasi reformasi birokrasi, sehingga tingkat capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Kementerian Pertanian bernilai 4.

Kepmentan tersebut bertujuan menciptakan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, yang mengatur 8 pola sistem kerja yang mencakup tugas dan tanggung jawab Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT, Administrator, Pengawas, Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana. Pada 2024,





Kementan menargetkan kategori I (5), di mana sistem kerja telah ditetapkan dalam SOP AP, dengan total 179 SOP Makro dan 357 SOP Mikro.

5. Indeks Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN

Sistem Merit dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi, mengutamakan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas tanpa diskriminasi. SE MenPAN RB No. 04 Tahun 2024 menjadi pedoman pengawasan sistem merit pasca pengalihan tugas KASN ke Kementerian PANRB dan BKN.

Pada tahun 2024, BKN sebagai pengawas belum melakukan penilaian penerapan sistem merit untuk seluruh instansi pemerintah. Di Kementerian Pertanian, target Indeks Sistem Merit dan Manajemen ASN Kementerian Pertanian sebesar 273,5 tercapai dengan kategori baik.

6. Indeks Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setiap tahun mengadakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), dengan mekanisme yang diperbarui. Tahun 2024, Kementerian Pertanian melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian mengusulkan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden sebagai unit lokus evaluasi (ULE). Evaluasi berlangsung Juni–September 2024, mencakup sosialisasi pengisian formulir, pengecekan dokumen dan fasilitas, serta pendampingan saat penilaian oleh tim evaluator KemenPAN-RB. Setelah pembinaan dan fasilitasi, Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pertanian meningkat dari 4,59 (2023) menjadi 4,69 (2024), dengan kategori A (pelayanan prima). Capaian ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menjadi contoh bagi unit pelayanan publik lain di Kementerian Pertanian dalam meningkatkan profesionalisme, sarana prasarana, dan kelengkapan dokumen.

7. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Menindaklanjuti surat Ketua Ombudsman RI, Kementerian Pertanian mengusulkan beberapa unit pelayanan publik yang memenuhi kualifikasi layanan administratif perizinan dan non-perizinan. Hasil verifikasi menetapkan BBPPMBTPH (Ditjen Tanaman Pangan) dan BBPMSOH (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan) sebagai lokus penilaian pada Juli 2024, dengan tambahan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian dan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) pada September 2024. Tahun 2023, keempat unit ini memperoleh skor 91,45 (zona hijau, sangat baik), sementara pada 2024 memperoleh 87,94, dengan sasaran mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

8. Indeks BerAkhlah

Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian berpartisipasi dalam ajang Pesta Budaya Kerja BerAKHLAK yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Penilaian dilakukan melalui survei indeks budaya kerja dan survei employee engagement, disertai bukti penguatan budaya kerja. Selain itu, Kementerian Pertanian berkesempatan menampilkan produk kinerjanya dalam pameran. Hasil survei budaya kerja tahun 2024





memperoleh skor 68,91% (cukup sehat), menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam internalisasi budaya kerja BerAKHLAK.

9. Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kementerian Pertanian dilakukan dua kali setahun, melibatkan berbagai unit penyelenggara pelayanan dengan total 120 UPP dan 474 produk layanan. Tujuan survei ini adalah mengukur kepuasan pengguna terhadap 9 unsur layanan publik, mengidentifikasi harapan pengguna, serta memperbaiki layanan yang kurang optimal. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 mencapai 3,62 dengan nilai konversi 90,5, masuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini melebihi target 90 dengan persentase realisasi 100,43%, menunjukkan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

10. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/638/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024, disampaikan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa nilai sebesar 74,45 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pemerintah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

11. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Indeks Perencanaan Pembangunan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan suatu wilayah atau sektor. Indeks ini biasanya mencerminkan sejauh mana suatu perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, berbasis data, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan lokal. Berdasarkan Lembar Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Pertanian dengan Bappenas, Kementerian Pertanian mendapatkan total nilai 91,03 dengan predikat sangat baik.

12. Capaian Prioritas Nasional (PN)

Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional (EKPN) Tahun 2023 menilai kinerja Kementerian/Lembaga dalam mendukung pencapaian PN RKP 2023 berdasarkan dua aspek utama: Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Capaian RO PN. Kementerian Pertanian mencapai kinerja IKSS sebesar 100% dan kinerja RO PN sebesar 97,25%, sehingga menghasilkan capaian PN sebesar 98,63. Selain itu, penyerapan anggaran PN Kementerian Pertanian mencapai 95,73%, yang menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan anggaran.

13. Capaian IKU

Seluruh Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan telah memperoleh capaian kinerja lebih dari 90% (>90%) dari target kinerja yang ditetapkan. Sehingga Kementan memperoleh nilai capaian IKU sebesar 100%.





14. Tingkat Maturitas SPIP

Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP dilakukan dengan mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hasil evaluasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2024 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,85 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 2.

15. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM secara rata-rata tiga tahun terakhir pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

16. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Indikator ini dijadikan ukuran untuk mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Dari hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian melalui Aplikasi OM-SPAN, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian bulan Desember tahun 2024 sebesar 88,45.

17. Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

Berdasarkan KMK Nomor 127/KM.6/2022, IPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi tata kelola Barang Milik Negara (BMN) di K/L sesuai regulasi dan *best practices*. IPA mencakup seluruh siklus pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020, mencakup perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, hingga pengawasan. IPA terdiri dari 4 Sasaran Strategis dengan 8 Parameter: (1) Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif (Hasil Pemeriksaan BPK & PNPB Aset), (2) Kepatuhan terhadap regulasi (Ketepatan Laporan & Asuransi BMN), (3) Pengawasan dan Pengendalian Efektif (Tindak Lanjut Temuan BPK & Pengelolaan BMN), serta (4) Administrasi BMN yang andal (Dokumen Kepemilikan & Kesesuaian Penggunaan BMN). Setiap parameter dinilai dengan indeks 1-4 (Buruk hingga Sangat Baik). Kementerian Pertanian memperoleh skor IPA sebesar 2,78.





18. Opini BPK

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang APBN Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri Pertanian sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian adalah Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun N-1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan (LK) Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2024 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK memberikan opini WDP karena menemukan beberapa permasalahan dalam LK Kementan tahun 2024.

19. Tingkat Digitalisasi Arsip

Penilaian Reformasi Birokrasi di bidang kearsipan tahun 2024 berfokus pada "Tingkat Digitalisasi Arsip," yang mencakup ketersediaan kebijakan, pengelolaan arsip elektronik, implementasi SRIKANDI, kinerja SIKN, serta sumber daya kearsipan. Kementerian Pertanian menargetkan indeks digitalisasi arsip sebesar 97 pada tahun 2024, dengan kegiatan mencakup pemenuhan aspek SDM kearsipan, kinerja SIKN, implementasi SRIKANDI, dan digitasi arsip. Hasil evaluasi tahun 2024 berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024 menunjukkan nilai 96,97 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan).

20. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian Penilaian yang dilakukan LKPP terhadap Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian Pertanian Tahun 2024 hasil sementara mencapai 69,41.

21. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 menajamkan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dengan fokus pada peningkatan kualitas kebijakan dan regulasi melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH). IRH, yang dinilai oleh Kemenkumham, diukur berdasarkan empat aspek: koordinasi dalam harmonisasi regulasi, kompetensi legal drafter, kualitas re-regulasi/deregulasi, dan penataan database peraturan. Pada tahun 2024, hasil penilaian IRH Kementerian Pertanian mencapai 99,40 dari maksimal 100, dengan kategori AA (Istimewa).

22. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

IKK yang dikeluarkan LAN RI mengevaluasi kualitas perumusan kebijakan publik agar efektif, berbasis bukti, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, mencakup





perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan. Capaian IKK Kementerian Pertanian tahun 2024 masih mengacu pada hasil penilaian 2023, mengingat evaluasi dilakukan setiap dua tahun sekali, dengan nilai 66,08 dari 100 (predikat Baik). Hasil ini menjadi dasar peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan analisis kebijakan, peningkatan kapasitas legal drafter, dan optimalisasi evaluasi kebijakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian.

23. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE mengukur sejauh mana kebijakan Arsitektur SPBE diterapkan di instansi pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan selaras dengan tata kelola digital. Penilaian ini mencakup ketersediaan kebijakan, keselarasan regulasi, adopsi teknologi, integrasi layanan digital, serta efektivitas penerapan dalam pelayanan publik. Semakin tinggi tingkat implementasi, semakin baik kesiapan instansi dalam mendukung transformasi digital. Pada 2024, Kementerian Pertanian memperoleh nilai 3.

24. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor

Penerapan Prinsip satu Data Indonesia di Kementan dinilai sudah sangat baik untuk aspek standar data statistik dan aspek metadata statistik, sehingga mengalami peningkatan nilai menjadi 3,67 dengan predikat sangat baik di tahun 2024. Pada kesempatan ini, Kementerian Pertanian mendapatkan penganugerahan Anindhita Wistara Data sebagai Kementerian terbaik pertama tingkat nasional dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

25. Indeks SPBE

Indeks SPBE adalah hasil pengukuran tingkat kemajuan dan keberhasilan penerapan SPBE di instansi pemerintah. Indeks ini memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, terjadi peningkatan Indeks SPBE Kementerian Pertanian dari 3.86 di tahun 2023 menjadi 4.00 di tahun 2024 dengan kategori "Sangat Baik". Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya transformasi digital di Kementan berjalan efektif. Ini berdampak positif pada efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintah.

26. Survei Penilaian Integritas (SPI)

SPI adalah instrumen untuk mengukur risiko korupsi dan efektivitas sistem pencegahannya di instansi pemerintah. SPI melibatkan tiga kelompok responden: pegawai, masyarakat pengguna layanan, dan ahli, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang potensi korupsi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi dan mendorong reformasi sistem anti-korupsi agar lebih transparan dan akuntabel. Pada 2024, Kementerian Pertanian memperoleh skor 74,46, meningkat 7,68 poin dari tahun sebelumnya, namun masih memerlukan tambahan 3,54 poin untuk mencapai kategori Terjaga.





27. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak Lanjut rekomendasi adalah komponen yang menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mendorong perbaikan berkelanjutan. Penilaian ini dilakukan oleh Evaluator Meso (BPK) dengan melihat efektivitas langkah yang diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam audit. Semakin tinggi tingkat penyelesaian rekomendasi, semakin baik akuntabilitas dan tata kelola instansi terkait. Kementan memperoleh skor 79,50 pada tahun 2024.

28. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan

Indikator ini mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dengan capaian skor 3.

29. Realisasi Investasi

RB Tematik adalah strategi dalam Road Map RB 2020–2024 dengan empat tema, salah satunya Peningkatan Investasi. Kementan sebagai *Supporting Agency*, mendukung tema ini salah satunya melalui penyederhanaan prosedur dan kemudahan berusaha. Capaian realisasi investasi tahun 2024, yaitu 1,38.

30. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kementerian Pertanian merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional, mendukung perekonomian dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa. Di Kementerian Pertanian, P3DN diterapkan dalam berbagai aspek, terutama dalam pengadaan barang/jasa, alat dan mesin pertanian, pupuk dan sarana produksi pertanian, serta dalam mendukung riset dan inovasi pertanian berbasis produk lokal. Capaian RB tematik dengan tema P3DN ini sebesar 1,84.

31. Pengentasan Kemiskinan

Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dilakukan pada pemerintah provinsi dengan menilai inisiatif, capaian rencana aksi, dan indikator dampak RB Tematik. Pada tema pengentasan kemiskinan, Kementerian Pertanian memperoleh skor 0,94. Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai program strategis, seperti pemberdayaan petani kecil, peningkatan akses permodalan, serta pendampingan dan pelatihan bagi petani. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mendorong kemandirian petani, serta memperkuat ketahanan pangan yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di sektor pertanian.





32. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting

Sebagai bagian dari upaya mendukung program nasional dalam menurunkan angka stunting, Kementerian Pertanian (Kementan) berperan aktif dengan memberikan bantuan berupa padi kaya gizi (biofortifikasi). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta memastikan ketersediaan sumber nutrisi yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang berisiko mengalami stunting. Capaian pada tahun 2024 terkait tema ini sebesar 1,02.

33. Pengendalian Inflasi

Kementerian Pertanian (Kementan) berperan dalam pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sehingga tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan produksi pangan strategis, operasi pasar untuk menekan fluktuasi harga, distribusi dari daerah surplus ke defisit, serta diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan pada impor. Capaian pada tahun 2024 terkait tema ini sebesar 1,46.

Pencapaian reformasi birokrasi telah menunjukkan hasil yang baik, namun masih diperlukan peningkatan lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja berdasarkan catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh instansi meso, serta upaya strategis lainnya, antara lain:

1. Melakukan perbaikan perencanaan kinerja melalui penyempurnaan proses penjabaran kinerja yang memperhatikan prinsip penyusunan, *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Mendorong seluruh unit kerja memperhatikan capaian tahun sebelumnya dalam penetapan target kinerja pada PK dan melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan terintegrasi ke setiap tingkat/level organisasi.
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mendorong seluruh unit kerja untuk dapat: 1) menjelaskan analisis penetapan target; 2) menyusun laporan secara berkala (triwulan); 3) memanfaatkan sistem informasi; dan 4) memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan perencanaan kinerja kedepan.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memantau tindak lanjut rekomendasi secara berkala dan memperhatikan kualitas tindak lanjut rekomendasi.
5. Menyelesaikan tindak lanjut LHE SPIP terintegrasi tahun 2023 melalui penyusunan rencana aksi yang memadai dan konkret.
6. Memperbaiki sistem anti-korupsi mendorong efektifitas manajemen risiko dalam pengendalian internal.
7. Mendorong penyelesaian tindak lanjut temuan BPK terkait BMN.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait proses pelaksanaan tindak lanjut atas usulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sulit untuk dilakukan, termasuk menindaklanjuti BMN dengan kondisi Rusak Berat.





9. Memanfaatkan dan mengoptimalkan sistem informasi untuk mendukung pertanggungjawaban belanja barang di lingkungan Kementerian Pertanian.
10. Mengoptimalkan KPA dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi belanja barang serta memedomani ketentuan yang berlaku.
11. Mendorong PPK lebih cermat dalam melakukan pengujian dokumen pertanggungjawaban dan perhitungan rampung serta meningkatkan kepatuhan atas peraturan yang berlaku.
12. Mengoptimalkan rewiu pertanggungjawaban belanja barang MAK 526 yang telah diunggah dalam aplikasi pertanggungjawaban.





SS 4. IKU 13 Nilai IKPA Kementerian Pertanian	
Target 89,50%	Realisasi 89,51%
% Capaian 101,01% Sangat Berhasil	

Sesuai amanat Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, pengendalian belanja, dan peningkatan efisiensi anggaran belanja dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun elemen pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas perencanaan anggaran;
- 2) Kualitas pelaksanaan anggaran;
- 3) Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan pemantauan secara periodik dilakukan melalui OM-SPAN masing-masing Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran. Nilai IKPA dirilis secara periodik setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatan yang ada pada satkernya. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan 8 (delapan) indikator penilaian yaitu terdiri dari:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) Pengelolaan UP dan TUP
- 7) Dispensasi SPM
- 8) Capaian Output





Kategori penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4, yaitu:

Nilai IKPA:

≥ 95 (sangat baik)

89 ≤ Nilai IKPA < 95 (baik)

70 ≤ Nilai IKPA < 89 (cukup)

Nilai IKPA < 70 (kurang)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Indikator ini dijadikan ukuran untuk mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Dari hasil evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian melalui Aplikasi OM-SPAN, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian bulan Desember tahun 2024 per tanggal 28 Februari 2025, seperti tabel 59.

Tabel 59. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	Nilai	99.72	71.27	87.26	90.90	99.12	95.16	95.50	90.51	100%	1.00	89.51
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.97	10.69	17.45	9.09	9.91	9.52	23.88				
			Nilai Aspek	85.50		93.11				95.50				

Sumber: Aplikasi OM-SPAN tanggal 28 Februari Januari 2025

Berdasarkan Tabel dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian berdasarkan aplikasi OM-SPAN terhitung tanggal 28 Februari 2025 sebesar 89,51 dengan target nilai 89,50 (baik) sehingga capaian kinerja indikator ini tercapai 100,01% (sangat berhasil).
- 2) Indikator Kualitas Perencanaan Anggaran mendapatkan nilai paling rendah dibandingkan dua aspek yang lain yaitu sebesar 85,55 khususnya pada sub aspek deviasi halaman III DIPA dengan nilai 71,27 dari skala 100, hal ini disebabkan antara lain oleh:
 - Kurangnya perhatian satuan kerja pada keakuratan realisasi dengan rencana penarikan dana;
 - Satuan kerja tidak melakukan revisi/pemutakhiran halaman III DIPA;
 - Terdapat kegiatan satuan kerja yang bersifat insidental/tidak dapat diprediksi;
 - RPD halaman III DIPA tidak disusun dengan benar.

Permasalahan lain dapat terjadi pada satuan kerja selain rendahnya Nilai Deviasi Halaman III DIPA, antara lain rendahnya nilai penyerapan anggaran yang disebabkan





oleh realisasi anggaran satker Kementerian Pertanian sebagian besar masih menumpuk di akhir tahun anggaran, dan rendahnya nilai capaian output yang disebabkan oleh satuan kerja melakukan penginputan capaian output terlambat dan tidak akurat. Mulai Tahun 2024 terdapat formulasi baru pada penghitungan IKPA, semula Dispensasi SPM merupakan komponen dalam penghitungan IKPA menjadi dihitung diluar komponen IKPA yaitu sebagai pengurang IKPA. Pengurangan tersebut dihitung di akhir tahun. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKPA Kementerian Pertanian tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 60. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKPA Kementerian Pertanian

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian	89,50	89,51	101,01%

Apabila dibandingkan dengan capaian IKPA tahun 2023, capaian tahun 2024 meningkat sebesar 1,26%. Adapun tren capaian nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian (IKPA) selama 5 (lima) tahun (2020-2024) sebagai berikut:

Tabel 61. Perkembangan nilai IKPA tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian	85,31	89,59	87,99	88,40	89,51

Tahun 2024 merupakan tahun akhir Renstra 2020-2024, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Pertanian telah mencapai target jangka menengah sebesar 101,01%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Membangun koordinasi yang efektif dengan membuat sarana komunikasi di lingkup Eselon I Kementerian Pertanian yang menangani Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, dan Monev dimana setiap awal bulan menjadi media untuk menginformasikan kepada seluruh Eselon I untuk mengingatkan satuan kerja dibawah koordinasinya untuk melakukan pengisian capaian output secara tepat waktu,
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (triwulanan) terkait pelaksanaan anggaran dengan Kementerian Keuangan, yang hasilnya berupa rekomendasi untuk dilakukan perbaikan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian beserta satuan kerja dibawahnya.





Untuk memaksimalkan nilai IKPA, khususnya untuk indikator yang masih rendah, perlu mendapatkan perhatian dari seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian. Beberapa strategi dalam pencapaian IKPA maksimal, antara lain:

- 1) Meningkatkan capaian nilai IKPA bagi Eselon I dan Satker yang mempunyai nilai kategori Kurang dan Cukup;
- 2) Mempertahankan capaian nilai IKPA bagi Eselon I dan Satker yang mempunyai nilai kategori Baik dan Sangat Baik;
- 3) Strategi Optimalisasi Indikator Revisi DIPA:
 - a) Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan) untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker/K/L;
 - b) Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi;
 - c) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih ada anggaran yang diberi catatan dalam DIPA (blokir anggaran).
- 4) Strategi Optimalisasi Indikator Deviasi Halaman III DIPA:
 - a) Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan Satker/K/L;
 - b) Memastikan seluruh unit kerja Satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA;
 - c) Mengajukan revisi RPD Halaman III DIPA sebelum batas cut off RPD triwulanan (paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan); - bulan Februari untuk triwulan I; - bulan April untuk triwulan II; - bulan Juli untuk triwulan III; dan - bulan Oktober untuk riwulan IV.
 - d) Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen) di setiap bulannya.
- 5) Strategi Optimalisasi Indikator Penyerapan Anggaran:
 - a) Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;
 - b) b. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;
 - c) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- 6) Strategi Optimalisasi Indikator Belanja Kontraktual:
 - a) Mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran;
 - b) Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025;
 - c) Segera menyusun RUP di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan awal tahun anggaran;





- d) Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan paling lambat Semester I tahun 2025.
- 7) Strategi Optimalisasi Indikator Penyelesaian Tagihan:
 - a) Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin);
 - b) Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.
- 8) Strategi Optimalisasi Indikator Pengelolaan UP dan TUP:
 - a) Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan;
 - b) Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan;
 - c) Memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional Satker.
- 9) Strategi Optimalisasi Indikator Dispensasi SPM:
 - a) Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran;
 - b) Menetapkan mitigasi resiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran;
 - c) Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.
- 10) Strategi Optimalisasi Indikator Capaian Output, meliputi:
 - a) Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output;
 - b) Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis;
 - c) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran;
 - d) Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (lima hari kerja pada bulan berikutnya);
 - e) Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah terkonfirmasi.





B. Capaian Kinerja Lainnya

Sebagai langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, Kementerian Pertanian terus memperkuat peran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 117 Tahun 2022 dan Permentan Nomor 19 Tahun 2022. Selama tahun 2024, BSIP telah melaksanakan berbagai program penguatan standardisasi instrumen pertanian, di antaranya penyusunan dan harmonisasi standar nasional di sektor pertanian, perbanyakan benih sumber terstandar, serta peningkatan implementasi standar pada alsintan, pupuk, kesehatan hewan, dan produk olahan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar domestik dan internasional, BSIP juga memperkuat kerja sama dengan lembaga sertifikasi dan industri hilir. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. BSIP berperan dalam meningkatkan daya saing komoditas pertanian melalui penerapan standar instrumen pertanian. Keberhasilan ini diukur dengan melihat persentase penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diadopsi atau diterapkan oleh pengguna.

Pada tahun 2024, capaian penerapan standar instrumen pertanian mencapai 6%, atau sekitar 80,70% dari target yang telah ditetapkan, yang dikategorikan sebagai berhasil. Perhitungan indikator ini didasarkan pada jumlah SNI yang disusun oleh BSIP pada tahun 2023 dan jumlah SNI yang telah diterapkan oleh pengguna sepanjang tahun 2024. Hingga saat ini, sebanyak 24 SNI telah diterapkan oleh pengguna, dengan rincian sebagai berikut:

- **10 SNI** dari BBPSI Mekanisasi
- **5 SNI** dari PSI PKH
- **1 SNI** dari BBPSI SDLP
- **2 SNI** dari PSI Hortikultura
- **1 SNI** dari PSI Perkebunan
- **1 SNI** dari PSI Tanaman Pangan (TP)
- **3 SNI** dari BBPSI Pascapanen
- **1 SNI** dari BBPSI Biogen

Sebagai bagian dari Kementerian Pertanian, BSIP juga memiliki peran dalam penerapan standar pengelolaan perbenihan untuk memastikan benih yang dihasilkan sesuai dengan standar nasional. Untuk itu, Unit Pengelola Benih Terstandar (UPBS) BSIP bertanggung jawab dalam persiapan, produksi, dan distribusi benih/bibit dengan dukungan sarana, prasarana, serta tenaga terampil. Proses pengelolaan benih mencakup produksi, panen, pasca panen, pengemasan, pelabelan, pengangkutan, dan distribusi. Ketersediaan benih/bibit diusahakan sesuai dengan prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan harga).

Pemanfaatan benih dilakukan melalui penjualan (PNBP) sesuai tarif pemerintah dan hibah kepada petani atau kelompok tani yang ditetapkan oleh balai. Benih yang





dimanfaatkan berasal dari stok tahun sebelumnya (2023) dan produksi tahun berjalan (2024), dengan ketentuan tidak termasuk benih konsumsi dan kadaluarsa. Semua benih/bibit yang dimanfaatkan telah tersertifikasi oleh lembaga berwenang. Pada tahun 2024, produk pertanian terstandar yang dihasilkan dan dimanfaatkan meliputi benih tanaman pangan seperti padi dan jagung. Dengan pencapaian ini, BSIP terus berupaya meningkatkan standar pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Tabel 62. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan dan dimanfaatkan pada tahun 2024

No	IKSP/IKA	Realisasi
1	Jumlah produk tanaman pangan terstandar yang dimanfaatkan	388,00
	Jumlah produk tanaman pangan terstandar yang dihasilkan	934,93
Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dimanfaatkan		388,00
Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan		934,93
Tingkat Kemanfaatan Produk Instrumen Pertanian Terstandar (persen)		41,50

Sumber: BSIP, 2024

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2024 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan. Apresiasi yang diberikan oleh pihak eksternal merupakan bukti keberhasilan kinerja Kementerian Pertanian dimata publik dalam memberikan pelayanan publik, inovasi pelayanan, kepatuhan terhadap peraturan dan upaya lainnya dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Penghargaan ini tidak hanya semata sebagai pembuktian upaya nyata Kementerian Pertanian, namun juga menjadi pemicu semangat untuk semakin meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Apresiasi tersebut antara lain:

1. Penghargaan Sangat Baik Untuk Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Kementerian Pertanian meraih penghargaan 'Sangat Baik' dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atas kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), sesuai Perpres 42/2020. Penilaian ini bertujuan mengevaluasi percepatan berusaha serta memberikan insentif atau koreksi bagi K/L. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan swasembada, sesuai arahan Presiden Prabowo, didukung oleh perbaikan layanan publik.





Gambar 32. Piagam Penghargaan Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha

2. Anugerah Top Digital Awards 2024

Kementerian Pertanian pada tahun 2024 kembali meraih penghargaan untuk dua penghargaan sekaligus dalam ajang Top Digital Awards 2024. Adapun penghargaan yang diterima yaitu 'Top Digital Implementation 2024 #Level Stars 5' untuk Pusdatin Kementerian Pertanian dan 'Top Leader on Digital Implementation 2024' untuk Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.



Gambar 33. Penghargaan Top Digital Awards Tahun 2024

3. Bhumandala Awards

Kementan memperoleh penghargaan Bhumandala Ariti atas kontribusinya dalam penyusunan peta lahan peternakan skala 1:50.000. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kementan dalam pemetaan sumber daya alam yang dapat menunjang pengelolaan peternakan di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.





Gambar 34. Kementan Raih Bhumandala Awards Tahun 2024

4. Anindhita Wistara Data dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2024 disampaikan bahwa nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kementerian Pertanian adalah 3,67 dengan predikat sangat baik. Pada kesempatan ini, Kementerian Pertanian mendapatkan penganugerahan Anindhita Wistara Data sebagai Kementerian terbaik pertama tingkat nasional dalam penyelenggaraan statistik sektoral.



Gambar 35. Penyerahan Penghargaan Anindhita Wistara Data

5. Anugerah Media Humas

Kementerian Pertanian kembali meraih penghargaan Komunikasi Publik untuk keempat kalinya dalam Anugerah Media Humas (AMH) 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo. Melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kementan meraih Terbaik 1 dalam kategori Kampanye Komunikasi Publik Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD dengan tema *Gerak Cepat Atasi Kekeringan*. Penghargaan ini diberikan atas kecepatan dan ketepatan Kementan dalam menyampaikan informasi serta menjalankan langkah konkret menghadapi kekeringan, termasuk program pompanisasi





yang terbukti membantu petani menjaga produktivitas lahan di tengah ancaman iklim ekstrem.



Gambar 36. Sertifikat dan Piagam Terbaik I Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024

C. Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan 4 program kegiatan pembangunan pertanian tahun 2024, Kementerian Pertanian memperoleh dukungan anggaran APBN sebesar Rp15.585.644.566.000,- dengan realisasi sebesar Rp14.272.137.630.919,- atau mencapai 91,57%. Pada tahun 2024, terdapat pagu blokir *automatic adjustment* pada anggaran Kementan sebesar Rp421.829.409.000,-, dan penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp52.915.964.000,- maka pagu efektif Kementerian Pertanian menjadi Rp15.110.899.193.000,- sehingga realisasi Kementan tahun 2024 berdasarkan pagu efektif sebesar 94,45%.

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan *automatic adjustment* yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan (2) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA. 2024 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan mengampu 4 (empat) program Kementerian Pertanian. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 9**.







BAB IV PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik).

Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran strategis, 12 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil dan 1 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil. Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (3) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (4) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (5) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (6) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (7) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian; (8) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (9) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; dan (10) Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya; (11) Nilai Reformasi Birokrasi kementerian Pertanian; dan (12) Nilai IKPA Kementerian Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian.

Keberhasilan yang dicapai Kementerian' Pertanian pada tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung mencakup program-program yang berkontribusi secara signifikan terhadap capaian 13 indikator kinerja strategis, sementara dukungan tidak langsung meliputi pengelolaan dan pengawasan internal untuk menciptakan sistem kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel

Meskipun banyak pencapaian yang telah diraih, tantangan di sektor pertanian masih harus dihadapi, antara lain penurunan produksi beberapa komoditas strategis, keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, penurunan harga komoditas di tingkat petani dan peternak, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) serta penyakit strategis lainnya, serangan hama dan penyakit tanaman, serta kondisi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. Selain itu, kebijakan automatic adjustment yang diterapkan pada pertengahan tahun juga turut berdampak terhadap pencapaian target produksi komoditas pangan strategis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan





berbagai langkah strategis, seperti pengembangan korporasi petani, penguatan regulasi, pengembangan kawasan komoditas, peningkatan produksi dan kualitas komoditas berorientasi ekspor, pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan, mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, serta pemetaan potensi pengembangan lahan pertanian.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, Kementerian Pertanian mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp15,58 triliun dengan realisasi sebesar Rp14,27 triliun atau mencapai 91,57%. Setelah memperhitungkan pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp474,75 miliar, tingkat realisasi anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2024 menjadi sebesar 94,45%. Efektivitas dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran menjadi faktor penting dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya bergantung pada Kementerian Pertanian semata, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, Kementerian Pertanian optimistis dapat menghadapi tantangan ke depan dan terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

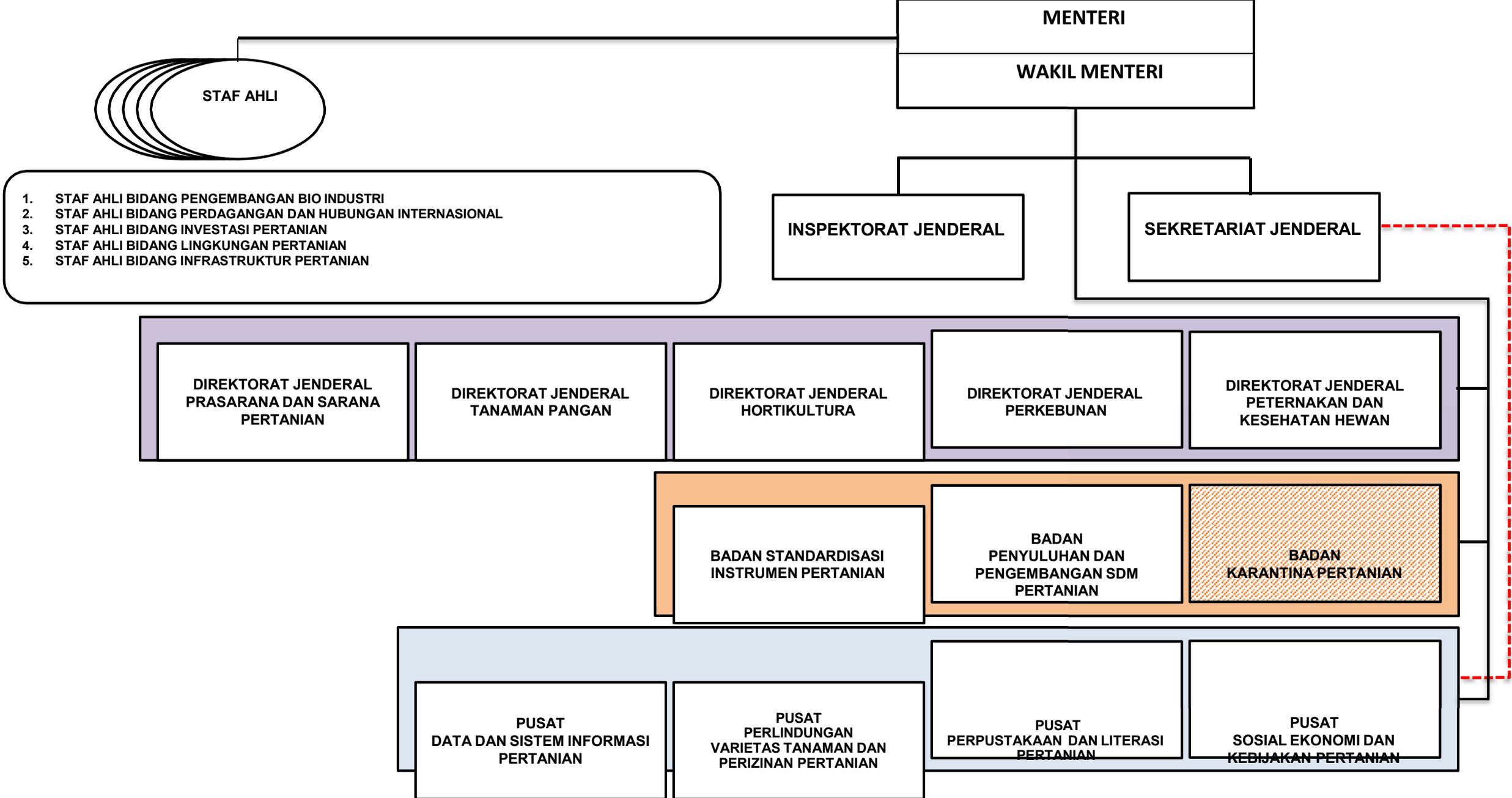




LAMPIRAN



Lampiran 1. Bagan Susunan Organisasi Kementerian Pertanian



Lampiran 2. Distribusi Jumlah pegawai Kementan Tahun 2024

Eselon I	Jenis Kelamin		Pendidikan											Golongan				Total
	L	P	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	SM	D4	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.004	742	29	28	240	1	1	89		112	438	660	148	9	216	1.150	371	1.746
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	2.035	1.528	64	62	1.057	1	1	360		133	960	769	156	34	808	2.404	317	3.563
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	159	186	1	3	42			9			176	106	8		22	248	75	345
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	330	392		2	63			54		16	391	193	3	1	53	526	142	722
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	999	798	16	23	403		2	277		32	428	589	27	6	310	1.094	387	1.797
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	181	143			28			7	1	1	165	113	9		9	238	77	324
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	261	287	1	4	89			49		1	254	138	12		53	391	104	548
INSPEKTORAT JENDERAL	137	126			16			8			120	118	1		8	176	79	263
SEKRETARIAT JENDERAL	568	433	1	4	154	2	1	73	2	3	407	317	37	1	62	743	195	1.001
Grand Total	5.674	4.635	112	126	2.092	4	5	926	3	298	3.339	3.003	401	51	1.541	6.970	1.747	10.309



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 22 Desember 2023

Menteri Pertanian

Andi Amran Sulaiman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PERTANIAN**

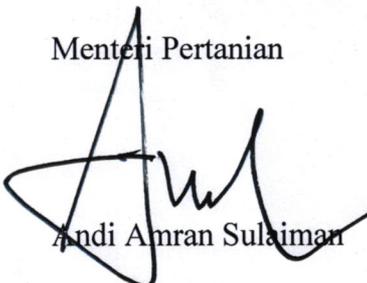
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1.33 %
		1.2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	86.00 %
		1.3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	70.90 %
		1.4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80.50 %
		1.5	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	58.00%
		1.6	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	90.56 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2.1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	88.53 %
		2.2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	6.53 %
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	3.1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	90.00 %
		3.2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	22.00 %
		3.3	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	90.00 %

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
4	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	4.1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	82.96 Nilai
		4.2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	92.73 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 844.686.819.000
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1.817.720.856.000
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 7.949.054.436.000
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.216.563.326.000
Total Pagu	Rp. 14.828.025.437.000

Jakarta, 22 Desember 2023

Menteri Pertanian



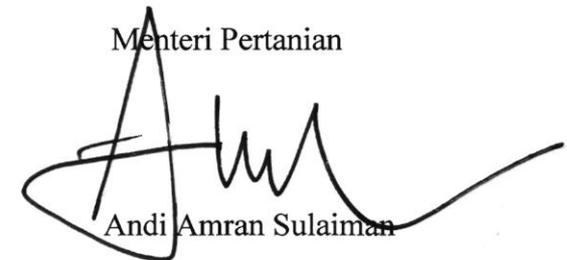
Andi Amran Sulaiman

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023

NO	ESELON I	PROGRAM (Rp)				TOTAL PAGU (Rp)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	DUKUNGAN MANAJEMEN	
1	Sekretariat Jenderal	-	-	-	1.337.517.912.000	1.337.517.912.000
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	131.030.528.000	131.030.528.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	-	724.151.899.000	2.522.810.586.000	162.280.470.000	3.409.242.955.000
4	Ditjen Hortikultura	-	128.526.059.000	658.446.822.000	120.185.074.000	907.157.955.000
5	Ditjen Perkebunan	-	843.994.361.000	-	186.877.689.000	1.030.872.050.000
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	27.657.764.000	1.916.571.581.000	314.121.164.000	2.258.350.509.000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	-	-	2.514.395.317.000	177.018.981.000	2.691.414.298.000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	-	93.390.773.000	49.059.788.000	751.162.145.000	893.612.706.000
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	844.686.819.000	-	-	270.103.503.000	1.114.790.322.000
10	Badan Karantina Pertanian	-	-	287.770.342.000	766.265.860.000	1.054.036.202.000
JUMLAH		844.686.819.000	1.817.720.856.000	7.949.054.436.000	4.216.563.326.000	14.828.025.437.000

Jakarta, 22 Desember 2023

Menteri Pertanian



Andi Amran Sulaiman



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Agustus 2024

Menteri Pertanian

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a final flourish. The signature is written over the printed name 'Andi Amran Sulaiman'.

Andi Amran Sulaiman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PERTANIAN**

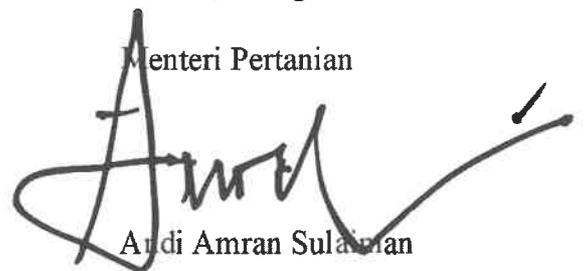
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1.33 %
		1.2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	91.94 %
		1.3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	89.87 %
		1.4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80.50 %
		1.5	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	58.00%
		1.6	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	94.62 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2.1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	91.19 %
		2.2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	6.53%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	3.1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	90.00 %
		3.2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	22.00 %

		3.3	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	90.00 %
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
4	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	4.1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian	84.76 Nilai
		4.2	Nilai IKPA Kementerian Pertanian	89.50 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 881.262.463.000
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1.434.770.892.000
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 9.742.084.458.000
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.504.849.012.000
Total Pagu	Rp. 15.544.966.825.000

Jakarta, 23 Agustus 2024

Menteri Pertanian



Andi Amran Sulaiman

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2024

NO	ESELON I	PROGRAM (Rp)				TOTAL PAGU (Rp)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	DUKUNGAN MANAJEMEN	
1	Sekretariat Jenderal	-	-	-	1.268.361.497.000	1.268.361.497.000
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	124.237.528.000	124.237.528.000
3	Ditjen. Tanaman Pangan	-	620.000.000.000	2.426.086.726.000	162.361.781.000	3.208.448.507.000
4	Ditjen. Hortikultura	-	125.811.622.000	180.904.503.000	125.922.596.000	432.638.721.000
5	Ditjen Perkebunan	-	517.098.210.000	-	195.592.839.000	712.691.049.000
6	Ditjen. PKH	-	33.565.000.000	537.749.272.000	386.242.401.000	957.556.673.000
7	Ditjen .PSP	-	-	6.554.343.957.000	175.613.570.000	6.729.957.527.000
8	BSIP	-	138.296.060.000	25.000.000.000	760.875.739.000	924.171.799.000
9	BPPSDMP	881.262.463.000	-	-	305.641.061.000	1.186.903.524.000
		881.262.463.000	1.434.770.892.000	9.724.084.458.000	3.504.849.012.000	15.544.966.825.000

Jakarta, 23 Agustus 2024

Menteri Pertanian



Andi Amran Sulaiman



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 September 2024

Menteri Pertanian

Andi Amran Sulaiman

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PERTANIAN**

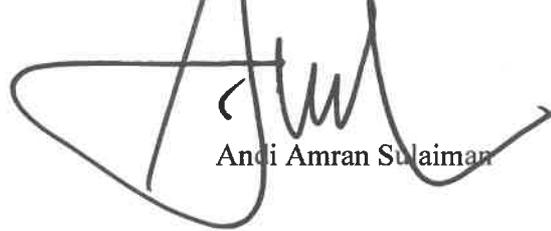
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1.33 %
		1.2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	91.94 %
		1.3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	89.87 %
		1.4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80.50 %
		1.5	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	58.00%
		1.6	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	94.62 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2.1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	91.19 %
		2.2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	6.53%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	3.1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	90.00 %
		3.2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	22.00 %

		3.3	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	90.00 %
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
4	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	4.1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian	84.76 Nilai
		4.2	Nilai IKPA Kementerian Pertanian	89.50 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 881.262.463.000
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1.438.611.022.000
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 9.736.768.354.000
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.490.352.714.000
Total Pagu	Rp. 15.546.994.553.000

Jakarta, 3 September 2024

Menteri Pertanian



Andi Amran Sulaiman

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2024

NO	ESELON I	PROGRAM				TOTAL PAGU (Rp)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	DUKUNGAN MANAJEMEN	
1	Sekretariat Jenderal	-	-	-	1.238.329.731.000	1.238.329.731.000
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	125.024.676.000	125.024.676.000
3	Ditjen. Tanaman Pangan	-	620.000.000.000	2.501.766.726.000	158.681.781.000	3.280.448.507.000
4	Ditjen. Hortikultura	-	125.811.622.000	180.904.503.000	126.783.646.000	433.499.771.000
5	Ditjen. Perkebunan	-	520.938.340.000	-	191.752.709.000	712.691.049.000
6	Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	33.565.000.000	539.333.168.000	415.069.801.000	987.967.969.000
7	Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian	-	-	6.489.763.957.000	168.193.570.000	6.657.957.527.000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	-	138.296.060.000	25.000.000.000	760.875.739.000	924.171.799.000
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	881.262.463.000	-	-	305.641.061.000	1.186.903.524.000
		881.262.463.000	1.438.611.022.000	9.736.768.354.000	3.490.352.714.000	15.546.994.553.000

Jakarta, 3 September 2024

Menteri Pertanian



Andi Amran Sulaiman



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2024

Menteri Pertanian

Andi Amran Sulaiman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PERTANIAN**

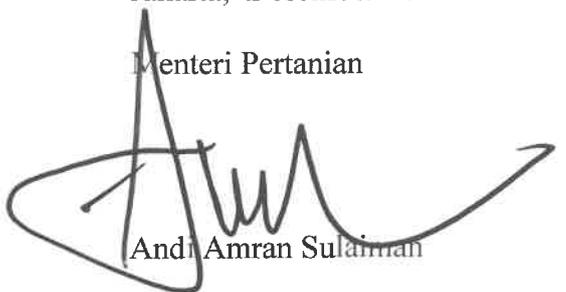
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1.33 %
		1.2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	91.94 %
		1.3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	89.87 %
		1.4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80.50 %
		1.5	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	54,47%
		1.6	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	94.62 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2.1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	91.19 %
		2.2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	6.53%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	3.1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	90.00 %
		3.2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	22.00 %
		3.3	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	90.00 %

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
4	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	4.1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian	84.76 Nilai
		4.2	Nilai IKPA Kementerian Pertanian	89.50 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 883.332.334.000,-
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1.452.575.803.000,-
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 9.760.469.480.000,-
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.484.858.505.000,-
TOTAL PAGU ANGGARAN	Rp. 15.581.236.122.000,-
<i>Keterangan :</i>	
<i>(Total Pagu Anggaran Terblokir Kementerian Pertanian</i>	<i>Rp. 650.831.573.000,-)</i>
<i>Rincian Blokir :</i>	
- <i>Blokir AA</i>	<i>Rp. 421.829.409.000,-</i>
- <i>Blokir Perjalanan Dinas</i>	<i>Rp. 52.915.964.000,-</i>

Jakarta, Desember 2024

Menteri Pertanian



Andi Amran Sulaiman

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2024

NO	ESELON I	PROGRAM (Rp)					TOTAL PAGU (Rp)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	DUKUNGAN MANAJEMEN		
1	Sekretariat Jenderal	-	-	-	1.239.107.837.000	1.239.107.837.000	
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	125.024.676.000	125.024.676.000	
3	Ditjen. Tanaman Pangan	-	620.000.000.000	2.500.153.374.000	158.681.781.000	3.278.835.155.000	
4	Ditjen. Hortikultura	-	125.811.622.000	180.904.503.000	126.783.646.000	433.499.771.000	
5	Ditjen Perkebunan	-	522.076.700.000	-	191.752.709.000	713.829.409.000	
6	Ditjen. PKH	-	33.465.000.000	563.034.294.000	413.089.801.000	1.009.589.095.000	
7	Ditjen. PSP	-	-	6.491.377.309.000	168.193.570.000	6.659.570.879.000	
8	BSIP	-	151.222.481.000	25.000.000.000	756.583.424.000	932.805.905.000	
9	BPPSDMP	883.332.334.000	-	-	305.641.061.000	1.188.973.395.000	
	Total	883.332.334.000	1.452.575.803.000	9.760.469.480.000	3.484.858.505.000	15.581.236.122.000	

Jakarta, Desember 2024

Menteri Pertanian



Andi Amran Sulaiman



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2024

Menteri Pertanian

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amran', written over the printed name 'Andi Amran Sulaiman'. The signature is stylized and cursive.

Andi Amran Sulaiman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	1.33 %
		1.2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (Asal Hewan)	91.94 %
		1.3	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	89.87 %
		1.4	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80.50 %
		1.5	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	54,47%
		1.6	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	94.62 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2.1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	91.19 %
		2.2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	6.53%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	3.1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	90.00 %
		3.2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	22.00 %

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
		3.3	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	90.00 %
4	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	4.1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian	84.76 Nilai
		4.2	Nilai IKPA Kementerian Pertanian	89.50 Nilai

KEGIATAN

1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	883.133.434.000,-
2	Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp.	1.441.428.277.000,-
3	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	9.757.198.315.000,-
4	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.482.946.144.000,-

ANGGARAN

TOTAL PAGU ANGGARAN

Rp. 15.564.706.170.000,-

Keterangan :

(Total Pagu Anggaran Terblokir Kementerian Pertanian

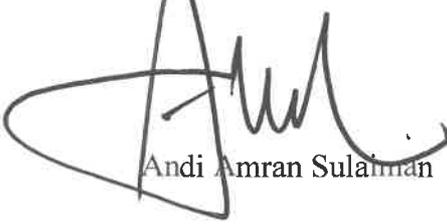
Rp. 650.831.573.000,-)

Rincian Blokir :

- *Blokir AA* **Rp. 421.829.409.000,-**
- *Blokir Perjalanan Dinas* **Rp. 52.915.964.000,-**

Jakarta, November 2024

Menteri Pertanian



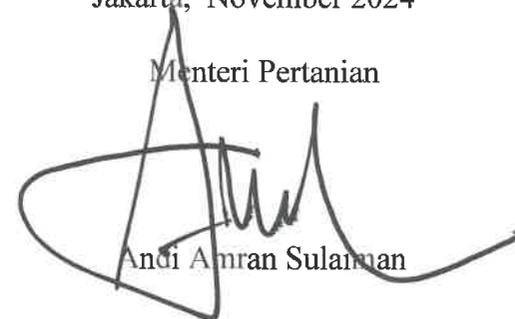
Andi Amran Sulaiman

LAMPIRAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2024

NO	ESELON I	PROGRAM (Rp)				
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	DUKUNGAN MANAJEMEN	TOTAL PAGU (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	-	-	-	1.239.107.837.000	1.239.107.837.000
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	125.024.676.000	125.024.676.000
3	Ditjen. Tanaman Pangan	-	620.000.000.000	2.501.766.726.000	158.681.781.000	3.280.448.507.000
4	Ditjen. Hortikultura	-	125.811.622.000	180.904.503.000	126.783.646.000	433.499.771.000
5	Ditjen Perkebunan	-	520.938.340.000	-	191.752.709.000	712.691.049.000
6	Ditjen. PKH	-	33.465.000.000	559.763.129.000	411.972.801.000	1.005.200.930.000
7	Ditjen .PSP	-	-	6.489.763.957.000	168.193.570.000	6.657.957.527.000
8	BSIP	-	141.213.315.000	25.000.000.000	755.788.063.000	922.001.378.000
9	BPPSDMP	883.133.434.000	-	-	305.641.061.000	1.188.774.495.000
	Total	883.133.434.000	1.441.428.277.000	9.757.198.315.000	3.482.946.144.000	15.564.706.170.000

Jakarta, November 2024

Menteri Pertanian



Andi Amran Sulaiman

Lampiran 4. Pagu Anggaran Kementerian Pertanian per Eselon I berdasarkan Sumber Dana

No	Eselon I	Sumber Dana (Rp000)						Total (Rp000)
		RM	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN	
018	TOTAL	13.849.395.433	283.876.409	67.440.500	237.674.281	1.513.125	294.999.763	14.734.899.511
1	SETJEN	1.503.995.212	3.834.355	-	-	-	-	1.507.829.567
2	ITJEN	124.237.528	-	-	-	-	-	124.237.528
3	DITJEN TP	3.001.101.763	1.150.893	-	-	-	-	3.002.252.656
4	DITJEN HORTI	1.001.491.086	-	-	5.000.000	-	-	1.006.491.086
5	DITJEN BUN	1.066.246.770	1.219.059	-	-	-	-	1.067.465.829
6	DITJEN PKH	2.227.951.066	33.360.465	67.440.500	-	-	214.299.763	2.543.051.794
7	DITJEN PSP	2.425.954.390	-	-	150.000.000	-	-	2.575.954.390
8	BSIP	884.915.149	15.516.313	-	25.000.000	-	50.000.000	975.431.462
9	BPPSDMP	849.351.651	7.672.324	-	57.674.281	1.513.125	30.700.000	946.911.381
10	BARANTAN	764.150.818	221.123.000	-	-	-	-	985.273.818

Pagu Anggaran Kementerian Pertanian per Eselon I berdasarkan Program

No	Eselon I	Program (Rp000)				Jumlah (Rp000)
		Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Dukungan Manajemen	
018	TOTAL	8.197.523.294	1.422.474.962	641.270.320	4.473.630.935	14.734.899.511
1	SETJEN	-	-	-	1.507.829.567	1.507.829.567
2	ITJEN	-	-	-	124.237.528	124.237.528
3	DITJEN TP	2.576.665.655	263.225.220	-	162.361.781	3.002.252.656
4	DITJEN HORTI	754.756.868	125.811.622	-	125.922.596	1.006.491.086
5	DITJEN BUN	-	871.873.120	-	195.592.709	1.067.465.829
6	DITJEN PKH	2.124.244.393	33.565.000	-	385.242.401	2.543.051.794
7	DITJEN PSP	2.410.573.368	-	-	165.381.022	2.575.954.390
8	BSIP	77.000.000	128.000.000	-	770.431.462	975.431.462
9	BPPSDMP	-	-	641.270.320	305.641.061	946.911.381
10	BARANTAN	254.283.010	-	-	730.990.808	985.273.818

Pagu Anggaran Kementerian Pertanian per Eselon I berdasarkan Jenis Belanja

No	Eselon I	Jenis Belanja (Rp000)			Jumlah (Rp000)
		Belanja Pegawai (001)	Belanja Barang Ops. (002)	Belanja Non Operasional (Rp000)	
018	TOTAL	2.261.921.049	1.132.224.342	11.340.754.120	14.734.899.511
1	SETJEN	1.169.053.071	130.352.676	208.423.820	1.507.829.567
2	ITJEN	22.463.360	6.070.389	95.703.779	124.237.528
3	DITJEN TP	56.307.720	26.183.226	2.919.761.710	3.002.252.656
4	DITJEN HORTI	25.370.686	18.000.000	963.120.400	1.006.491.086
5	DITJEN BUN	57.736.686	24.175.374	985.553.769	1.067.465.829
6	DITJEN PKH	146.908.883	176.674.344	2.219.468.567	2.543.051.794
7	DITJEN PSP	25.800.000	15.000.000	2.535.154.390	2.575.954.390
8	BSIP	294.806.914	327.257.724	353.366.824	975.431.462
9	BPPSDMP	144.282.291	99.798.483	702.830.607	946.911.381
10	BARANTAN	319.191.438	308.712.126	357.370.254	985.273.818

Lampiran 5. Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura Tahun 2023-2024

Komoditas	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Alpukat	45,00	0,00	100,00	146,84	-	100,00
Aneka Cabai	20173,83	24,86	99,88	21.038,50	2,07	99,99
Anggrek	0,19	0,00	100,00	0,07	-	100,00
Bawang Merah	6976,50	53,61	99,23	6.356,37	1,90	99,97
Bawang Putih	151,20	0,00	100,00	93,78	-	100,00
Belimbing	30,32	0,00	100,00	29,01	-	100,00
Buah Naga	237,59	0,10	99,96	313,31	-	100,00
Durian	569,59	0,00	100,00	454,61	-	100,00
Jagung Manis	1207,97	0,00	100,00	1.443,91	-	100,00
Jahe	183,09	2,00	98,91	318,18	-	100,00
Jambu Air	27,98	0,00	100,00	22,03	-	100,00
Jambu Biji/Kristal	87,44	0,06	99,93	217,75	1,80	99,17
Jeruk	7249,57	149,75	97,93	13.744,13	43,73	99,68
Kelengkeng	87,21	0,00	100,00	115,00	-	100,00
Kentang	2120,08	0,00	100,00	1762,14	-	100,00
Krisan	23,55	0,00	100,00	15,87	-	100,00
Kubis	2996,63	2,00	99,93	2476,11	-	100,00
Kunyit	21,20	0,00	100,00	13,30	-	100,00
Mangga	2615,83	20,81	99,20	3.597,15	-	100,00
Manggis	318,09	0,00	100,00	247,53	-	100,00
Mawar	39,15	0,00	100,00	15,48	-	100,00
Melati	-	-	-	1,20	-	100,00
Melon	120,02	0,50	99,58	371,28	-	100,00
Nanas	185,54	0,70	99,62	123,86	-	100,00
Pepaya	748,30	0,50	99,93	390,55	-	100,00
Pisang	9.842,97	98,74	99,00	10.946,18	161,38	98,53
Rambutan	63,07	0,00	100,00	65,96	-	100,00
Salak	1.989,88	0,00	100,00	1.210,68	-	100,00
Semangka	537,61	0,00	100,00	454,12	-	100,00
Terong				0,10	-	100,00
Tomat				3420,51	1,00	99,97
Grand Total	58.649,40	353,63	99,40	69.405,52	211,88	99,69

Lampiran 6. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Benih Hortikultura

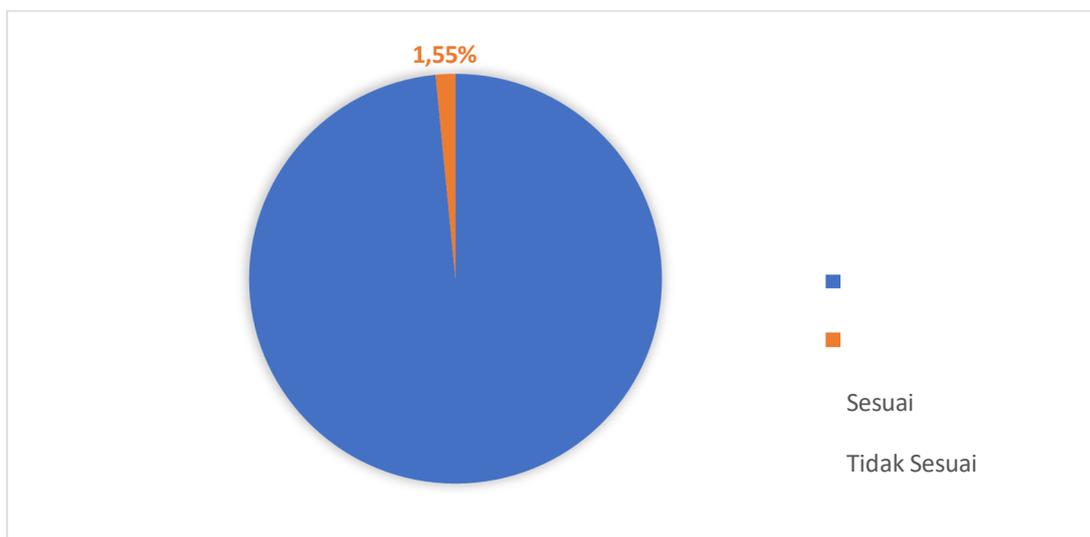
NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Aceh	Aceh Besar
2	Sumatera Utara	Kota Medan, Tapanuli Selatan
3	Jambi	Kerinci, Kota Sungai Penuh
4	Bengkulu	Bengkulu Tengah
5	Riau	Pekanbaru
6	Kepulauan Riau	Bintan
7	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih
8	Lampung	Lampung Timur, Kota Bandar Lampung
9	Banten	Pandeglang
10	DKI Jakarta	Jakarta Selatan
11	Jawa Barat	Ciamis, Garut, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Sumedang
12	Jawa Tengah	Banyumas, Batang, Brebes, Grobogan, Kebumen, Pemalang, Semarang, Surakarta, Tegal, Wonogiri, Kendal
13	Jawa Timur	Blitar, Bondowoso, Pasuruan, Probolinggo, Kota Batu, Ngawi, Ponorogo, Sampang, Trenggalek
14	DI Yogyakarta	Bantul, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Sleman
15	Kalimantan Barat	Mempawah
16	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
17	Gorontalo	Kota Gorontalo
18	Sulawesi Tengah	Sigi, Kota Palu
19	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan
20	Sulawesi Selatan	Bone, Enrekang, Pangkajene Kepulauan, Gowa

Lampiran 7. Rekapitulasi Jawaban Hasil Survei Kemanfaatan Benih Hortikultura Tahun 2024

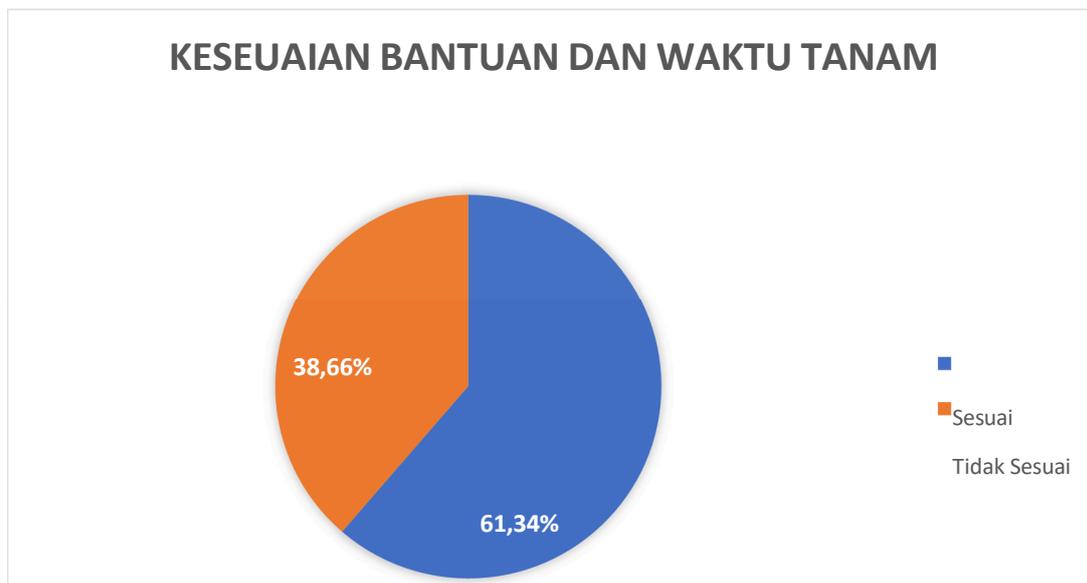
**Apakah varietas benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta?
194 jawaban**



**Apakah jumlah/volume benih yang diterima sudah mencukupi kebutuhan/target tanam?
194 jawaban**



**Apakah waktu serah terima benih sudah sesuai dengan jadwal tanam?
194 jawaban**



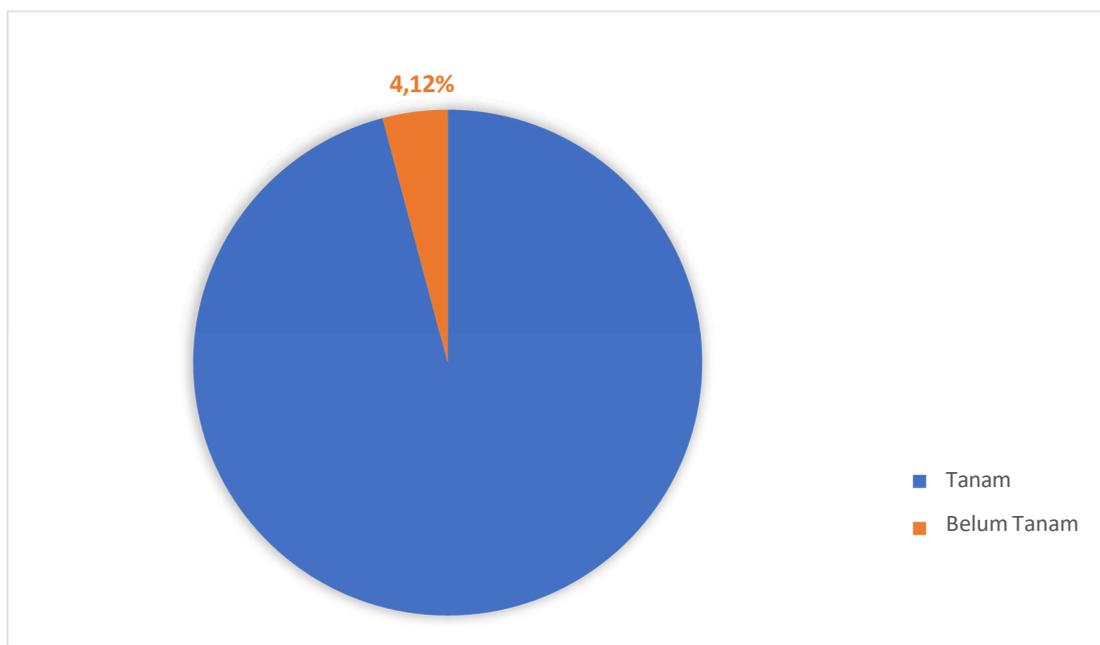
Apakah benih yang diterima berlabel? 194 jawaban



Bagaimana kondisi benih saat diterima? 194 jawaban

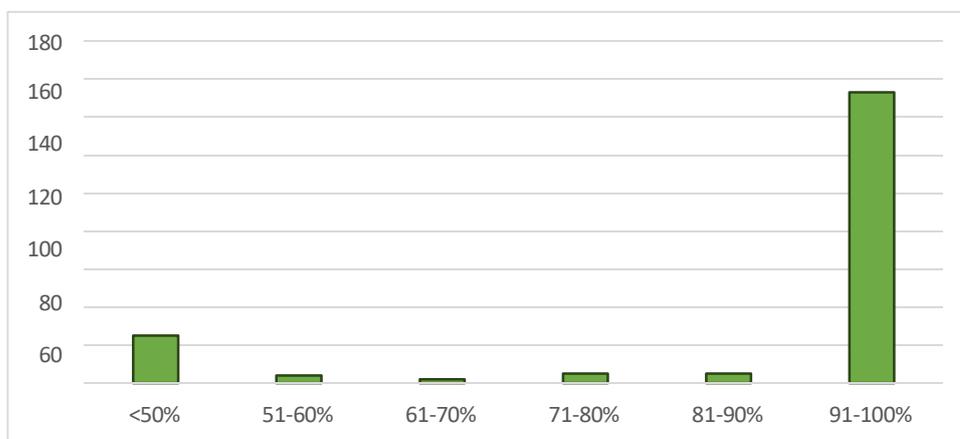


**Apakah benih yang diterima sudah ditanam?
194 jawaban**

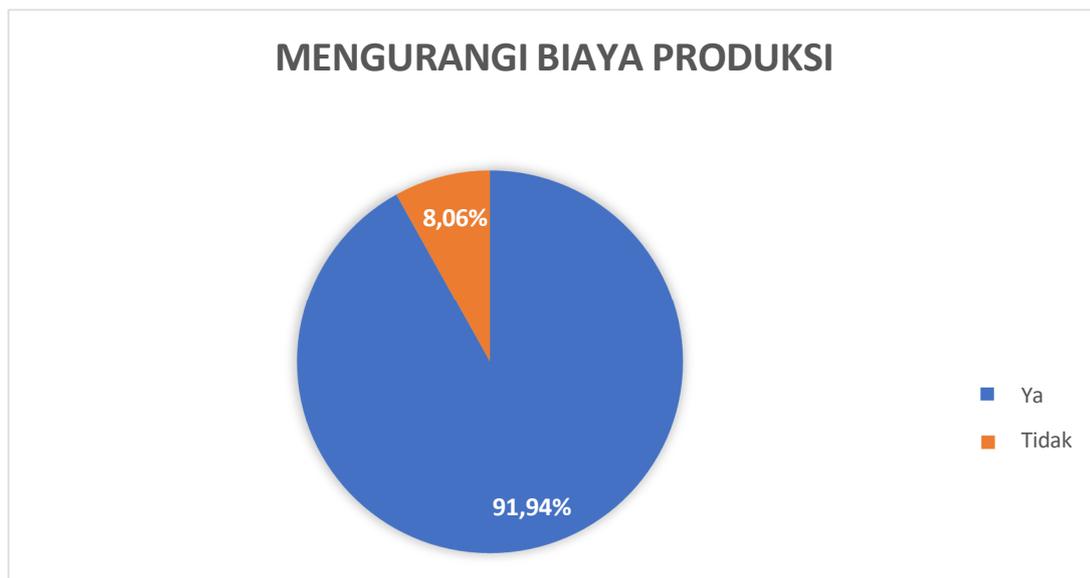


Jumlah benih yang ditanam :

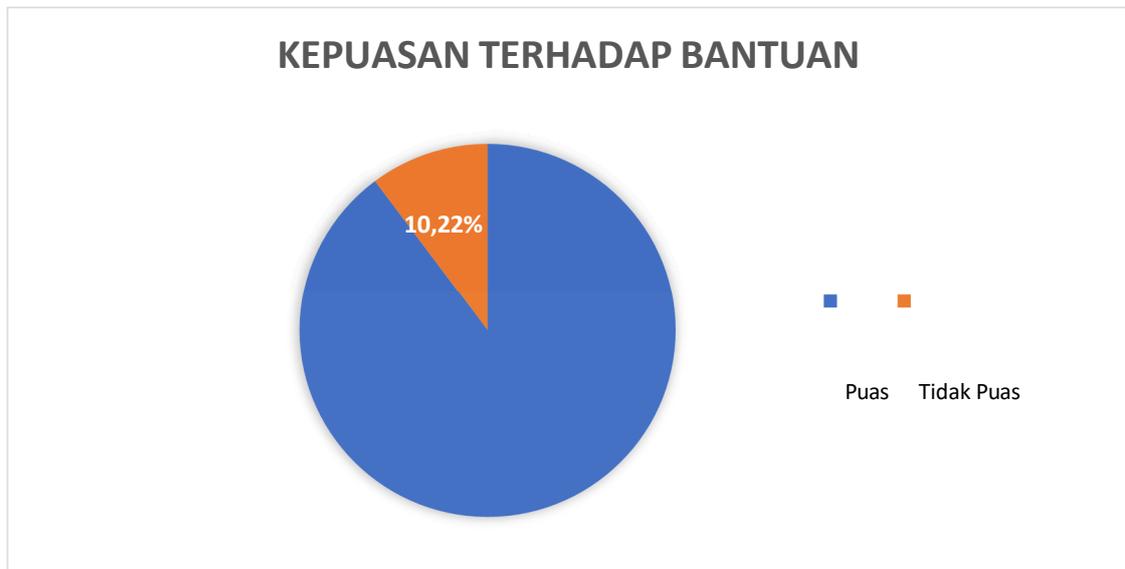
Persen benih ditanam	Jumlah Responden
<50%	25
51-60%	4
61-70%	2
71-80%	5
81-90%	5
91-100%	153
Total	194



Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi? 186 jawaban



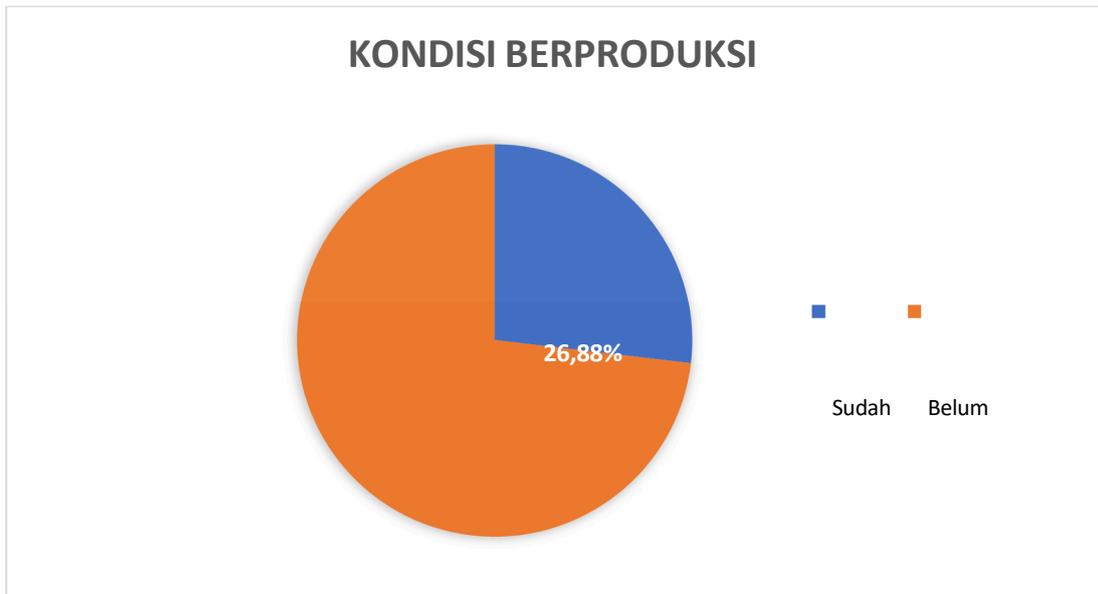
Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan? 186 jawaban



Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari Pemerintah? 186 jawaban



Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi? 186 jawaban



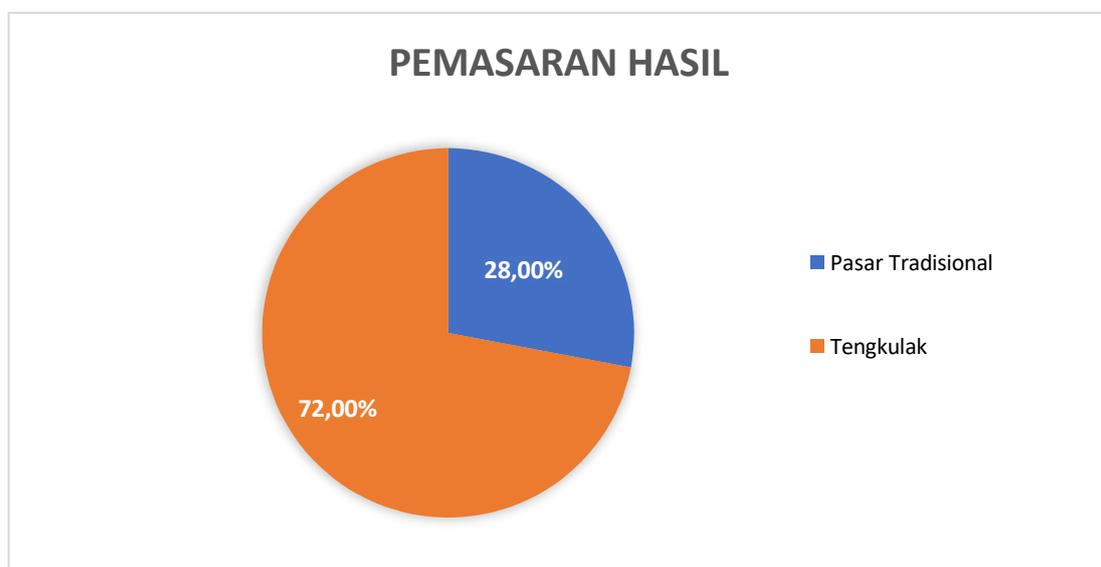
Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan? 50 jawaban



Hasil Panen dimanfaatkan untuk : 50 jawaban



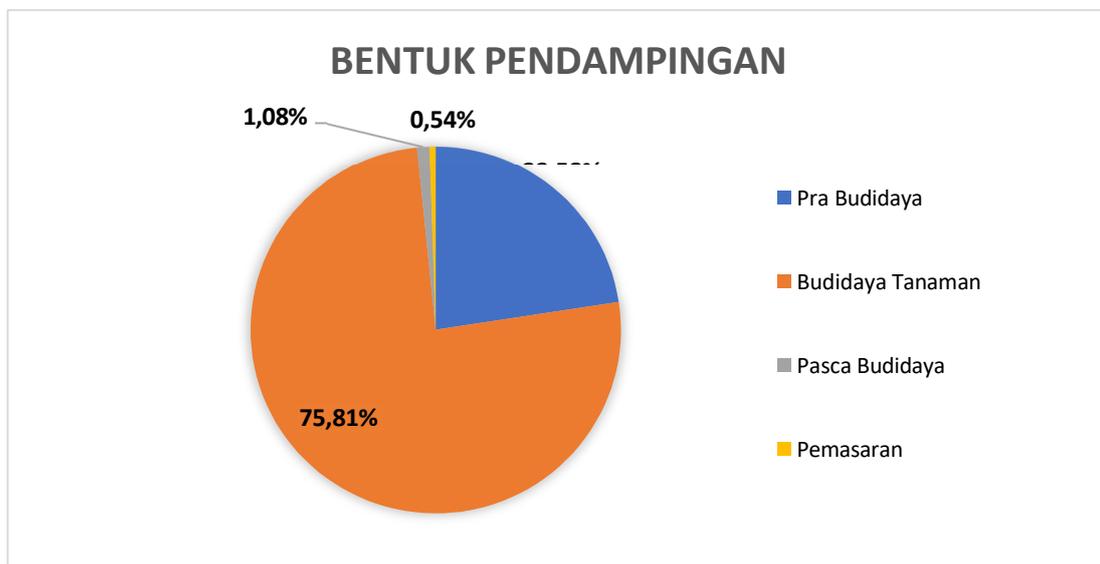
Jika dijual, penyaluran hasil panen melalui 50 jawaban



Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan benih tersebut? 186 jawaban



Jika ada pendampingan, bentuk pendampingan seperti apa? 186 jawaban



Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi terkait budidaya hortikultura? 194 jawaban



Lampiran 8. Sebaran Sampel Alsintan Pada Kuesioner Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen Tahun 2024

No	Provinsi	Jumlah Alsintan yang Dievaluasi (unit)		Status Pemanfaatan (unit)		Tingkat Kemanfaatan (%)
		Refocusing Tahun 2023	Fasilitasi s.d. Sept. 2024	Sudah	Belum	
1	Aceh	63	23	75	11	87,21
2	Bangka Belitung	1	2	1	2	33,33
3	Bengkulu	6	8	8	6	57,14
4	Jambi	14	6	18	2	90,00
5	Sumatera Utara	36	30	61	5	92,42
6	Sumatera Selatan	29	48	72	5	93,51
7	Sumatera Barat	16	5	18	3	85,71
8	Lampung	39	36	69	6	92,00
9	Jawa Barat	58	40	81	17	82,65
10	Jawa Tengah	51	113	152	12	92,68
11	DI. Yogyakarta	4	9	13	-	100,00
12	Jawa Timur	74	54	124	4	96,88
13	Banten	18	21	34	5	87,18
14	Nusa Tenggara Barat		8	6	2	75,00
15	Kalimantan Selatan	2	24	19	7	73,08
16	Kalimantan Barat	17	2	19	0	100,00
17	Kalimantan Tengah	14	20	26	8	76,47
18	Kalimantan Timur	13	10	19	4	82,61
19	Sulawesi Utara		8	2	6	25,00
20	Sulawesi Tengah	7	19	19	7	73,08
21	Sulawesi Selatan	177	186	356	7	98,07
22	Sulawesi Tenggara	22	31	43	10	81,13
23	Sulawesi Barat	11	7	15	3	83,33
24	Gorontalo	1	7	7	1	87,50
25	Maluku	11	8	12	7	63,16
26	Maluku Utara	1	3	2	2	50,00
27	Nusa Tenggara Barat	23	19	28	14	66,67
28	Nusa Tenggara Timur	29	19	37	11	77,08
29	Papua Selatan	0	51	3	48	5,88
30	Papua Tengah		2	0	2	0,00
31	Papua	7		7		100,00
32	Papua Barat	3		3		100,00
33	Riau	9		9		100,00
34	Bali	2		2		100,00
	TOTAL	758	819	1360	217	86,24

Lampiran 9. Realisasi Anggaran kementerian Pertanian per Eselon I TA 2024

NO	Unit kerja Eselon 1	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
Kementerian Pertanian		15.585.644.566.000	14.272.137.630.919	91,57	1.313.506.935.081
1	Sekretariat Jenderal	1.239.632.167.000	1.130.944.434.070	91,23	108.687.732.930
2	Inspektorat Jenderal	125.024.676.000	75.808.920.712	60,64	49.215.755.288
3	Ditjen Tanaman Pangan	3.278.835.155.000	3.099.384.555.954	94,53	179.450.599.046
4	Ditjen Hortikultura	433.499.771.000	382.133.111.712	88,15	51.366.659.288
5	Ditjen Perkebunan	716.665.567.000	622.481.184.894	86,86	94.184.382.106
6	Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.009.589.095.000	962.944.664.118	95,38	46.644.430.882
7	Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian	6.659.570.879.000	5.983.788.612.450	89,85	675.782.266.550
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	933.853.861.000	849.745.515.714	90,99	84.108.345.286
9	Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	1.188.973.395.000	1.164.906.631.295	97,98	24.066.763.705

Sumber: aplikasi OMSPAN, per 28 Februari 2025



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2024**

Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung A
Jl. Harsono RM No.3, Ragunanm Jakarta 12550



(021) 780 4055, Fax (021) 780 4237



www.pertanian.go.id